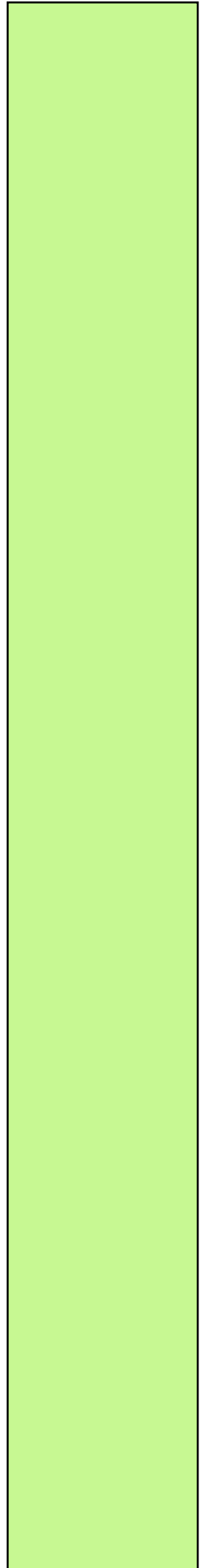




# **GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2045**



## KATA PENGANTAR

Berkat penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan Yang Maha Kuasa, penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan dengan baik.

Grand Design Pembangunan Pendidikan ini disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menghadirkan arah pembangunan pendidikan yang terencana, terukur dan berkelanjutan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dokumen ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan bukan sekadar penyediaan layanan sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi emas Mimika yang berdaya saing, berkarakter dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dokumen ini memberikan arah pembangunan yang komprehensif, mulai dari perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kelembagaan, tata kelola berbasis data, hingga transformasi pendidikan menuju ekosistem yang inklusif, relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman maupun kebutuhan lokal.

Melalui penyusunan dokumen GDPP ini, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga adat, lembaga keagamaan, serta dukungan masyarakat luas. Upaya bersama ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan daerah yang lebih merata, berkualitas dan berorientasi pada masa depan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, seluruh OPD terkait, Tim PSK UNCEN sebagai penyusun GDPP, para pemangku kepentingan pendidikan, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Timika, 15 Desember 2025  
Kepala,

**Dr. Ir. YOHANA PALILING, M.Si**



## SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan penyelenggaraan-Nya, dokumen **Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika yang telah bermitra dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih dalam proses penyusunannya. Di samping itu masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan, praktisi, akademisi dan mitra pembangunan telah memberikan kontribusi signifikan bagi penyempurnaan isi dokumen ini.

Berbagai data, fakta dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mimika menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pendidikan jangka panjang. Analisis situasi pendidikan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses, mutu, relevansi dan tata kelola antar wilayah, baik di kawasan pesisir, dataran rendah maupun pegunungan daerah perkotaan, pinggiran dan pedalaman. Selain itu perubahan demografi, perkembangan teknologi, dinamika sosial-budaya lokal, serta tantangan global menuntut adanya transformasi pendidikan yang lebih adaptif, inklusif dan berkelanjutan.

Setidaknya terdapat tiga isu besar yang perlu dicermati sebagai dasar perencanaan pendidikan jangka panjang yaitu:

1. Kualitas dan pemerataan layanan pendidikan harus mampu menjawab tantangan keterisolasian geografis dan hambatan infrastruktur layanan dasar.
2. Struktur penduduk usia sekolah yang masih dominan pada usia produktif memberikan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas SDM sejak pendidikan dasar hingga menengah.
3. Dinamika mobilitas penduduk, arus migrasi masuk serta keragaman sosial-budaya menuntut penyelenggaraan pendidikan yang menghargai kebhinnekaan, memperkuat karakter dan membangun kompetensi abad XXI.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah Grand Design Pembangunan Pendidikan sebagai arah strategis jangka panjang yang menjadi pedoman bagi perumusan kebijakan, program dan intervensi prioritas sektor pendidikan di Kabupaten Mimika. Grand design ini memuat visi bersama, arah kebijakan, strategi, fokus pembangunan, serta target jangka pendek, menengah dan panjang. Dokumen ini juga menjadi bagian integral dari keseluruhan agenda pembangunan daerah, terutama dalam mendukung percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dalam mewujudkan “Papua Cerdas”.

Dalam dokumen ini, pembangunan pendidikan diletakkan pada lima pilar utama: perluasan akses dan pemerataan layanan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, transformasi kelembagaan dan tata kelola, penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan, serta penguatan sistem data dan informasi pendidikan. Melalui implementasi GDPP ini diharapkan terwujud sumber daya manusia Mimika yang cerdas, sehat, berkarakter, unggul, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap masa depan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan.

Atas terselesainya dokumen Grand Design Pembangunan Pendidikan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi tenaga, pikiran dan dukungan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Semoga GDPP ini dapat menjadi pedoman bersama dalam akselerasi pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika.

Timika, 19 Desember 2025  
Bupati Mimika,

**JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Sambutan Bupati .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Singkatan .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	5
C. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Pendidikan dalam RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 .....	8
D. Maksud, Tujuan dan Sasaran GDPP .....	10
E. Analisis Lingkungan Strategis .....	12
F. Kedudukan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika .....	15
G. Hubungan GDPP dengan RPJPD, RPJMD, GDPK dan GERBANG EMAS .....	16
H. Ruang Lingkup dan Pendekatan .....	19
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN .....	22
A. Profil Daerah dan Demografi .....	22
B. Kondisi Situasi Penyelenggaraan Pendidikan .....	30
C. Status Akreditasi Sekolah .....	63
D. Rapor Mutu Pendidikan .....	69
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN ARAH PENGEMBANGAN .....	73
A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis .....	73
B. Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan Pendidikan .....	81
C. Kerangka Konseptual GDPP dalam Perencanaan Pembangunan Daerah .....	84
D. Pendekatan Berbasis Data, Konteks Wilayah dan Kolaborasi..	87
E. Peran Serta Masyarakat (PSM) .....	89
BAB IV. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	92
A. Visi dan Misi .....	92
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	94
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan .....	95
D. Fokus Prioritas dan Program Unggulan .....	96
E. Integrasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal .....	97

BAB V.	RENCANA AKSI DAN PETA JALAN (ROADMAP) GDPP 2025-2045 .....	100
	A. Prioritas dan Target Pembangunan .....	100
	B. Peta Jalan Pembangunan Pendidikan 2025-2045 .....	109
	C. Indikator Kinerja .....	113
	D. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	118
	E. Strategi dan Sumber Pendanaan .....	119
	F. Mekanisme Koordinasi dan Implementasi .....	121
BAB VI.	TATA KELOLA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI GDPP .....	126
	A. Kelembagaan dan Peran Pemangku Kepentingan .....	126
	B. Tata Kelola Pendidikan Berbasis Data dan Konteks Wilayah ..	128
	C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP) .....	129
	D. Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan Pembangunan Pendidikan .....	131
BAB VII.	PENUTUP .....	133
	Daftar Pustaka .....	136

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Persebaran dan Sex Rasio Tahun 2025 .....	22
Tabel 2.2 Angka Melek Huruf Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2025 .....	25
Tabel 2.5 Jumlah Peserta Didik PAUD/TK Tahun 2025 .....	32
Tabel 2.6 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik PAUD/TK Tahun 2025 .....	34
Tabel 2.7 Jumlah Peserta Didik SD Tahun 2025 .....	36
Tabel 2.8 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SD Tahun 2025 .....	38
Tabel 2.9 Jumlah Peserta Didik SMP Tahun 2025 .....	40
Tabel 2.10 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMP Tahun 2025 .....	43
Tabel 2.11 Jumlah Peserta Didik SMA Tahun 2025 .....	44
Tabel 2.12 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMA Tahun 2025 .....	46
Tabel 2.13 Jumlah Peserta Didik SMK Tahun 2025 .....	48
Tabel 2.14 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMK Tahun 2025 .....	50
Tabel 2.15 Jumlah dan Jenis Kelamin Tenaga Pendidik menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025 .....	51
Tabel 2.16 Jumlah dan Jenis Kelamin Tenaga Pendidik dan Kependidikan menurut Status Tahun 2025 .....	53
Tabel 2.17 Sarana-Prasarana Sekolah Tahun 2025 .....	54
Tabel 2.18 Jumlah dan Rasio Ruang Kelas dengan Peserta Didik Tahun 2025 .....	59
Tabel 2.19 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sektor Pendidikan Tahun 2023	61
Tabel 2.20 Capaian Rapor Pendidikan Komponen Kemampuan Literasi Numerasi dan Karakter Tahun 2025 .....	70
Tabel 5.1 Target Akses dan Pemerataan Layanan Dasar Pendidikan .....	100
Tabel 5.2 Target Kualitas dan Relevansi Pembelajaran .....	103
Tabel 5.3 Target Transformasi Tata Kelola Pendidikan .....	105
Tabel 5.4 Target Sistem Pendidikan Inovatif dan Berdaya Saing .....	107
Tabel 5.5 Ukuran Keberhasilan per 5 tahunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 .....	111
Tabel 5.6 Sasaran, Kebijakan, Program Strategis dan Indikator Kinerja Pendidikan Formal GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 .....	113
Tabel 5.7 Sasaran, Kebijakan, Program Strategis dan Indikator Kinerja Pendidikan nonFormal GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 .....	116

Tabel 5.8	Indikator Kinerja Utama (IKU) Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika .....	118
Tabel 5.9	Rekomendasi Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika .....	123

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 .....	26
Grafik 2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 .....	28
Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 .....	29
Grafik 2.4 Status Akreditasi Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Transformasi Pembangunan SDM Mimika .....	3
Gambar 1.2 Hubungan GDPP dengan RPJPD, RPJMD dan GERBANG EMAS Mimika .....	18
Gambar 1.3 Integratif Pembangunan Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik dalam Mimika Rumah Kita .....	19
Gambar 3.1 Pendekatan Berbasis Data, Konteks Wilayah dan Kolaborasi .....	87
Gambar 5.1 Tahapan Rencana Aksi dan Roadmap GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 .....	109

## DAFTAR SINGKATAN

AHH	: Angka Harapan Hidup
AMH	: Angka Melek Huruf
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASN	: Aparat Sipil Negara
BAN	: Badan Akreditasi Nasional
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
CALISTUNG	: Baca, Tulis dan Berhitung
CoE	: <i>Center of Excellence</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DAPODIK	: Data Pokok Pendidikan
DIKDAS	: Pendidikan Dasar
DIKLAT	: Pendidikan dan Latihan
DIKPORA	: Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DUDIKA	: Dunia Usaha, Industri dan Kerja
DUKCAPIL	: Kependudukan dan Catatan Sipil
DKB	: Data Konsolidasi Bersih
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DR	: <i>Dependency Ratio</i>
EDS	: Evaluasi Diri Sekolah
e-KTP	: Elektronik Kartu Tanda Penduduk
GALCITAS	: Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan
GERBANG EMAS	: Gerakan Kebangkitan Ekonomi, Masyarakat Adil dan Sejahtera
GDPK	: Grand Design Pembangunan Kependudukan
GDPP	: Grand Design Pembangunan Pendidikan
GLM	: Gerakan Literasi Mimika
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INPRES	: Instruksi Presiden
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTeKS	: Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
KABID	: Kepala Bidang
KAT	: Kawasan Adat Terpencil
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KEMENDIKDASMEN	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KOMBEL	: Komunitas Belajar
KOMSEK	: Komite Sekolah
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KKG	: Kelompok Kerja Guru
KKKS	: Kelompok Kerja Kepala Sekolah
KMB	: Kurikulum Merdeka Belajar
KPTT	: Kawasan Perdesaan, Terpencil dan Tertinggal
LMS	: <i>Learning Management System</i>
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MEP	: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAP	: Orang Asli Papua
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	: Otonomi Khusus
PERBUP	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PGSD	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PJOK	: Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKL	: Praktik Kerja Lapangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
PPT	: Provinsi Papua Tengah
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSK	: Pusat Studi Kependudukan
PSM	: Peran Serta Masyarakat
PT	: Perguruan Tinggi
PTFI	: PT Freeport Indonesia
RIPPP	: Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
RISKESDAS	: Riset Kesehatan Dasar
RENSTRA	: Rencana Strategis
ROMBEL	: Rombongan Belajar
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKS	: Rencana Kerja Sekolah
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SATAP	: Sekolah Satu Atap
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SISDIKNAS	: Sistem Pendidikan Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDI	: Satu Data Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
SR	: <i>Sex Ratio</i>
STEAM	: <i>Science, Technology, Engineering, Art and Math</i>
TAMSIL	: Tunjangan Tambahan Penghasilan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKG	: Tunjangan Khusus Guru
TPG	: Tunjangan Profesi Guru
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNCEN	: Universitas Cenderawasih
UPP	: Unit Pelayanan Pendidikan
UU	: Undang-Undang
WAJAR	: Wajib Belajar
YAPIS	: Yayasan Pendidikan Islam
YPK	: Yayasan Pendidikan Kristen
YPMK	: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro
YPPGI	: Yayasan Pendidikan Gereja Injili di Indonesia
YPPK	: Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik
2-Peran	: Institusi dan Tokoh Perempuan dan Pemuda
3-Tungku	: Institusi dan Tokoh Pemerintah, Adat dan Agama
3-T	: Tertinggal, Terdepan dan Terluar

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya saing, pendidikan merupakan salah satu pilar strategis yang sangat penting. Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat transformasi pada level individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan kelembagaan dan pembangunan sosial yang lebih luas, baik di tingkat masyarakat maupun negara. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan pentingnya sistem pendidikan yang menyeluruh, merata dan berkualitas. Amanat tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal melalui pendekatan *bottom-up*.

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata bahwa negara hadir untuk mendukung semangat dan keinginan masyarakat dalam memajukan sektor pendidikan. Oleh karena itu, kesiapan dan respon pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan pendidikan di wilayah masing-masing. Hal ini menjadi sangat relevan karena sektor pendidikan mencakup dimensi yang luas, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh tiga pilar strategis, yakni peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta peningkatan tata kelola pendidikan.

Secara khusus Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi, geografis dan politik lokal yang sangat kompleks dan beragam. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika masih dihuni oleh kelompok masyarakat yang tinggal secara terpencil dan terisolasi, terutama di kawasan pesisir dan pegunungan. Akses terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan masih menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, sebagian masyarakat di wilayah perkotaan telah mengalami

modernisasi yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Data pendidikan tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Mimika mencapai 10,72 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 25 tahun telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP atau setara tuntas Wajib Belajar 9 Tahun. Harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,16 tahun, atau setara dengan jenjang kelas 3 SMA/SMK semester pertama. Meskipun demikian masih ditemukan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan, khususnya di jenjang dasar dan menengah. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit jumlah siswa yang melanjutkan, terutama di daerah pinggiran dan pedalaman. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam hal akses, infrastruktur, tenaga pendidik serta kendala sosial dan budaya yang masih membatasi partisipasi pendidikan secara menyeluruh.

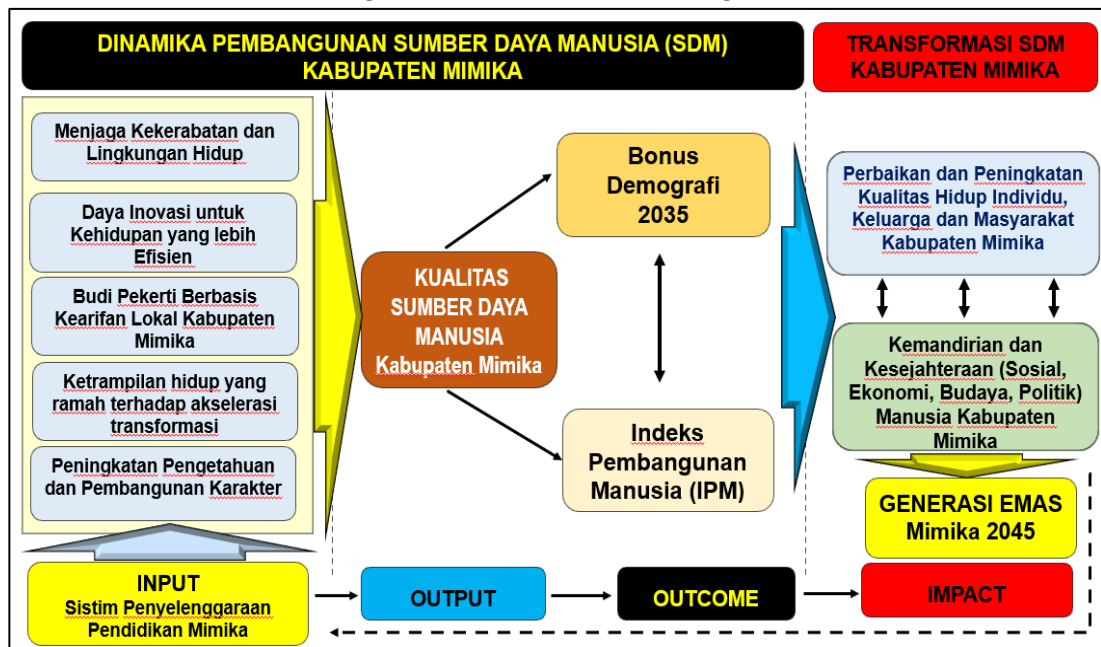
Ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di Kabupaten Mimika menjadi tantangan paling nyata bagi pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. SDM yang unggul hanya dapat dibentuk melalui sistem pendidikan yang terbuka, adil dan menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. Perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya dan demografis di Kabupaten Mimika, meskipun menjadi tantangan besar, juga dapat menjadi kekuatan jika direspons dengan pendekatan kebijakan yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal.

Dalam konteks kebijakan nasional, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, memberikan ruang yang lebih besar bagi percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Dalam dokumen nasional

tersebut, sektor pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan “Papua Cerdas”.

Dalam semangat transformasi Otonomi Khusus Papua, percepatan pembangunan pendidikan harus berlandaskan pada pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender serta sepenuhnya kontekstual Papua. Fokus utama pembangunan pendidikan ialah penciptaan SDM Mimika yang unggul, inovatif, berkarakter dan berdaya saing, dengan mempertimbangkan keragaman konteks sosial masyarakat Mimika secara menyeluruh dari pesisir, dataran hingga wilayah pegunungan.

Gambar 1.1 Kerangka Transformasi Pembangunan SDM Mimika



Sumber: Disain Tim PSK, 2005

Kabupaten Mimika sebagai salah satu kabupaten strategis di wilayah Papua Tengah memiliki tingkat keragaman budaya yang tinggi. Namun di kabupaten ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang masih hidup dengan pola subsisten (meramu) serta masyarakat yang telah hidup dalam lingkungan modern sebagaimana di berbagai wilayah lain di Indonesia. Ketimpangan ini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sebagai SDM yang tangguh dan kompetitif.

Perjumpaan budaya tradisional dengan perkembangan teknologi dan arus modernisasi yang cepat di kabupaten Mimika menciptakan lompatan budaya yang signifikan. Hal ini berpotensi menimbulkan gegar budaya, terutama bagi masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan cepat tersebut. Di sisi lain, perkembangan wilayah Mimika sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai kabupaten dengan intensitas mobilitas penduduk yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya dinamika sosial-budaya yang kompleks, termasuk infiltrasi budaya dari luar yang tidak selalu seimbang.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mimika dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Keragaman jenis layanan pendidikan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memilih pendekatan yang paling tepat bagi karakteristik sosial-budaya masyarakat di masing-masing kawasan. Pada saat yang sama, pendidikan karakter tetap menjadi komponen penting dalam membangun generasi Mimika yang berintegritas, berdaya dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pendidikan merupakan proses transformatif untuk memanusiakan manusia, memberdayakan, mencerahkan dan memuliakan kehidupan. Proses transformasi ini hanya dapat terwujud melalui sistem pendidikan yang terpadu antara sekolah, keluarga dan komunitas. Layanan pendidikan juga menjadi bentuk pemenuhan hak konstitusional seluruh warga di Kabupaten Mimika, baik anak-anak maupun kelompok usia lainnya, dalam rangka mewujudkan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

Melihat kompleksitas kebutuhan dan tantangan pendidikan di Kabupaten Mimika, diperlukan dokumen Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika sebagai acuan strategis untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045. Dokumen ini sangat strategis dalam memastikan pencapaian target pembangunan pendidikan sesuai mandat Undang-Undang Otonomi Khusus dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang harus berjalan sinergis, efektif dan berorientasi hasil.

Dalam kerangka otonomi khusus, pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab mendorong percepatan pemenuhan layanan pendidikan yang mampu memutus rantai ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan yang selama ini menjadi sumber ketimpangan sosial. Karena itu inovasi kebijakan pendidikan menjadi sangat penting melalui pendekatan asimetris yang memungkinkan setiap distrik dan kawasan memperoleh solusi sesuai kebutuhan riilnya. Pendekatan ini menuntut keberanian untuk meninggalkan pola lama (*to think outside the box*) dan mendorong penggunaan strategi yang kreatif dan kontekstual.

Agar percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan tahapan kerja yang jelas, konkret, terukur dan realistis. GDPP Kabupaten Mimika memuat peta jalan (*road map*) yang memberikan arahan rinci mengenai tahapan pelaksanaan dari periode awal hingga periode akhir pembangunan. Sebagai dokumen hidup, GDPP akan terus diperbarui selaras dinamika persoalan, kebutuhan aktual dan perkembangan kebijakan sehingga mampu mengarahkan pembangunan pendidikan Mimika menuju sasaran yang ditetapkan pada tahun 2045.

## **B. Dasar hukum**

Penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 ini dilandaskan pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peserta didik dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001) tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 71).
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Peserta didik melalui Pendidikan Peserta didik di Provinsi Papua;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045.

### C. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Pendidikan dalam RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045

Grand Design Pembangunan Pendidikan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen pendukung utama bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan serta sasaran pokok yang tercantum dalam Bab V RPJPD 2025-2045, termasuk indikator serta target yang harus dicapai sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang.

Pada misi pertama, yaitu **Mentransformasikan kehidupan sosial yang unggul**, dengan sasaran pokok meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta optimalnya daya serap lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam lapangan kerja. Untuk itu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan untuk setiap tahapan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan I: 2025-2029

Pada tahap RPJMD I ini, arah kebijakan pendidikan lebih ditekankan pada penguatan pondasi pembangunan dari periode sebelumnya. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kuantitas pembangunan pendidikan, penambahan dan pengembangan unsur-unsur sekolah berupa gedung sekolah, murid, tenaga tenaga pendidik, fasilitas dan manajemen sekolah menjadi perhatian utama, baik itu di jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Di tahap ini peningkatan kuantitas unsur-unsur sekolah lebih ditujukan untuk memperluas akses pendidikan pada seluruh masyarakat agar pemerataan pendidikan dapat diwujudkan dengan optimal.

#### 2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan II: 2030-2034

Pada RPJMD tahap ke-2 ini, seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas pendidikan pada tahap sebelumnya, maka kualitas atau mutu pendidikan juga ditingkatkan. Peningkatan mutu pendidikan harus sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya, guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Dimana hal ini dilakukan dengan

cara meningkatkan mutu kurikulum, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas pendidikan, penerapan manajemen berbasis sekolah dan evaluasi pendidikan yang tepat, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Hal penting lainnya juga adalah peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah, serta akreditasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan secara merata.

### **3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan III: 2035-2039**

Pada RPJMD tahap ke-3 ini, pemerataan mutu, akses dan tata kelola, pendidikan diselenggarakan secara inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan pada tahap ini merupakan perwujudan dari akselerasi yang modern pada pendidikan anak usia dini, tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pengembangan SMK berbasis *life skill* dan kebutuhan pasar yang didukung oleh IPTEKS dan penguasaan bahasa asing, termasuk pendirian Sekolah Unggulan. Selanjutnya dalam rangka memberikan kesempatan secara merata dan proporsional pada masyarakat lokal untuk mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, telah dibangun sebuah universitas atau institut daerah yang berkolaborasi dengan swasta dan bertaraf nasional.

### **4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan IV: 2040-2045**

Pada RPJMD tahap ke-4 ini, wajib belajar 12 tahun dan satu tahun PAUD sudah dapat dituntaskan secara maksimal. Pembangunan pendidikan sudah berlangsung secara mandiri dan berdaya saing yang dicirikan antara lain adanya kepercayaan masyarakat dengan bukti banyaknya animo siswa, ada habit yang membentuk budaya yang positif, inovatif, dinamis, dalam lingkungan kerja yang sehat, ada sumber pendanaan mandiri, memiliki capaian prestasi sekolah baik di level internasional, nasional maupun regional.

Pada tahap ini umumnya sekolah swasta akan lebih dominan dibandingkan sekolah negeri, karena peran masyarakat untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah yang bermutu dengan pembiayaan sendiri semakin besar. Pemerintah daerah lebih banyak sebagai penasehat, memberi bantuan operasional sekolah, menjaga agar tidak terjadi ketimpangan

pendidikan, dan melindungi penduduk miskin untuk selalu dapat mengakses pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

## **D. Maksud, Tujuan dan Sasaran GDPP**

### **1. Maksud**

Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika ini dapat dinyatakan juga sebagai dokumen perencanaan jangka panjang bidang pendidikan, yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan ini adalah menyediakan rancangan induk yang merupakan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam pencapaian sasaran pokok RPJPD bidang pendidikan yang telah ditetapkan melalui sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika. Secara operasional, disusun *roadmap* yang menunjukkan tahapan pembangunan pendidikan untuk sasaran pokok pada periode tahun 2025-2045.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika 2025-2045 bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah strategis dan kerangka kebijakan jangka panjang bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika yang responsif terhadap kondisi sosial, budaya, geografis dan demografis wilayah;
- b. Mengintegrasikan visi pembangunan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP);
- c. Mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif, akuntabel dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat di wilayah terpencil;

- d. Menyiapkan generasi muda Kabupaten Mimika yang cerdas, sehat, produktif, kompetitif dan berdaya saing dalam menyongsong Bonus Demografi 2030-2035 dan Generasi Emas Mimika Tahun 2045.

### **3. Sasaran**

Sasaran penyusunan GDPP Kabupaten Mimika 2025-2045 yaitu:

#### **a. Jangka Pendek Tahun 2025-2029**

- 1) Tersusunnya dokumen Grand Design Pembangunan Pendidikan yang komprehensif sebagai acuan kebijakan dan basis perencanaan lintas sektor
- 2) Tersedianya peta kondisi pendidikan terkini (baseline data) yang terukur, valid dan kontekstual
- 3) Terbangunnya koordinasi dan sinergi awal antar para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, sekolah, komunitas adat, LSM, gereja, dunia usaha dan lembaga donor)
- 4) Diterapkannya kebijakan prioritas percepatan akses pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T) pada wilayah pesisir dan pegunungan
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.

#### **b. Jangka Menengah Tahun 2030-2035**

- 1) Terwujudnya sistem layanan pendidikan yang mulai merata dan berkualitas hingga ke kawasan pinggiran dan pedalaman pada wilayah pesisir dan pegunungan
- 2) Meningkatnya partisipasi pendidikan pada semua jenjang, terutama pendidikan menengah dan vokasional
- 3) Terciptanya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kontekstual dan tersebar merata
- 4) Terintegrasinya pendidikan formal dengan program pemberdayaan masyarakat lokal dan ekonomi keluarga
- 5) Tersedianya model pendidikan kontekstual berbasis budaya dan kearifan lokal komunitas kabupaten Mimika.

### c. Jangka Panjang Tahun 2036-2045

- 1) Terwujudnya Generasi Emas Mimika 2045 yang unggul, produktif, berdaya saing tinggi dan berkarakter
- 2) Kabupaten Mimika menjadi pusat unggulan pendidikan di wilayah Papua Tengah dengan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan
- 3) Pendidikan menjadi pengungkit utama dalam pengentasan kemiskinan struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Mimika
- 4) Terciptanya SDM lokal yang mampu menjadi pemimpin dan pelaku utama pembangunan ekonomi, sosial dan budaya berbasis potensi dan keunggulan daerah
- 5) Terbangunnya tata kelola pendidikan daerah yang modern, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

## E. Analisis Lingkungan Strategis

Pergeseran struktur sosial dan ekonomi di tingkat lokal dan regional, yang dipicu oleh percepatan replikasi teknologi dan mobilitas penduduk, telah menciptakan perubahan lingkungan strategis yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan di Kabupaten Mimika untuk bersifat lebih adaptif, fleksibel dan responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kondisi aktual Kabupaten Mimika saat ini, beberapa tantangan strategis yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

### 1. Tantangan Pertama: Dinamika Sosial-Budaya akibat Pertumbuhan Ekonomi dan Mobilitas Penduduk

Konstelasi pembangunan Mimika sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, wilayah pertambangan berskala global dan daerah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi telah menciptakan intensitas kontak budaya yang meningkat antara masyarakat asli (OAP) dan masyarakat pendatang. Kontak budaya ini dapat menghasilkan dua kemungkinan: terjadinya

akulturasi dan penyesuaian budaya yang positif, atau kompetisi budaya yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Apabila akulturasi gagal, konflik sosial berbasis identitas dapat muncul seiring menurunnya kepercayaan antar kelompok. Dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial wilayah. Dalam konteks ini, pendidikan karakter memiliki peran strategis sebagai fasilitator transformasi sosial-budaya. Pendidikan harus membantu generasi muda Mimika khususnya OAP agar mampu berinteraksi secara setara, menyaring nilai-nilai positif dari luar dan mengadaptasinya menjadi bagian dari budaya baru yang relevan dengan kebutuhan kehidupan modern.

Pendidikan karakter perlu dibangun melalui pembiasaan, keteladanan dan pengalaman belajar di sekolah, keluarga dan masyarakat. Sistem pendidikan nonformal dan informal juga berperan penting dalam mengelola proses akulturasi budaya ini, dengan peranan sentral tokoh adat, tokoh agama dan orang tua dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya positif yang berpadu seimbang antara unsur lokal dan modern.

## **2. Tantangan Kedua: Globalisasi, Kompetisi Tenaga Kerja dan Peluang Bonus Demografi**

Globalisasi yang semakin cepat mendorong meningkatnya tingkat persaingan di dunia kerja, terlebih dengan datangnya era Bonus Demografi tahun 2030-2035, ketika penduduk usia produktif akan mendominasi struktur demografis Kabupaten Mimika. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi dasar dan keterampilan abad XXI, sesuai *Top 10 Skills* kebutuhan pasar kerja versi World Economic Forum (2020). Di sisi lain masuknya investasi, modal, barang dan tenaga kerja dari luar ke Mimika, khususnya sektor pertambangan, konstruksi dan jasa berpotensi menimbulkan kompetisi yang tidak seimbang antara tenaga kerja lokal dan pendatang.

Jika masyarakat lokal tidak disiapkan secara baik, kompetisi ini berpotensi menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun akses terhadap lapangan pekerjaan. Karena itu pendidikan di Kabupaten Mimika harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif

(bukan sekadar komparatif) melalui: perluasan pendidikan vokasi dan kursus keterampilan, pelatihan berbasis standar kompetensi, peningkatan kesiapan kerja sejak pendidikan dasar-menengah dan sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam perencanaan tenaga kerja.

Perlindungan terhadap masyarakat lokal dilakukan melalui kebijakan investasi yang mewajibkan adanya waktu persiapan yang cukup untuk revitalisasi kapasitas tenaga kerja lokal sebagai pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri.

### **3. Tantangan Ketiga: Pemerataan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan yang Masih Rendah**

Pemerataan akses layanan pendidikan formal di Kabupaten Mimika masih menghadapi ketimpangan, terutama di daerah pedalaman, tertinggal dan terpencil pada wilayah pesisir dan pegunungan. Sebagian anak usia sekolah di wilayah tersebut belum memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Ketimpangan rata-rata lama sekolah antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil sangat signifikan, sehingga peningkatan akses pendidikan menjadi prioritas mendesak.

Dari sisi mutu tantangan semakin kompleks. Banyak peserta didik pendidikan dasar belum menguasai kemampuan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) secara memadai. Rendahnya tingkat literasi dasar ini berpotensi meningkatkan angka buta aksara dewasa di masa depan.

Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan antara lain:

- a. Tata kelola dan manajemen sekolah yang belum berorientasi pelayanan publik
- b. Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata dan kompetensi yang bervariasi
- c. Tingginya tingkat ketidakhadiran peserta didik dan tenaga pendidik
- d. Aksesibilitas geografis yang sulit terutama di daerah pesisir dan pegunungan
- e. Rendahnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak (termasuk pemenuhan gizi dan waktu belajar)
- f. Proses pembelajaran yang belum mengutamakan kualitas

Kondisi ini menuntut adanya strategi terintegrasi untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara simultan, dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi geografis, sosial-budaya dan kebutuhan riil masyarakat kabupaten Mimika.

#### **F. Kedudukan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika**

Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi landasan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan sektor pendidikan hingga tahun 2045. Dokumen ini disusun sebagai pedoman utama untuk memastikan adanya kesinambungan kebijakan, konsistensi arah pembangunan, serta integrasi program lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Mimika.

Kedudukan grand design pembangunan pendidikan ini tidak hanya sebagai peta jalan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dan penyelaras berbagai kebijakan pendidikan agar tetap berada dalam koridor visi pembangunan daerah. Dengan begitu setiap program dan intervensi pendidikan dirancang untuk menjawab tantangan kontekstual Kabupaten Mimika yang memiliki karakteristik geografis, sosial dan budaya yang khas.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan pendidikan berbasis data, analisis situasi, dan proyeksi demografis. Melalui kerangka strategis yang komprehensif, grand design memastikan bahwa perencanaan tahunan dan menengah daerah selaras dengan tujuan jangka panjang peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Selain itu grand design pembangunan pendidikan memiliki kedudukan penting sebagai dasar perumusan kebijakan teknis dan operasional pada tingkat dinas pendidikan, satuan pendidikan, serta unit layanan pendukung lainnya. Dokumen ini memberi arahan mengenai pengembangan kapasitas tenaga pendidik, peningkatan mutu pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan tata kelola yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Kedudukan grand design pembangunan pendidikan juga mencakup perannya sebagai rujukan utama dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keagamaan, komunitas adat dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan agar pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga bertumpu pada kekuatan sosial lokal dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat kabupaten Mimika.

Secara keseluruhan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 menempati posisi strategis sebagai fondasi konseptual dan operasional untuk memandu perubahan sistem pendidikan secara bertahap, terukur dan berkelanjutan. Dengan kedudukan tersebut, dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan generasi Mimika yang berdaya saing, inklusif dan siap menghadapi dinamika pembangunan daerah maupun nasional.

## **G. Hubungan GDPP dengan RPJPD, RPJMD, GDPK dan GERBANG EMAS**

### **1. Keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045**

Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika merupakan dokumen strategis sektoral yang menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika 2025-2045. GDPP berperan memperkuat arah kebijakan pembangunan manusia yang tercantum dalam RPJPD, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan berkepribadian budaya lokal.

Melalui GDPP, sasaran pembangunan pendidikan dirumuskan secara lebih rinci dan operasional, sehingga dapat menjadi pedoman teknis bagi perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2045.

### **2. Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Mimika**

Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika memiliki hubungan fungsional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai instrumen penjabaran jangka menengah

dari RPJPD. Dalam konteks ini GDPP memberikan arah dan prioritas kebijakan pendidikan yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD setiap periode lima tahunan.

GDPP menjadi acuan strategis bagi penyusunan program prioritas bidang pendidikan dalam RPJMD, termasuk target capaian pembangunan pendidikan, penganggaran dan indikator kinerja utama (IKU). Keterpaduan ini memastikan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika berjalan konsisten, terukur dan berkesinambungan antar periode pemerintahan.

### **3. Keterkaitan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan**

Secara substansial, Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika memiliki hubungan yang erat dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), terutama dalam konteks pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. GDPP mendukung pencapaian tujuan GDPK melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi SDM sebagai prasyarat utama keberhasilan pengelolaan bonus demografi.

Sinergi antara GDPP dan GDPK diwujudkan melalui penyelarasan strategi pendidikan dengan arah kebijakan kependudukan, seperti peningkatan partisipasi pendidikan, penyiapan tenaga kerja terampil, dan penguatan karakter generasi muda kabupaten Mimika yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

### **4. Keterkaitan dengan Agenda Strategis GERBANG EMAS**

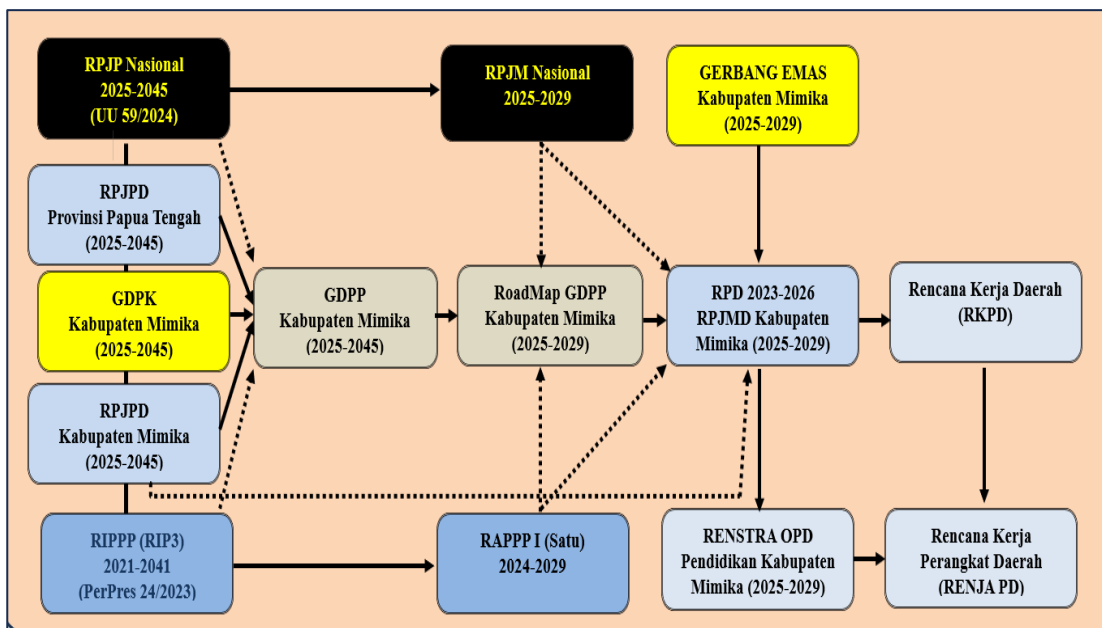
Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika juga merupakan bagian integral dari agenda strategis GERBANG EMAS (Gerakan Kebangkitan Ekonomi, Masyarakat Adil dan Sejahtera) Mimika yang menjadi payung besar pembangunan daerah. Dalam kerangka ini pendidikan diposisikan sebagai pilar utama pengungkit pembangunan manusia dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui GDPP arah kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi GERBANG EMAS, yaitu membangun masyarakat Mimika yang cerdas, sehat, produktif dan berdaya saing global.

Keterpaduan antara GDPP dan GERBANG EMAS memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kapasitas SDM lokal sebagai pelaku utama pembangunan berkelanjutan.

Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika berperan sebagai dokumen turunan yang memperkuat dan mengoperasionalkan visi pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, diselaraskan secara periodik melalui RPJMD, diintegrasikan dengan kebijakan kependudukan dalam GDPK, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda strategis GERBANG EMAS. Keterpaduan keempat dokumen ini menciptakan satu kesatuan arah pembangunan yang sistematis, sinergis dan berkelanjutan dalam mewujudkan Generasi Emas Mimika 2045 yang unggul, berkarakter dan berdaya saing tinggi.

Gambar 1.2 Hubungan GDPP dengan RPJPD, RPJMD, GDPK dan GERBANG EMAS Mimika

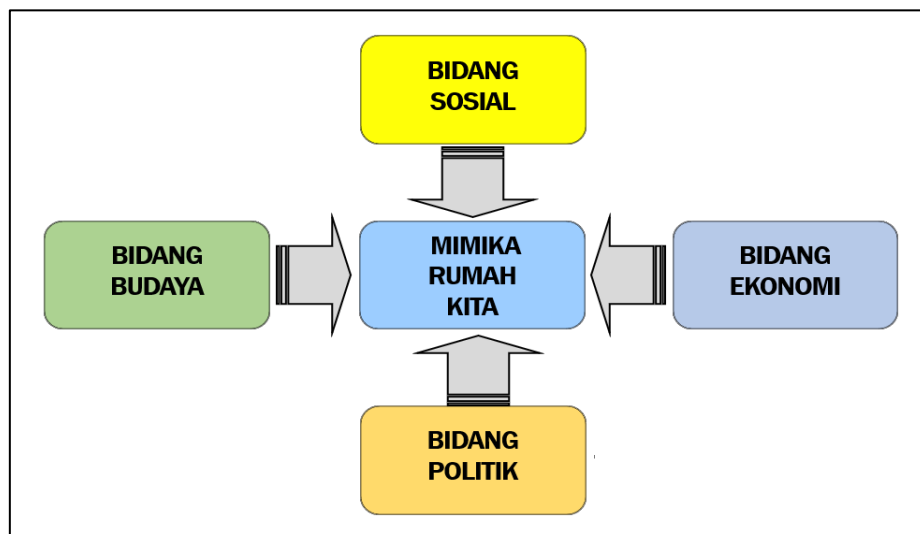


Sumber: Disain Tim PSK, 2025

Berpijak pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika yaitu “Membangun dari kampung ke kota, membangun kampung rasa kota” dengan *tagline* "Mimika Rumah Kita", maka GDPP menempatkan pendidikan sebagai poros utama transformasi pembangunan SDM secara komprehensif.

Pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai layanan dasar, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi-budaya-politik yang mampu mengangkat kualitas hidup SDM Mimika secara berkelanjutan sehingga memiliki kompetensi, keterampilan dan pola pikir modern tanpa kehilangan identitas kearifan lokal.

Gambar 1.3  
Integratif Pembangunan Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik dalam Mimika Rumah Kita



Sumber: Desain Tim PSK, 2025

Melalui pendekatan ini, layanan satuan pendidikan di kampung diarahkan menjadi pusat belajar dan pusat pemberdayaan masyarakat yang menghadirkan layanan layak kota baik dari sisi kualitas tenaga pendidik, fasilitas, kurikulum kontekstual, maupun akses teknologi sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi wujud nyata transformasi kampung menuju kampung yang maju, modern, berdaya saing, namun tetap berakar pada budaya kabupaten Mimika.

## H. Ruang lingkup dan pendekatan

### 1. Ruang Lingkup

Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 mencakup keseluruhan aspek strategis penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ruang lingkup pembangunan pendidikan ini meliputi:

- a. Penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan jangka panjang, sebagai pedoman lintas sektor dan lintas program di tingkat kabupaten
- b. Pemetaan kondisi aktual sistem pendidikan mencakup ketersediaan dan mutu layanan, sarana-prasarana, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta capaian indikator pembangunan manusia
- c. Perumusan prioritas pembangunan pendidikan daerah yang berfokus pada peningkatan akses, mutu, relevansi, tata kelola, serta pembiayaan pendidikan
- d. Integrasi pendidikan dengan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya lokal, agar sistem pendidikan berperan sebagai penggerak utama pemberdayaan masyarakat
- e. Pengembangan model pendidikan berbasis konteks lokal dan kearifan budaya masyarakat Mimika yang memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung daya saing global
- f. Penguatan tata kelola pendidikan daerah, melalui koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas adat, agama, dunia usaha, LSM dan mitra pembangunan.

Dengan ruang lingkup tersebut, grand design ini menjadi acuan strategis bagi seluruh pihak dalam merancang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, inklusif serta berkeadilan.

## **2. Pendekatan**

Penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan yang partisipatif, berbasis data dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial-budaya, serta dinamika pembangunan wilayah. Pendekatan ini mencakup:

- a. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat
- b. Pendekatan berbasis data dan bukti melalui pengumpulan, analisis dan pemanfaatan data pendidikan yang valid, terukur dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan
- c. Pendekatan kewilayahan yang memperhatikan karakteristik wilayah kabupaten Mimika, baik pesisir, dataran dan pegunungan untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan
- d. Pendekatan ekosistem pendidikan yang memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terkait antara pemerintah, keluarga, komunitas adat, lembaga agama dan dunia usaha.
- e. Pendekatan berbasis budaya lokal yang menempatkan nilai, tradisi dan kearifan masyarakat kabupaten Mimika sebagai landasan moral dan sosial dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran serta penguatan karakter peserta didik.
- f. Pendekatan berkelanjutan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pendidikan dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman, teknologi dan kebutuhan pembangunan daerah jangka panjang.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN

### A. Profil Daerah dan Demografi

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah strategis di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan luas wilayah mencapai  $\pm 21.693$  km<sup>2</sup>. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, meliputi daerah pesisir, dataran rendah dan pegunungan. Kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan dasar, terutama pendidikan, karena keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur antar wilayah.

Secara administrative, Kabupaten Mimika terdiri atas 18 distrik dengan sebaran permukiman yang tidak merata. Wilayah perkotaan, terutama Distrik Mimika Baru, Wania dan Kuala Kencana, berperan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik dan konsentrasi permukiman penduduk. Sementara itu, wilayah pedalaman seperti Distrik Agimuga, Hoya dan Alama masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Persebaran dan Sex Ratio Tahun 2025

No	Distrik	Jumlah Penduduk		Jumlah	%	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Agimuga	736	623	1.359	0,42	118,14
2.	Amar	1.364	1.259	2.623	0,82	108,34
3.	Alama	1.476	1.289	2.765	0,86	114,51
4.	Hoya	792	775	1.567	0,49	102,19
5.	Iwaka	5.815	5.438	11.253	3,51	106,93
6.	Jila	1.095	984	2.079	0,65	111,28
7.	Jita	1.141	1.051	2.192	0,68	108,56
8.	Kuala Kencana	16.768	15.154	31.922	9,95	110,65
9.	Kwamki Narama	7.156	6.812	13.968	4,35	105,05
10.	Mimika Barat	1.520	1.372	2.892	0,90	110,79
11.	Mimika Barat Jauh	1.460	1.316	2.776	0,87	110,94
12.	Mimika Barat Tengah	1.768	1.597	3.365	1,05	110,71
13.	Mimika Baru	77.316	68.295	145.611	45,38	113,21
14.	Mimika Tengah	2.748	2.545	5.293	1,65	107,98
15.	Mimika Timur	6.138	5.631	11.769	3,67	109,00
16.	Mimika Timur Jauh	2.241	2.111	4.352	1,36	106,16
17.	Tembagapura	5.181	5.053	10.234	3,19	102,53
18.	Wania	34.078	30.741	64.819	20,20	110,86
	Jumlah	168.793	152.046	320.839	100	111,01

Sumber: Disdukcapil Mimika, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2025 tercatat sebanyak 320.839 jiwa, yang terdiri atas 168.793 laki-laki dan 152.046 perempuan, dengan sex rasio sebesar 111,01. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, yaitu sekitar 111 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kondisi ini juga mencerminkan karakteristik demografi Mimika sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis industri, pertambangan dan jasa, yang relatif lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.

Dari aspek persebaran penduduk, konsentrasi terbesar berada di Distrik Mimika Baru dengan jumlah penduduk (45,38%), disusul Distrik Wania (20,20%) dan Distrik Kuala Kencana (9,95%). Ketiga distrik ini secara kumulatif menampung lebih dari 75% total penduduk Kabupaten Mimika, yang menandakan adanya pemusatan penduduk di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu distrik-distrik di wilayah pedalaman dan pesisir barat seperti distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita memiliki jumlah penduduk relatif kecil dengan persentase di bawah 1%, mencerminkan tantangan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur serta kondisi geografis.

Ditinjau dari sex rasio antar distrik, hampir seluruh wilayah menunjukkan dominasi penduduk laki-laki. Sex rasio tertinggi tercatat di Distrik Agimuga (118,14) dan Alama (114,51), sedangkan yang paling mendekati seimbang adalah Distrik Hoya (102,19) dan Tembagapura (102,53). Pola ini mengindikasikan variasi karakter sosial-ekonomi dan migrasi penduduk, di mana distrik dengan aktivitas ekonomi formal dan sektor ekstraktif cenderung memiliki sex rasio lebih tinggi. Fakta ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kependudukan, perencanaan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta strategi penguatan peran perempuan dan keluarga di wilayah dengan ketimpangan struktur penduduk yang cukup signifikan.

Secara khusus terkait capaian pembangunan pendidikan, analisis parameter pendidikan berdasarkan angka melek huruf menunjukkan bahwa di kabupaten Mimika Tahun 2025 mencapai 98,96%, sementara penduduk yang belum melek huruf hanya 1,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi dasar masyarakat Mimika tergolong sangat tinggi,

sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar, program keaksaraan, serta perluasan akses layanan pendidikan formal dan nonformal di wilayah ini.

Tabel 2.2 Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2025

Indikator	Angka Melek Huruf	Belum Melek Huruf
AMH	98,96	1,04

Sumber: BPS Mimika, 2025

Meskipun demikian keberadaan kelompok kecil penduduk yang belum melek huruf tetap menjadi perhatian penting dalam konteks pemerataan pembangunan pendidikan. Kelompok ini umumnya berpotensi berasal dari wilayah terpencil, komunitas adat, kelompok usia lanjut, serta masyarakat dengan keterbatasan akses geografis dan sosial-ekonomi. Untuk itu data ini menegaskan perlunya intervensi pendidikan yang lebih bersifat afirmatif, kontekstual dan berbasis komunitas, seperti penguatan pendidikan keaksaraan fungsional, layanan pendidikan nonformal, serta pendekatan budaya dan bahasa lokal, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan hak dasar pendidikan.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2025

Indikator	PAUD	SD	SMP	SMA/SMK
APK	76,52	77,06	97,83	41,63

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

Analisis terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mimika Tahun 2025 berdasarkan Tabel 2.3, menunjukkan variasi yang cukup tajam antar jenjang pendidikan, APK PAUD (76,52%) dan SD (77,06%) mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan usia dini dan dasar sudah relatif baik, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok usia sasaran. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan layanan PAUD di wilayah terpencil, kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan usia dini, serta kendala akses dan sosial-ekonomi.

Pada jenjang SMP, APK 97,83% menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan kebijakan wajib belajar serta

relatif kuatnya transisi lulusan SD ke SMP. Capaian ini menandakan bahwa akses, daya tampung dan minat melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah pertama di kabupaten Mimika sudah berjalan cukup efektif, termasuk di wilayah perkotaan maupun sebagian wilayah distrik.

Sebaliknya pada jenjang SMA/SMK, APK hanya mencapai 41,63% memperlihatkan penurunan partisipasi yang signifikan. Rendahnya APK di jenjang menengah atas mengindikasikan masih kuatnya hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan jumlah sekolah lanjutan, jarak dan biaya pendidikan, tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak usia sekolah untuk bekerja, serta rendahnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan kerja lokal. Fakta ini menegaskan perlunya strategi afirmatif dan terintegrasi, antara lain penguatan akses SMA/SMK di distrik, beasiswa berkelanjutan, pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan komunitas adat untuk menahan laju putus sekolah dan meningkatkan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2025

Indikator	SD	SMP	SMA/SMK
APM	61,66	56,58	18,50

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mimika Tahun 2025 berdasarkan Tabel 2.4, menunjukkan kecenderungan menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. APM SD sebesar 61,66% mengindikasikan bahwa baru sekitar dua pertiga anak usia sekolah dasar yang bersekolah tepat pada jenjang dan usia semestinya. Kondisi ini mencerminkan masih adanya keterlambatan masuk sekolah, pengulangan kelas, atau anak usia SD yang belum terlayani pendidikan formal secara optimal, terutama di wilayah terpencil dan komunitas dengan keterbatasan akses layanan pendidikan.

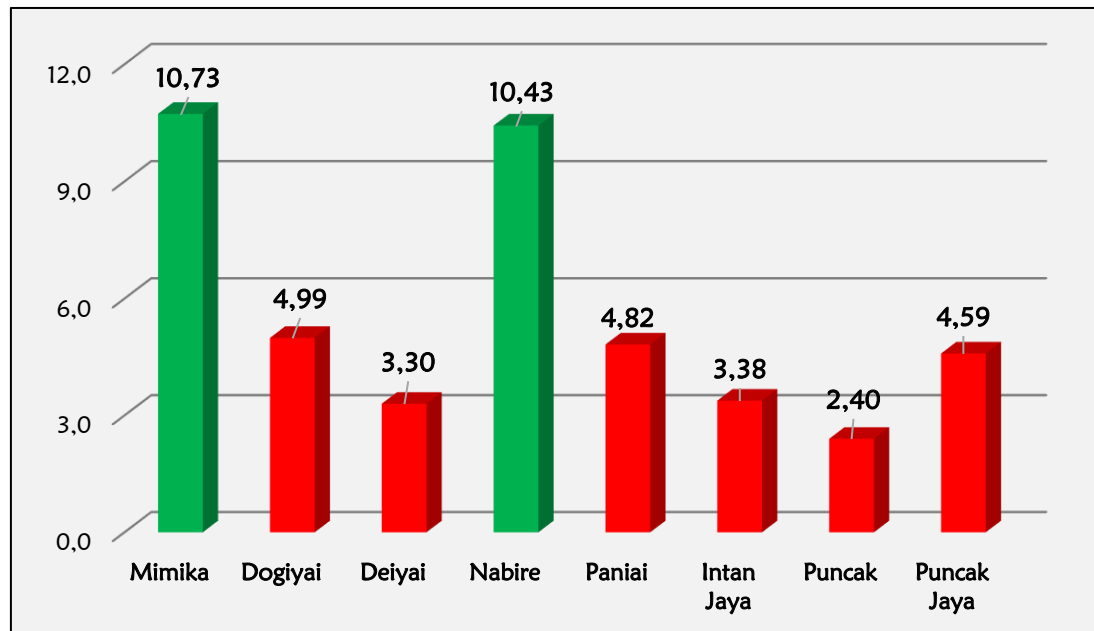
Pada jenjang SMP, APM tercatat 56,58% yang menandakan terjadinya penurunan keberlanjutan pendidikan dari jenjang dasar ke menengah pertama. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian anak usia SMP belum bersekolah pada jenjang yang sesuai, baik karena putus sekolah, terlambat

melanjutkan pendidikan, maupun masih berada di jenjang SD. Faktor geografis, ekonomi keluarga, keterbatasan sarana pendidikan lanjutan, serta dinamika sosial-budaya menjadi determinan utama rendahnya APM pada jenjang ini.

Penurunan paling tajam terjadi pada jenjang SMA/SMK dengan APM hanya 18,50% yang menunjukkan bahwa sebagian besar remaja usia sekolah menengah atas tidak bersekolah pada jenjang yang semestinya. Temuan ini mengindikasikan persoalan serius dalam kesinambungan pendidikan, khususnya transisi dari SMP ke SMA/SMK. Rendahnya APM SMA/SMK menegaskan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih kuat, seperti perluasan akses sekolah menengah atas di distrik, penguatan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, dukungan pembiayaan dan beasiswa, serta pendekatan kontekstual yang melibatkan keluarga, komunitas adat dan dunia kerja agar pendidikan menengah menjadi lebih inklusif, relevan dan berkelanjutan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 2.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025



Sumber: BPS Papua, 2025

Analisis Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mimika Tahun 2025 tercatat sebesar 10,73 tahun, menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Mimika telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan

bahkan melampauinya hingga jenjang pendidikan menengah. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pembangunan pendidikan, khususnya dalam memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah pertama di wilayah ini.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, RLS Mimika yang tertinggi menegaskan posisi strategis Mimika sebagai daerah dengan tingkat capaian pendidikan relatif lebih baik. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan infrastruktur pendidikan, konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, serta aktivitas ekonomi yang mendorong permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan. RLS yang tinggi juga mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang telah mengenyam pendidikan hingga SMA/SMK, meskipun belum merata di seluruh distrik.

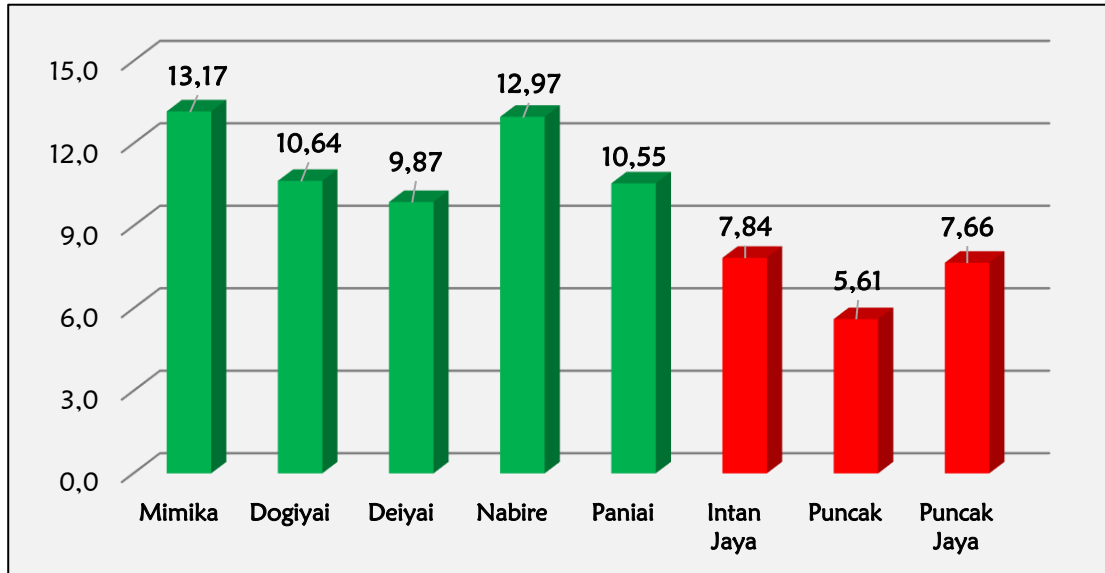
Namun demikian capaian RLS 10,73 tahun masih menyisakan tantangan dalam aspek pemerataan dan kualitas pendidikan. Ketimpangan antar wilayah, rendahnya partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK, serta keterbatasan akses di distrik terpencil menunjukkan bahwa peningkatan RLS belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan kebijakan lanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan transisi dan keberlanjutan pendidikan menengah, penguatan layanan pendidikan di wilayah pinggiran, serta strategi afirmatif berbasis komunitas agar capaian pendidikan yang relatif tinggi ini dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Analisis terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mimika Tahun 2025 tercatat sebesar 13,17 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah di Mimika secara rata-rata diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga setara kelas I SMA/SMK. Capaian ini mencerminkan optimisme dan potensi sistem pendidikan daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih panjang, melampaui batas wajib belajar sembilan tahun.

Nilai HLS yang relatif tinggi ini mengindikasikan semakin membaiknya ketersediaan layanan pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan pendidikan. Secara normatif HLS 13,17 tahun

menunjukkan bahwa struktur dan kapasitas sistem pendidikan di Mimika telah mengarah pada pemenuhan pendidikan menengah sebagai standar minimum baru dalam pembangunan sumber daya manusia.

Grafik 2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025



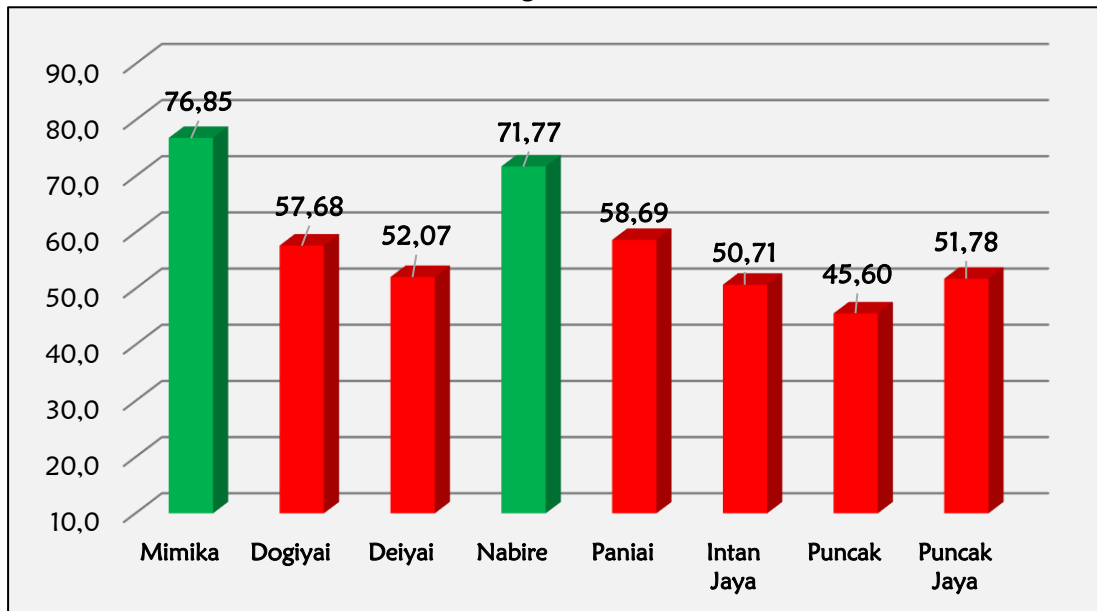
Sumber: BPS Papua, 2025

Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,73 tahun, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realisasi pendidikan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan pada fase transisi dan keberlanjutan pendidikan, terutama pada jenjang SMA/SMK, seperti keterbatasan akses sekolah lanjutan, faktor ekonomi keluarga, serta rendahnya angka partisipasi murni di pendidikan menengah. Untuk itu HLS yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan intervensi konkret agar harapan pendidikan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

Ukuran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika secara umum tercermin melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas hidup penduduk dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam konteks pendidikan, IPM sangat ditentukan oleh dua indikator kunci, yakni Rata-Rata Lama Sekolah

(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk serta peluang akses pendidikan di masa depan.

Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025



Sumber: BPS Papua, 20205

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Mimika tercatat sebesar **76,85**, menempatkan Mimika dalam kategori IPM tertinggi di Provinsi Papua Tengah. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pendidikan. Peningkatan RLS dan HLS mengindikasikan bahwa secara agregat masyarakat Mimika telah menikmati layanan pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi lama waktu bersekolah maupun ekspektasi keberlanjutan pendidikan generasi muda.

Meskipun demikian, capaian positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keseimbangan pada indikator-indikator partisipasi pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) masih menunjukkan adanya ketimpangan, baik antar jenjang pendidikan maupun antar wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian kuantitatif pendidikan sebagaimana tercermin dalam RLS

dan HLS belum sepenuhnya dibarengi oleh pemerataan akses, kesinambungan partisipasi dan mutu proses pembelajaran.

Ketidakseimbangan tersebut juga mencerminkan adanya tantangan struktural dalam sistem pendidikan daerah, seperti disparitas akses pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan, perkotaan dan pedalaman, keterbatasan kualitas dan distribusi tenaga pendidik, serta faktor sosial-ekonomi keluarga yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah anak. Pada kondisi tertentu, capaian partisipasi yang relatif tinggi belum selalu berbanding lurus dengan kualitas hasil belajar, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara indikator kuantitas pendidikan dan mutu pembelajaran yang sesungguhnya.

Untuk itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika ke depan perlu diarahkan pada upaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Diperlukan sebuah peta jalan (*roadmap*) pembangunan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada penguatan kualitas layanan, relevansi pembelajaran, serta keberlanjutan pendidikan peserta didik hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian kemajuan kuantitatif yang telah dicapai dapat diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan secara konsisten, sehingga kontribusi sektor pendidikan terhadap IPM benar-benar mencerminkan pembangunan SDM Mimika yang inklusif, adil dan berdaya saing dalam jangka panjang.

## **B. Kondisi Situasi Penyelenggaraan Pendidikan**

Sistem pendidikan di Kabupaten Mimika meliputi layanan pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal terdiri atas jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi, sedangkan pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga keagamaan dan komunitas lokal.

Sebagian besar satuan pendidikan berada di wilayah perkotaan, sedangkan di daerah pinggiran dan pedalaman pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan, akses terhadap sekolah masih terbatas. Disparitas ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di kabupaten Mimika masih memerlukan penguatan

tata kelola dan pemerataan layanan. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, komunitas adat dan dunia usaha perlu diperkuat agar sistem pendidikan mampu menjangkau seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali.

## **1. Peserta Didik**

### **a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK)**

#### **1) Jumlah peserta didik**

Pada tahun 2025, jumlah peserta didik PAUD/TK di Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 5.337 anak yang tersebar di 104 kampung dari total 142 kampung/kelurahan. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan PAUD/TK telah menjangkau sebagian besar wilayah administrasi, namun secara substantif masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan akses. Sebaran peserta didik memperlihatkan bahwa tidak seluruh kampung memiliki layanan PAUD/TK yang aktif dan terdata, terutama pada wilayah yang secara geografis berada di kawasan pedalaman, pesisir terpencil dan pegunungan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar.

Distribusi peserta didik PAUD/TK di Kabupaten Mimika menunjukkan pola konsentrasi yang sangat kuat di wilayah perkotaan, khususnya di Distrik Wania dan Mimika Baru, yang secara kumulatif menampung lebih dari 65 persen total peserta didik PAUD/TK. Tingginya konsentrasi ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi, ketersediaan lembaga PAUD/TK yang relatif lebih memadai, dukungan sarana prasarana pendidikan, serta akses transportasi dan komunikasi yang lebih baik. Selain itu tingkat literasi dan kesadaran masyarakat perkotaan terhadap pentingnya PAUD cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Di sisi lain, sejumlah distrik menunjukkan tingkat partisipasi PAUD/TK yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan PAUD formal, baik akibat minimnya jumlah lembaga PAUD maupun terbatasnya tenaga pendidik yang tersedia. Pada wilayah-wilayah tersebut, pola pengasuhan anak masih

banyak bertumpu pada keluarga inti dan komunitas adat yang meskipun memiliki nilai kultural yang kuat, belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan pendidikan usia dini yang terstruktur dan berkelanjutan.

Fakta yang paling menonjol dalam sebaran layanan PAUD/TK Kabupaten Mimika adanya empat distrik (Mimika Barat Tengah, Jila, Hoya dan Alama) yang pada tahun 2025 tidak mencatat keberadaan peserta didik PAUD/TK. Kondisi ini mengindikasikan belum tersedianya layanan PAUD/TK formal atau adanya layanan yang belum terintegrasi ke dalam sistem pendataan pendidikan daerah. Situasi tersebut mencerminkan terjadinya eksklusi layanan PAUD pada wilayah tertentu, yang berpotensi berdampak pada rendahnya kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar serta memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah di Kabupaten Mimika sebagaimana tergambar dalam data pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Peserta Didik PAUD/TK Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah Peserta Didik	Persentase Jumlah peserta
1.	Mimika Baru	14	1.663	31,16
2.	Wania	7	1.812	33,95
3.	Kuala Kencana	10	649	12,16
4.	Mimika Timur	6	258	4,83
5.	Iwaka	7	244	4,57
6.	Mimika Tengah	5	116	2,17
7.	Mimika Timur Jauh	5	123	2,30
8.	Mimika Barat Tengah	9	0	0
9.	Mimika Barat	7	80	1,50
10.	Kwamki Narama	10	56	1,05
11.	Tembagapura	14	44	0,82
12.	Mimika Barat Jauh	5	77	1,44
13.	Amar	6	129	2,42
14.	Jita	10	46	0,68
15.	Agimuga	8	40	0,75
16.	Jila	12	0	0
17.	Hoya	6	0	0
18.	Alama	11	0	0
	Jumlah	<b>142</b>	<b>5.337</b>	100

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Fakta data tabel 2.5 menunjukkan ketimpangan distribusi peserta didik PAUD/TK antar distrik bahwa akses pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mimika masih belum berkeadilan wilayah. Konsentrasi layanan di kawasan perkotaan berimplikasi pada perbedaan kesiapan belajar anak antar wilayah, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dasar, menengah hingga kualitas sumber daya manusia. Tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan layanan PAUD/TK yang kontekstual, adaptif terhadap kondisi geografis, serta berbasis komunitas dan kearifan lokal, guna menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini secara adil dan inklusif di seluruh wilayah kabupaten.

## **2) Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik PAUD/TK**

Pada tahun 2025 PAUD/TK di Kabupaten Mimika dilayani 298 tenaga pendidik (9 laki-laki dan 289 perempuan) bagi 5.337 peserta didik. Komposisi ini menunjukkan dominasi pendidik perempuan yang sejalan karakteristik PAUD secara nasional. Secara agregat ketersediaan tenaga relatif mencukupi, namun distribusinya antar distrik masih belum merata menimbulkan ketimpangan rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik.

Rasio di distrik Mimika Baru, Wania dan Kuala Kencana relatif seimbang (1:18) yang mencerminkan kondisi layanan PAUD/TK lebih ideal. Keseimbangan ini didukung ketersediaan lembaga PAUD/TK yang lebih banyak, akses terhadap tenaga pendidik yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini.

Sebaliknya beberapa distrik (Mimika Timur Jauh, Mimika Barat dan Mimika Timur) memiliki rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik yang relatif tinggi (rata-rata 1:30). Kondisi ini mengindikasikan tingginya beban kerja pendidik akibat keterbatasan jumlah tenaga pendidik dibandingkan jumlah peserta didik yang dilayani berpotensi mempengaruhi kualitas layanan pembelajaran, khususnya pada pendekatan individual dan pendampingan perkembangan anak.

Di sisi lain Distrik Tembagapura menunjukkan rasio yang sangat rendah (1:4). Rasio ini tidak semata-mata mencerminkan kelebihan tenaga pendidik, melainkan lebih dipengaruhi oleh rendahnya jumlah peserta didik akibat keterbatasan akses, kecilnya sebaran penduduk, serta faktor geografis dan sosial yang mempengaruhi partisipasi PAUD/TK.

Selain itu terdapat empat distrik (Mimika Barat Tengah, Jila, Hoya dan Alama) tidak memiliki tenaga pendidik maupun peserta didik PAUD/TK. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan PAUD/TK formal belum tersedia atau sebaliknya belum terintegrasi dalam sistem pendataan pendidikan daerah, sekaligus menegaskan masih kuatnya tantangan struktural dalam pemerataan SDM pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan Mimika.

Rasio tenaga pendidik dan peserta didik di kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik PAUD/TK Tahun 2025

No.	Distrik	Tenaga Pendidik			Peserta Didik			Rasio Tendik P Didik
		L	P	Σ	L	P	Σ	
1.	Mimika Baru	2	93	95	865	798	1.663	1:18
2.	Wania	1	99	100	946	866	1.812	1:18
3.	Kuala Kencana	1	36	37	329	320	649	1:18
4.	Mimika Timur	0	9	9	124	134	258	1:29
5.	Iwaka	0	12	12	113	131	244	1:20
6.	Tembagapura	2	8	10	21	23	44	1:4
7.	Mimika Barat Tengah	0	0	0	0	0	0	0
8.	Mimika Tengah	0	9	9	57	59	116	1:13
9.	Kwamki Narama	0	5	5	22	34	56	1:11
10.	Mimika Barat	0	2	2	50	30	80	1:40
11.	Mimika Timur Jauh	0	4	4	75	48	123	1:31
12.	Jita	2	0	2	22	24	46	1:23
13.	Mimika Barat Jauh	0	4	4	33	44	77	1:19
14.	Agimuga	1	2	3	21	19	40	1:13
15.	Amar	0	6	6	58	71	129	1:22
16.	Jila	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hoya	0	0	0	0	0	0	0
18.	Alama	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	289	298	2.736	2.601	5.337	1:18

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Secara keseluruhan, data Tabel 2.6 menunjukkan bahwa meskipun secara agregat ketersediaan tenaga pendidik PAUD/TK di Kabupaten Mimika relatif mencukupi, distribusinya masih belum merata antar distrik. Ketimpangan rasio tenaga pendidik dan peserta didik berimplikasi langsung pada kualitas layanan PAUD/TK dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Untuk itu diperlukan kebijakan afirmatif dalam penataan dan distribusi tenaga pendidik PAUD/TK yang lebih berkeadilan wilayah, disertai pengembangan model layanan kontekstual dan berbasis komunitas guna menjamin kualitas PAUD secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

## **b. Sekolah Dasar (SD)**

### **1) Jumlah peserta didik**

Pada Tahun 2025 jumlah peserta didik SD di Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 36.588 siswa yang tersebar di 18 distrik dan 142 kelurahan/kampung. Sebaran peserta didik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah yang cukup signifikan, terutama antara distrik-distrik perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan distrik pedalaman di wilayah pesisir dan pegunungan yang memiliki keterbatasan akses layanan pendidikan dasar.

Konsentrasi peserta didik terbesar berada di wilayah perkotaan, khususnya Distrik Mimika Baru (36,01%), Distrik Wania (27,18%), dan Distrik Kuala Kencana (8,69%). Secara kumulatif, ketiga distrik ini menampung 71,88% dari total peserta didik SD di Kabupaten Mimika. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk usia sekolah di kawasan perkotaan, dukungan infrastruktur pendidikan yang relatif lebih baik, serta kuatnya arus migrasi penduduk menuju pusat ekonomi dan pemerintahan.

Sementara itu distrik-distrik dengan proporsi peserta didik menengah (2-5 persen), meliputi Distrik Mimika Timur, Iwaka, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat Tengah, Tembagapura, Mimika Barat Jauh dan Kwamki Narama. Wilayah-wilayah ini berperan sebagai zona transisi antara kawasan urban dan pedalaman. Secara

geografis, distrik-distrik tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan aksesibilitas, jarak antar kampung yang berjauhan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang belum merata.

Di sisi lain sejumlah distrik memiliki jumlah peserta didik yang relatif rendah (di bawah 2 persen) meliputi Mimika Barat, Amar, Jita, Agimuga, Jila, Hoya dan Alama. Rendahnya jumlah peserta didik di wilayah ini dipengaruhi kepadatan penduduk yang rendah, kondisi geografis yang ekstrem seperti wilayah pegunungan, pesisir dan daerah terpencil, keterbatasan akses transportasi dan layanan dasar, serta potensi tingginya mobilitas penduduk usia sekolah dan risiko putus sekolah.

Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Mimika tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Peserta Didik SD  
Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah peserta didik	Persentase Jumlah peserta didik
1.	Mimika Baru	14	13.174	36,01
2.	Wania	7	9.944	27,18
3.	Kuala Kencana	10	3.181	8,69
4.	Mimika Timur	6	1.647	4,50
5.	Iwaka	7	1.216	3,32
6.	Mimika Tengah	5	1.149	3,14
7.	Mimika Timur Jauh	5	813	2,22
8.	Mimika Barat Tengah	9	796	2,10
9.	Mimika Barat	7	573	1,57
10.	Kwamki Narama	10	712	1,95
11.	Tembagapura	14	812	2,22
12.	Mimika Barat Jauh	5	720	1,97
13.	Amar	6	466	1,27
14.	Jita	10	429	1,17
15.	Agimuga	8	399	1,09
16.	Jila	12	334	0,91
17.	Hoya	6	165	0,45
18.	Alama	11	58	0,16
	Jumlah	<b>142</b>	<b>36.588</b>	<b>100</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Ditinjau dari rasio peserta didik per kampung, dengan total 36.588 siswa yang tersebar di 142 kampung/kelurahan, rata-rata terdapat sekitar

258 peserta didik per kampung. Namun demikian, kondisi riil di lapangan menunjukkan ketimpangan yang cukup lebar, di mana distrik perkotaan memiliki rasio peserta didik per kampung jauh di atas rata-rata, sedangkan distrik pedalaman memiliki jumlah kampung yang relatif banyak dengan jumlah peserta didik yang sangat terbatas. Situasi ini berimplikasi pada inefisiensi penyelenggaraan sekolah dasar dengan pola konvensional dan menuntut pendekatan layanan pendidikan lebih adaptif dan kontekstual.

## **2) Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SD**

Pada Tahun 2025 penyelenggaraan pendidikan SD di Kabupaten Mimika didukung 1.830 tenaga pendidik, terdiri dari 429 guru laki-laki dan 1.401 guru Perempuan melayani 36.588 peserta didik. Secara agregat rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik berada pada 1:20, secara umum masih sesuai dengan standar nasional rasio guru SD. Namun demikian distribusi tenaga pendidik antar distrik menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan.

Distrik-distrik dengan jumlah peserta didik besar, khususnya Mimika Baru dan Wania, memiliki rasio yang relatif ideal masing-masing sebesar 1:20. Kondisi ini mencerminkan ketersediaan tenaga pendidik yang cukup seimbang dengan jumlah peserta didik, sejalan dengan tingginya konsentrasi penduduk dan relatif baiknya akses terhadap fasilitas pendidikan serta penempatan guru. Distrik Kuala Kencana juga menunjukkan rasio yang relatif baik (1:19), mengindikasikan efektivitas pengelolaan tenaga pendidik di kawasan permukiman terencana.

Sebaliknya, beberapa distrik menunjukkan rasio tenaga pendidik yang kurang ideal akibat jumlah guru yang terbatas dibandingkan dengan jumlah peserta didik seperti di Distrik Mimika Tengah (1:27), Mimika Timur Jauh (1:23), bahkan di Mimika Barat Jauh cukup tinggi (1:34). Rasio yang tinggi ini berimplikasi pada meningkatnya beban kerja guru, potensi menurunnya kualitas layanan pembelajaran, serta terbatasnya perhatian individual kepada peserta didik, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas yang rendah.

Kondisi paling ekstrem terlihat di Distrik Amar, dengan rasio 1:52, yang menunjukkan ketimpangan serius antara jumlah tenaga pendidik dan peserta didik. Situasi ini berpotensi menghambat proses pembelajaran secara optimal dan meningkatkan risiko rendahnya capaian belajar peserta didik. Distrik Jila dan Mimika Tengah juga menunjukkan rasio tinggi, masing-masing 1:26 dan 1:27, yang memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan redistribusi tenaga pendidik.

Di sisi lain beberapa distrik justru memiliki rasio tenaga pendidik yang relatif rendah, seperti Alama (1:12), Tembagapura (1:15), Jita (1:15), dan Iwaka (1:16). Rasio ini menunjukkan ketersediaan guru yang relatif lebih baik dibandingkan jumlah peserta didik. Namun demikian, rendahnya rasio tersebut tidak selalu mencerminkan efisiensi, karena dapat dipengaruhi umlah peserta didik yang sangat sedikit, sebaran kampung berjauhan, serta kebutuhan pembelajaran multigrade di wilayah terpencil.

Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SD di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SD Tahun 2025

No.	Distrik	Tenaga Pendidik			Peserta Didik			Rasio Tendik & P. Didik
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Mimika Baru	97	556	653	6.801	6.373	1.3174	1:20
2.	Wania	95	411	506	5.149	4.795	9.944	1:20
3.	Kuala Kencana	35	135	170	1.629	1.552	3.181	1:19
4.	Mimika Timur	20	58	78	881	766	1.647	1:21
5.	Iwaka	23	51	74	628	588	1.216	1:16
6.	Tembagapura	39	16	55	438	374	812	1:15
7.	Mimika Barat Tengah	21	25	46	407	389	796	1:17
8.	Mimika Tengah	20	23	43	602	547	1.149	1:27
9.	Kwamki Narama	9	26	35	375	337	712	1:20
10.	Mimika Barat	5	22	27	317	256	573	1:21
11.	Mimika Timur Jauh	12	24	36	412	401	813	1:23
12.	Jita	9	20	29	206	223	429	1:15
13.	Mimika Barat Jauh	11	10	21	368	352	720	1:34
14.	Agimuga	10	12	22	199	200	399	1:18
15.	Amar	3	6	9	250	216	466	1:52
16.	Jila	9	4	13	196	138	334	1:26
17.	Hoya	6	2	8	99	66	165	1:21
18.	Alama	5	0	5	41	17	58	1:12
	Jumlah	<b>429</b>	<b>1.401</b>	<b>1.830</b>	<b>18.998</b>	<b>17.590</b>	<b>36.588</b>	<b>1:20</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Secara keseluruhan, analisis data tabel 2.8 menunjukkan bahwa tantangan utama penyelenggaraan pendidikan SD di Kabupaten Mimika bukan terletak pada jumlah total tenaga pendidik, melainkan pada ketidakseimbangan distribusi guru antar distrik. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan penataan dan redistribusi tenaga pendidik yang berbasis pada rasio peserta didik, tingkat keterpencilan wilayah, serta kebutuhan pembelajaran kontekstual, guna menjamin pemerataan mutu pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

### c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

#### 1) Jumlah peserta didik

Pada Tahun 2025 jumlah peserta didik SMP di Kabupaten Mimika sebanyak 14.058 siswa tersebar di 16 distrik dan 142 kelurahan/kampung. Sebaran peserta didik SMP menunjukkan ketimpangan yang lebih tajam dibandingkan jenjang SD, dengan konsentrasi yang sangat kuat di distrik perkotaan dan penurunan drastis di wilayah pedalaman.

Distrik Mimika Baru menjadi pusat utama pendidikan SMP dengan jumlah peserta didik terbanyak (45,79%) dari total peserta didik SMP Kabupaten Mimika. Dominasi ini mencerminkan peran Mimika Baru sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan layanan pendidikan menengah pertama, sekaligus menunjukkan kuatnya arus melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di wilayah perkotaan. Selain itu Distrik Kuala Kencana menempati posisi kedua (11,14%), disusul Mimika Timur (5,23%). Ketiga distrik ini secara kumulatif menampung **62%** peserta didik SMP di Mimika.

Sebaliknya Distrik Wania hanya 2,67%, meskipun pada jenjang SD merupakan salah satu distrik dengan jumlah peserta didik terbesar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan perpindahan peserta didik ke distrik lain, khususnya Mimika Baru untuk melanjutkan pendidikan SMP, atau keterbatasan daya tampung dan pilihan satuan pendidikan SMP di wilayah tersebut.

Distrik-distrik lain menunjukkan jumlah peserta didik SMP yang relatif rendah, dengan proporsi di bawah 2% antara lain Iwaka, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat Tengah, Kwamki Narama,

Mimika Barat Jauh, Amar, Jita, Agimuga dan Jila. Rendahnya angka partisipasi SMP di wilayah-wilayah ini mencerminkan berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan jumlah sekolah SMP, jarak tempuh yang jauh antar kampung, kondisi geografis yang sulit, serta meningkatnya risiko putus sekolah pada masa transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama.

Kondisi yang paling memprihatinkan terlihat di Distrik Hoya dan Alama, yang tidak memiliki peserta didik SMP sama sekali. Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan layanan pendidikan SMP atau sangat terbatasnya akses peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di kedua distrik tersebut. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan capaian pendidikan dan kualitas sumber daya manusia antar wilayah di Kabupaten Mimika.

Jumlah peserta didik SMP di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Jumlah Peserta Didik SMP  
Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah peserta didik	Persentase Jumlah peserta didik
1.	Mimika Baru	14	6.437	45,79
2.	Wania	7	375	2,67
3.	Kuala Kencana	10	1.566	11,14
4.	Mimika Timur	6	735	5,23
5.	Iwaka	7	285	1,84
6.	Mimika Tengah	5	110	0,78
7.	Mimika Timur Jauh	5	127	0,90
8.	Mimika Barat Tengah	9	137	0,97
9.	Mimika Barat	7	302	2,15
10.	Kwamki Narama	10	107	0,76
11.	Tembagapura	14	140	0,10
12.	Mimika Barat Jauh	5	146	1,04
13.	Amar	6	63	0,45
14.	Jita	10	37	0,26
15.	Agimuga	8	48	0,34
16.	Jila	12	68	0,48
17.	Hoya	6	0	0
18.	Alama	11	0	0
	Jumlah	<b>142</b>	<b>14.058</b>	100

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Secara umum, data tabel 2.9 menunjukkan ketimpangan sebaran peserta didik SMP yang sangat nyata antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran. Konsentrasi peserta didik yang tinggi di kawasan perkotaan berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi di wilayah pedalaman, bahkan terdapat wilayah yang sama sekali tidak memiliki peserta didik SMP.

Kondisi ini mencerminkan belum meratanya akses, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah pertama, serta masih tingginya risiko putus sekolah pada masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah. Apabila tidak ditangani melalui kebijakan pemerataan layanan, penguatan daya tampung satuan pendidikan dan pendekatan afirmatif berbasis wilayah, ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan capaian pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika.

## **2) Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SMP**

Pada tahun 2025 penyelenggaraan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Mimika didukung 851 tenaga pendidik yang melayani 3.881 peserta didik, secara agregat dengan rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik sebesar **1:17**. Rasio ini tergolong sangat rendah dibandingkan standar ideal nasional untuk jenjang SMP, yang mengindikasikan bahwa secara kuantitatif Kabupaten Mimika tidak mengalami kekurangan guru, melainkan menghadapi persoalan utama berupa ketimpangan distribusi tenaga pendidik antar distrik.

Ketimpangan tersebut tampak jelas ketika dianalisis per distrik. Distrik dengan jumlah peserta didik besar menunjukkan rasio yang relatif mendekati kondisi ideal, seperti distrik Mimika Baru (1:18) dan Kuala Kencana (1:16), sementara distrik dengan rasio tinggi yaitu distrik Mimika Timur (1:20) dan dan Mimika Barat (1:27), yang menandakan beban mengajar guru relatif berat dan berpotensi mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya penambahan atau redistribusi tenaga pendidik ke distrik-distrik dengan rasio tinggi tersebut.

Sebaliknya sejumlah distrik memperlihatkan rasio yang sangat rendah, seperti Wania (1:6), Jita (1:4), Agimuga (1:5) dan Amar (1:6) menunjukkan adanya kelebihan tenaga pendidik dibandingkan jumlah peserta didik, disebabkan penempatan guru yang tidak proporsional, penurunan jumlah siswa, atau kemungkinan ketidaksinkronan data. Sebagaimana fakta data nampak pada Distrik Wania secara khusus memerlukan perhatian karena memiliki jumlah tenaga pendidik yang sangat besar yakni 210 orang, namun rasio peserta didik per guru tetap sangat rendah sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan.

Pada distrik-distrik terpencil dan wilayah dengan tantangan geografis tinggi, seperti distrik Tembagapura, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh dan Kwamki Narama, rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik berkisar antara 1:8 hingga 1:9. Kondisi ini dapat dipahami sebagai dampak kebijakan afirmatif untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di wilayah sulit akses. Namun demikian rasio yang terlalu rendah tetap perlu dievaluasi agar penempatan guru tetap seimbang dan berkelanjutan tanpa mengorbankan efisiensi anggaran daerah dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak usia sekolah pada jenjang SMP.

Selain itu tidak tercatat adanya tenaga pendidik maupun peserta didik SMP di Distrik Hoya dan Alama. Fakta ini menunjukkan belum tersedianya layanan pendidikan SMP di kedua distrik tersebut, yang berpotensi meningkatkan risiko putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat jenjang SD dan ketergantungan pada akses terhadap layanan pendidikan pada distrik lain. Untuk itu pengembangan layanan pendidikan jenjang SMP melalui skema SMP satu atap berbasis distrik, sekolah berasrama, atau layanan lintas distrik menjadi kebutuhan strategis.

Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SMP di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMP Tahun 2025

No.	Distrik	Tenaga Pendidik			Peserta Didik			Rasio Tendik & P. Didik
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Mimika Baru	103	247	350	3.274	3.163	6.437	1:18
2.	Wania	45	165	210	1.933	1.817	3.750	1:18
3.	Kuala Kencana	30	71	101	793	773	1.566	1:16
4.	Mimika Timur	13	23	36	379	356	735	1:20
5.	Iwaka	8	18	26	159	126	285	1:11
6.	Tembagapura	12	3	15	79	61	140	1:9
7.	Mimika Barat Tengah	6	9	15	68	69	137	1:9
8.	Mimika Tengah	5	5	10	61	49	110	1:11
9.	Kwamki Narama	5	8	13	61	46	107	1:8
10.	Mimika Barat	5	6	11	157	145	302	1:27
11.	Mimika Timur Jauh	4	6	10	78	49	127	1:13
12.	Jita	3	7	10	23	14	37	1:4
13.	Mimika Barat Jauh	9	10	19	84	62	146	1:8
14.	Agimuga	7	2	9	30	18	48	1:5
15.	Amar	5	5	10	19	44	63	1:6
16.	Jila	4	2	6	45	23	68	1:11
17.	Hoya	0	0	0	0	0	0	0
18.	Alama	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	<b>264</b>	<b>587</b>	<b>851</b>	<b>7.243</b>	<b>6.815</b>	<b>14.058</b>	<b>1:17</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Secara keseluruhan data pada Tabel 2.10 menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan SMP di Kabupaten Mimika bukan terletak pada kekurangan jumlah tenaga pendidik, melainkan pada distribusi yang belum merata dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil wilayah. Kondisi ini menuntut kebijakan penataan dan redistribusi tenaga pendidik yang lebih terarah, berbasis data demografis, karakteristik geografis, serta proyeksi kebutuhan layanan pendidikan jangka menengah dan panjang.

#### d. Sekolah Menengah Atas (SMA)

##### 1) Jumlah peserta didik

Pada tahun 2025 jumlah peserta didik SMA di Kabupaten Mimika sebanyak 6.011 orang yang tersebar pada 5 distrik. Namun demikian sebaran peserta didik tersebut sangat tidak merata antar distrik dan memperlihatkan tingkat konsentrasi yang tinggi pada wilayah perkotaan dan kawasan dengan akses layanan pendidikan yang relatif lebih baik.

Sebagian besar peserta didik SMA terkonsentrasi di Distrik Mimika (47,73%) dan Distrik Wania (44,57%). Artinya lebih dari 92 persen

peserta didik SMA Kabupaten Mimika terkonsentrasi hanya pada dua distrik ini. Kondisi tersebut mencerminkan kuatnya daya tarik wilayah pusat pertumbuhan, baik dari sisi ketersediaan satuan pendidikan SMA, infrastruktur pendukung, maupun kemudahan akses transportasi dan layanan publik lainnya.

Sebaliknya distrik-distrik di luar Mimika Baru dan Wania menunjukkan jumlah peserta didik yang sangat kecil, bahkan nihil. Distrik Mimika Timur hanya 1,55 persen, Iwaka 3,76 persen, dan Mimika Barat 1,80 persen. Rendahnya jumlah peserta didik SMA di distrik-distrik ini mengindikasikan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan menengah atas, baik akibat belum tersedianya sekolah SMA, jarak tempuh yang jauh, maupun kendala geografis dan sosial ekonomi masyarakat.

Jumlah peserta didik SMA di kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Jumlah Peserta Didik SMA  
Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah peserta didik	Persentase jumlah peserta didik
1.	Mimika Baru	14	2.869	47,73
2.	Wania	7	2.679	44,57
3.	Kuala Kencana	10	0	0
4.	Mimika Timur	6	93	1,55
5.	Iwaka	7	262	3,76
6.	Mimika Tengah	5	0	0
7.	Mimika Timur Jauh	5	0	0
8.	Mimika Barat Tengah	9	0	0
9.	Mimika Barat	7	108	1,80
10.	Kwamki Narama	10	0	0
11.	Tembagapura	14	0	0
12.	Mimika Barat Jauh	5	0	0
13.	Amar	6	0	0
14.	Jita	10	0	0
15.	Agimuga	8	0	0
16.	Jila	12	0	0
17.	Hoya	6	0	0
18.	Alama	11	0	0
	Jumlah	142	6,011	100

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Fakta data tabel 2.11, menunjukkan pula terdapat 13 distrik yang sama sekali tidak mencatatkan peserta didik SMA, meskipun memiliki jumlah kampung yang cukup besar, seperti Kuala Kencana, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat Tengah, Kwamki Narama, Tembagapura, Mimika Barat Jauh, Amar, Jita, Agimuga, Jila, Hoya dan Alama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam penyediaan layanan pendidikan SMA, yang berpotensi menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah atas, meningkatnya risiko putus sekolah setelah jenjang SMP, serta mendorong migrasi pelajar ke distrik pusat atau bahkan ke luar wilayah Kabupaten Mimika.

Secara keseluruhan menunjukkan permasalahan utama pendidikan SMA di Kabupaten Mimika bukan hanya pada jumlah peserta didik, melainkan pada ketimpangan spasial layanan pendidikan. Konsentrasi peserta didik yang sangat tinggi di Distrik Mimika Baru dan Wania berbanding terbalik dengan ketiadaan layanan di sebagian besar distrik lainnya. Kondisi ini menuntut kebijakan afirmatif dan terobosan strategis, seperti pengembangan SMA satu atap, sekolah berasrama, penyediaan layanan pendidikan menengah berbasis distrik layanan, serta dukungan transportasi dan beasiswa, agar akses pendidikan SMA dapat lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

## **2) Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMA**

Pada tahun 2025 layanan pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Mimika hanya diselenggarakan di sebagian kecil distrik. Secara keseluruhan tercatat 362 tenaga pendidik yang melayani 6.011 peserta didik, dengan rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik sebesar 1:17. Rasio ini relatif mendekati standar ideal nasional untuk jenjang SMA, yang menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas, ketersediaan tenaga pendidik pada distrik-distrik yang memiliki layanan SMA tergolong cukup.

Distribusi tenaga pendidik dan peserta didik SMA sangat terkonsentrasi di Distrik Mimika Baru (1:19) dan Wania (1:16). Kedua distrik ini menampung lebih dari 90 persen peserta didik SMA Kabupaten Mimika sekaligus mayoritas tenaga pendidik, yang menegaskan peran

distrik Mimika Baru dan Wania sebagai pusat layanan pendidikan menengah atas.

Di luar dua distrik utama tersebut, hanya tiga distrik lain yang memiliki layanan SMA, yaitu Mimika Timur, Iwaka, dan Mimika Barat. Distrik Mimika Timur mencatat rasio 1:23, menunjukkan beban mengajar guru relatif tinggi dan berpotensi berdampak pada kualitas pembelajaran. Sebaliknya rasio yang sangat rendah di Distrik Iwaka (1:12) dan Mimika Barat (1:7) mengindikasikan kelebihan tenaga pendidik dibandingkan jumlah peserta didik. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa penempatan guru SMA belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil peserta didik di masing-masing wilayah.

Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SMA di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMA Tahun 2025

No.	Distrik	Tenaga Pendidik			Peserta Didik			Rasio Tendik & P. Didik
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Mimika Baru	43	107	150	1.398	1.471	2.869	1:19
2.	Wania	56	115	171	1.266	1.413	2.679	1:16
3.	Kuala Kencana	0	0	0	0	0	0	0
4.	Mimika Timur	3	1	4	52	41	93	1:23
5.	Iwaka	6	16	22	140	122	262	1:12
6.	Tembagapura	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mimika Barat Tengah	0	0	0	0	0	0	0
8.	Mimika Tengah	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kwamki Narama	0	0	0	0	0	0	0
10.	Mimika Barat	8	7	15	59	49	108	7
11.	Mimika Timur Jauh	0	0	0	0	0	0	0
12.	Jita	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mimika Barat Jauh	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agimuga	0	0	0	0	0	0	0
15.	Amar	0	0	0	0	0	0	0
16.	Jila	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hoya	0	0	0	0	0	0	0
18.	Alama	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	<b>116</b>	<b>246</b>	<b>362</b>	<b>2.915</b>	<b>3.096</b>	<b>6.011</b>	<b>1:17</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Fakta data pada Tabel 2.12 sebanyak 13 distrik lainnya, termasuk distrik Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Tengah, Mimika Barat

Tengah, Kwamki Narama, hingga Hoya dan Alama, tidak tercatat memiliki tenaga pendidik maupun peserta didik SMA. Kondisi ini menegaskan keterbatasan akses layanan pendidikan menengah atas di sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika, meskipun distrik-distrik tersebut memiliki jumlah kampung yang tidak sedikit. Ketiadaan layanan SMA di wilayah-wilayah ini berpotensi memperbesar kesenjangan akses pendidikan, meningkatkan risiko putus sekolah setelah jenjang SMP, serta mendorong mobilitas pelajar ke distrik pusat.

Secara keseluruhan tantangan utama pendidikan SMA di Kabupaten Mimika bukan terletak pada rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik di distrik yang telah memiliki sekolah, melainkan pada keterbatasan jangkauan layanan dan ketimpangan distribusi antar wilayah. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah guru, tetapi juga pada perluasan layanan SMA melalui pendekatan wilayah layanan, pengembangan sekolah berasrama atau SMA satu atap, serta penataan distribusi tenaga pendidik yang lebih proporsional dan berkeadilan.

#### **e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

##### **1) Jumlah peserta didik**

Pada tahun 2025, sebaran peserta didik SMK di Kabupaten Mimika terkonsentrasi sangat tinggi pada wilayah perkotaan dan penyangga utama, yaitu Distrik Mimika Baru (37,51%), Wania (32,54%), Kuala Kencana (20,57%), serta Mimika Timur (9,37%). Pola ini menegaskan bahwa layanan pendidikan kejuruan masih terpusat di kawasan yang memiliki infrastruktur, fasilitas pendidikan dan dinamika ekonomi yang relatif lebih maju, sementara wilayah lainnya belum terjangkau secara memadai.

Sebaliknya sebanyak 14 distrik tidak memiliki peserta didik SMK sama sekali, yang mencerminkan ketimpangan akses pendidikan kejuruan antar wilayah yang sangat tajam. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan rendahnya partisipasi peserta didik, tetapi juga mengindikasikan keterbatasan bahkan ketiadaan satuan pendidikan SMK

di wilayah-wilayah tersebut. Faktor geografis, keterisolasian wilayah, serta terbatasnya dukungan transportasi dan permukiman menjadi penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan kejuruan di Kabupaten Mimika.

Jumlah peserta didik SMK di kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Jumlah Peserta Didik SMK  
Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah peserta didik	Persentase Jumlah peserta didik
1.	Mimika Baru	14	2.122	37,51
2.	Wania	7	1.841	32,54
3.	Kuala Kencana	10	1.164	20,57
4.	Mimika Timur	6	530	9,37
5.	Iwaka	7	0	0
6.	Mimika Tengah	5	0	0
7.	Mimika Timur Jauh	5	0	0
8.	Mimika Barat Tengah	9	0	0
9.	Mimika Barat	7	0	0
10.	Kwamki Narama	10	5	0,09
11.	Tembagapura	14	0	0
12.	Mimika Barat Jauh	5	0	0
13.	Amar	6	0	0
14.	Jita	10	0	0
15.	Agimuga	8	0	0
16.	Jila	12	0	0
17.	Hoya	6	0	0
18.	Alama	11	0	0
	Jumlah	<b>142</b>	<b>5.662</b>	<b>100</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Ketimpangan akses ini berimplikasi langsung terhadap keadilan pendidikan, khususnya bagi lulusan SMP di wilayah pesisir dan pegunungan. Peserta didik dari distrik yang tidak memiliki SMK dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu melanjutkan pendidikan ke distrik perkotaan dengan beban biaya sosial dan ekonomi yang tinggi atau tidak melanjutkan pendidikan kejuruan sama sekali. Dalam jangka panjang situasi ini berpotensi memperlebar disparitas kualitas sumber daya manusia

antar wilayah serta membatasi pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Lebih lanjut, terbatasnya akses SMK di sebagian besar wilayah kabupaten berdampak pada rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil berbasis lokal, terutama pada sektor-sektor potensial seperti perikanan, pertanian, kehutanan dan ekonomi berbasis sumber daya alam. Tanpa pemerataan layanan pendidikan kejuruan, peran strategis SMK sebagai instrumen penyiapan tenaga kerja siap pakai dan penguatan kemandirian ekonomi daerah belum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk itu fakta data tabel 2.13 menegaskan perlunya arah kebijakan yang lebih afirmatif dan adaptif melalui penataan ulang distribusi layanan SMK. Pengembangan SMK satelit, kelas jauh, *boarding school* kejuruan, serta integrasi pendidikan kejuruan dengan balai latihan kerja berbasis distrik menjadi alternatif strategis yang perlu dipertimbangkan. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan kejuruan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mimika yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **2) Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMK**

Pada tahun 2025, sebaran tenaga pendidik SMK di Kabupaten Mimika terpusat pada wilayah perkotaan dan penyangga utama. Dari 381 tenaga pendidik SMK, seluruhnya terkonsentrasi pada lima distrik, dengan empat distrik utama menampung hampir seluruh tenaga pendidik dan peserta didik sesuai dengan keberadaan satuan pendidikan SMK.

Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik secara agregat 1:15, secara umum masih berada dalam kategori cukup ideal untuk pendidikan kejuruan. Namun jika dilihat lebih rinci, terdapat variasi rasio yang cukup signifikan antar wilayah, Distrik Mimika Baru 1:16, Wania 1:18, dan Kuala Kencana 1:15, yang mencerminkan beban mengajar relatif seimbang meskipun cenderung lebih tinggi di Wania. Sebaliknya Distrik Mimika Timur rasio 1:8, tergolong sangat rendah dan mengindikasikan potensi

kelebihan tenaga pendidik atau rendahnya jumlah peserta didik dibandingkan kapasitas layanan yang tersedia.

Ketimpangan rasio tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi tenaga pendidik SMK tidak semata-mata terkait jumlah total guru, tetapi juga ketepatan penempatan dan kesesuaian dengan daya tampung peserta didik. Rasio yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan inefisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pendidikan, sementara rasio yang lebih tinggi dapat berdampak pada meningkatnya beban kerja guru dan menurunnya kualitas layanan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran kejuruan yang membutuhkan pendampingan intensif dan praktik langsung. Selain itu masih terdapat distrik dengan kondisi ekstrem, di distrik Kwamki Narama yang hanya memiliki 3 tenaga pendidik dan 5 peserta didik dengan rasio 1:2, yang mengindikasikan layanan SMK yang sangat terbatas dan bersifat sporadis.

Jumlah dan rasio tenaga pendidik dengan peserta didik SMK di kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.14 Jumlah dan Rasio Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik SMK Tahun 2025

No.	Distrik	Tenaga Pendidik			Peserta Didik			Rasio Tendik & P. Didik
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Mimika Baru	44	86	130	766	1.356	2.122	1:16
2.	Wania	29	74	103	1.237	604	1.841	1:18
3.	Kuala Kencana	37	41	78	970	194	1.164	1:15
4.	Mimika Timur	25	42	67	315	215	530	1:8
5.	Iwaka	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tembagapura	0	0	0	0	0	0	0
7.	Mimika Barat Tengah	0	0	0	0	0	0	0
8.	Mimika Tengah	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kwamki Narama	0	3	3	4	1	5	2
10.	Mimika Barat	0	0	0	0	0	0	0
11.	Mimika Timur Jauh	0	0	0	0	0	0	0
12.	Jita	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mimika Barat Jauh	0	0	0	0	0	0	0
14.	Agimuga	0	0	0	0	0	0	0
15.	Amar	0	0	0	0	0	0	0
16.	Jila	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hoya	0	0	0	0	0	0	0
18.	Alama	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	<b>135</b>	<b>246</b>	<b>381</b>	<b>3.292</b>	<b>2.370</b>	<b>5.662</b>	<b>1:15</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Berdasarkan fakta data tabel 2.14, maka diperlukan arah kebijakan yang menitikberatkan pada penataan ulang distribusi tenaga pendidik SMK secara lebih proporsional dan berbasis kebutuhan riil wilayah. Upaya ini dapat dilakukan melalui redistribusi guru antar sekolah, penguatan sistem perencanaan kebutuhan guru berbasis data, serta pengembangan model layanan SMK alternatif di wilayah yang belum terjangkau. Dengan demikian, rasio tenaga pendidik dan peserta didik tidak hanya ideal secara angka, tetapi juga efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan kejuruan dan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mimika secara berkelanjutan.

## 2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

### a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah unsur SDM dalam satuan pendidikan yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga pendidik merupakan profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, serta membimbing proses pembelajaran peserta didik, sedangkan tenaga kependidikan adalah personel yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.

Jumlah dan jenis kelamin tenaga pendidik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.15 Jumlah dan Jenis Kelamin Tenaga Pendidik menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	PAUD/TK	118	9	289	290
2.	Sekolah Dasar	139	429	1.401	1.830
3.	Sekolah Menengah Pertama	60	264	587	851
4.	Sekolah Menengah Atas	19	116	246	362
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	24	135	246	381
	Jumlah	<b>360</b>	<b>953</b>	<b>2.769</b>	<b>3.714</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Data tabel 2.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 di kabupaten Mimika terdapat 360 satuan pendidikan yang dilayani 3.714 tenaga pendidik, dengan komposisi yang didominasi oleh perempuan sebanyak 2.769 orang (74,6%), sedangkan tenaga pendidik laki-laki berjumlah 953 orang (25,4%). Jenjang Sekolah Dasar menjadi penyumbang tenaga pendidik terbesar, sejalan dengan jumlah sekolah yang paling banyak, yaitu 139 sekolah dengan total 1.830 guru, menunjukkan beban layanan pendidikan dasar yang paling besar. Sementara itu, jenjang PAUD/TK meskipun memiliki jumlah sekolah yang relatif tinggi (118 sekolah), hanya didukung oleh 290 tenaga pendidik, yang mengindikasikan skala layanan yang kecil per satuan pendidikan serta ketergantungan tinggi pada tenaga pendidik perempuan.

Pada jenjang pendidikan menengah (SMP, SMA dan SMK), jumlah sekolah lebih sedikit, namun rasio tenaga pendidik per sekolah relatif lebih besar, mencerminkan kompleksitas struktur kurikulum dan kebutuhan mata pelajaran yang lebih beragam. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tantangan ganda dalam tata kelola pendidikan, yaitu pemerataan distribusi tenaga pendidik antarjenjang dan satuan pendidikan, serta kebutuhan kebijakan afirmatif untuk menyeimbangkan komposisi gender tanpa mengabaikan kompetensi dan kebutuhan riil pembelajaran.

#### **b. Status Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Status tenaga pendidik dan kependidikan adalah kedudukan atau posisi kepegawaian yang melekat pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan yang menunjukkan hubungan kerja, hak dan kewajiban, serta bentuk pengakuan negara atau penyelenggara pendidikan, baik sebagai ASN, P3K, maupun tenaga non-ASN yang masing-masing memiliki implikasi terhadap kesejahteraan, jaminan karier, pengembangan profesional dan keberlanjutan layanan pendidikan.

Status tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 2.16 Jumlah dan Jenis Kelamin Tenaga Pendidik dan Kependidikan menurut Status Tahun 2025

JENIS PTK	ASN			NON-ASN			TOTAL		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tenaga Pendidik	616	1.428	2.044	484	1.521	2.005	1.100	2.949	4.049
Tenaga Kependidikan	26	52	78	95	159	254	121	211	332
Total	<b>642</b>	<b>1.480</b>	<b>2.122</b>	<b>579</b>	<b>1680</b>	<b>2.259</b>	<b>1.221</b>	<b>3.160</b>	<b>4.381</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Berdasarkan Tabel 2.16, pada tahun 2025 jumlah tenaga pendidik dan kependidikan mencapai 4.381 orang, dengan komposisi tenaga pendidik sebanyak 4.049 orang dan tenaga kependidikan 332 orang. Dari sisi status kepegawaian, bahwa tenaga pendidik relatif seimbang antara ASN (2.044 orang) dan Non-ASN (2.005 orang), yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan sistem pendidikan pada tenaga pendidik Non-ASN untuk menjamin keberlangsungan layanan pembelajaran.

Sebaliknya tenaga kependidikan didominasi Non-ASN sebanyak 254 orang sedangkan ASN hanya 78 orang, mencerminkan keterbatasan formasi dan pengangkatan tenaga kependidikan dalam struktur ASN. Ditinjau dari aspek gender, baik pada tenaga pendidik maupun kependidikan, perempuan mendominasi secara signifikan, khususnya pada tenaga pendidik Non-ASN (1.521 orang), yang mengindikasikan peran besar perempuan dalam menopang operasional pendidikan, namun sekaligus menegaskan tantangan kebijakan terkait kepastian status, perlindungan kerja, dan kesejahteraan, terutama bagi tenaga Non-ASN agar kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan dapat terjaga.

### 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Mimika menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam. Di wilayah perkotaan, sebagian besar sekolah telah memiliki ruang kelas, laboratorium dan fasilitas pendukung yang baik. Namun di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil), masih terdapat sekolah dengan ruang kelas rusak, minim sarana belajar dan tidak memiliki akses air bersih maupun sanitasi yang memadai. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti asrama siswa, perumahan guru dan akses internet

masih sangat terbatas di wilayah terpencil. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah juga masih rendah akibat keterbatasan jaringan dan perangkat digital.

Ketersediaan jenis, jumlah sarana-prasarana layanan pendidikan di kabupaten Mimika tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.17 Sarana-Prasarana Sekolah Tahun 2025

No.	Distrik	Sarana-Prasarana			
		R. Kelas	R. Perpus	R. Lab	R. Praktik
1.	Agimuga	29	1	1	0
2.	Alama	6	0	0	0
3.	Amar	30	2	1	0
4.	Hoya	6	0	0	0
5.	Iwaka	108	7	6	0
6.	Jila	19	2	1	0
7.	Jita	40	2	1	0
8.	Kuala Kencana	292	26	16	2
9.	Kwamki Narama	36	2	2	0
10.	Mimika Barat	43	4	3	0
11.	Mimika Barat Jauh	46	1	0	0
12.	Mimika Barat Tengah	60	5	2	0
13.	Mimika Baru	1.069	52	89	0
14.	Mimika Tengah	55	4	3	0
15.	Mimika Timur	167	14	8	1
16.	Mimika Timur Jauh	56	1	1	1
17.	Tembagapura	80	5	2	2
18.	Wania	831	51	44	0
	Jumlah	<b>2.973</b>	<b>179</b>	<b>180</b>	<b>6</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Sebaran sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antar wilayah. Dari total 2.973 ruang kelas, 179 ruang perpustakaan, 180 ruang laboratorium dan hanya 6 ruang praktik, fasilitas pendidikan sangat terkonsentrasi di distrik-distrik perkotaan. Distrik Mimika Baru dan Wania mendominasi ketersediaan ruang kelas serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium, sementara distrik lain umumnya hanya memiliki ruang kelas dengan jumlah terbatas dan minim fasilitas penunjang. Ruang praktik sebagai elemen penting pembelajaran keterampilan hampir tidak tersedia di sebagian besar distrik.

Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut berdampak langsung pada mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Sekolah di wilayah dengan fasilitas terbatas cenderung mengalami hambatan menerapkan pembelajaran aktif, eksperimen dan berbasis keterampilan, sehingga proses pendidikan berlangsung secara minimal dan teoritis. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antar wilayah, membatasi pengembangan kompetensi peserta didik, serta melemahkan fungsi pendidikan sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.

Lanjutan Tabel 2.17

No.	Distrik	Sarana-Prasarana			
		R. Pimpinan	R. Guru	R. Ibadah	R. UKS
1.	Agimuga	3	5	0	0
2.	Alama	0	0	0	0
3.	Amar	4	5	3	1
4.	Hoya	0	1	0	0
5.	Iwaka	7	10	2	2
6.	Jila	1	3	0	0
7.	Jita	5	5	1	2
8.	Kuala Kencana	23	30	8	8
9.	Kwamki Narama	3	6	0	0
10.	Mimika Barat	6	7	0	3
11.	Mimika Barat Jauh	0	4	0	0
12.	Mimika Barat Tengah	5	5	0	0
13.	Mimika Baru	83	98	22	27
14.	Mimika Tengah	5	10	0	0
15.	Mimika Timur	20	34	5	6
16.	Mimika Timur Jauh	4	9	1	1
17.	Tembagapura	6	6	3	1
18.	Wania	69	81	24	24
	Jumlah	<b>244</b>	<b>319</b>	<b>69</b>	<b>75</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Sebaran sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah dan ruang UKS menunjukkan ketimpangan cukup tajam antar wilayah. Secara total tersedia 244 ruang pimpinan, 319 ruang guru, 69 ruang ibadah, dan 75 ruang UKS. Fasilitas tersebut sangat terkonsentrasi di distrik-distrik perkotaan, terutama Mimika Baru dan Wania, yang masing-masing memiliki jumlah ruang pimpinan dan ruang guru paling dominan, disertai ketersediaan ruang ibadah dan UKS yang

relatif lengkap. Distrik lain (Kuala Kencana dan Mimika Timur) juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang yang lebih baik dibandingkan wilayah lain, meskipun dalam skala lebih terbatas. Sebaliknya sejumlah distrik seperti distrik Alama, Hoya, Mimika Barat Jauh dan beberapa distrik pedalaman lainnya hampir tidak memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang memadai.

Keterbatasan sarana penunjang ini berdampak langsung pada kualitas tata kelola sekolah, kenyamanan lingkungan belajar, serta layanan kesehatan dan pembinaan karakter peserta didik. Ketiadaan ruang pimpinan dan ruang guru menyulitkan pengelolaan sekolah secara profesional dan menghambat aktivitas kolaborasi serta pengembangan kapasitas pendidik. Minimnya ruang ibadah berpotensi mengurangi dukungan terhadap pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual, sementara keterbatasan ruang UKS melemahkan layanan kesehatan dasar di sekolah, khususnya bagi peserta didik di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas.

Lanjutan Tabel 2.17

No.	Distrik	Sarana-Prasarana			
		R. Toilet	R. Gudang	R. Sirkulasi	T. Bermain
1.	Agimuga	12	0	0	0
2.	Alama	3	0	0	0
3.	Amar	19	1	0	1
4.	Hoya	0	0	0	0
5.	Iwaka	49	8	0	2
6.	Jila	2	0	0	0
7.	Jita	13	2	0	1
8.	Kuala Kencana	104	12	3	9
9.	Kwamki Narama	13	1	0	0
10.	Mimika Barat	16	2	2	0
11.	Mimika Barat Jauh	7	1	0	0
12.	Mimika Barat Tengah	7	0	0	0
13.	Mimika Baru	369	51	5	13
14.	Mimika Tengah	15	4	0	1
15.	Mimika Timur	80	11	0	1
16.	Mimika Timur Jauh	21	2	0	0
17.	Tembagapura	31	4	0	1
18.	Wania	349	36	0	7
	Jumlah	<b>111</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>36</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Sebaran sarana dan prasarana pendukung lingkungan sekolah berupa ruang toilet, ruang gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain di Kabupaten Mimika menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah. Secara total tersedia fasilitas toilet dalam jumlah relatif besar dan terkonsentrasi di distrik perkotaan seperti Mimika Baru dan Wania, yang masing-masing memiliki ratusan unit toilet.

Sebaliknya sejumlah distrik pedalaman hanya memiliki toilet dalam jumlah sangat terbatas, bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Ketersediaan ruang gudang juga terbatas dan tidak merata, sementara ruang sirkulasi hampir tidak tersedia di sebagian besar distrik, dengan hanya beberapa unit yang tercatat di wilayah tertentu. Tempat bermain sebagai sarana pendukung perkembangan fisik dan sosial peserta didik juga sangat minim dan terkonsentrasi di distrik-distrik tertentu.

Secara khusus ketiadaan dan keterbatasan toilet di sekolah pada distrik pedalaman, memiliki implikasi serius terhadap penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan pendidikan. Toilet merupakan prasarana dasar yang menentukan praktik kebersihan personal (buang air yang layak, cuci tangan dengan sabun), sehingga ketidakterseediaannya berpotensi mendorong perilaku tidak higienis, meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan peserta didik. Kondisi ini tidak hanya menghambat pembiasaan PHBS sejak dini, tetapi juga berdampak pada kenyamanan, konsentrasi belajar dan partisipasi siswa, terutama bagi anak perempuan sehingga memperlebar kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman serta menegaskan pentingnya pemenuhan standar sarana sanitasi sekolah sebagai prasyarat pendidikan yang sehat dan inklusif.

Ketimpangan ketersediaan sarana pendukung berimplikasi langsung terhadap kualitas lingkungan belajar dan kenyamanan warga sekolah. Keterbatasan toilet berpotensi menimbulkan persoalan sanitasi dan kesehatan peserta didik, terutama di sekolah dengan jumlah siswa yang besar. Minimnya ruang gudang menyulitkan penyimpanan sarana pembelajaran dan peralatan sekolah, sedangkan ketiadaan ruang sirkulasi dapat

menghambat mobilitas dan keselamatan di lingkungan sekolah. Rendahnya ketersediaan tempat bermain juga berdampak pada terbatasnya ruang aktivitas fisik dan sosial peserta didik, khususnya jenjang pendidikan dasar.

Lanjutan Tabel 2.17

No.	Distrik	Sarana-Prasarana			
		R. TU	R. Konseling	R. OSIS	R. Bangunan
1.	Agimuga	0	0	0	10
2.	Alama	0	0	0	1
3.	Amar	0	0	0	16
4.	Hoya	0	0	0	3
5.	Iwaka	7	1	1	74
6.	Jila	0	0	0	3
7.	Jita	1	2	1	8
8.	Kuala Kencana	10	5	4	115
9.	Kwamki Narama	0	0	0	19
10.	Mimika Barat	2	1	0	19
11.	Mimika Barat Jauh	0	0	0	21
12.	Mimika Barat Tengah	0	0	0	20
13.	Mimika Baru	38	18	14	283
14.	Mimika Tengah	1	0	0	21
15.	Mimika Timur	7	5	1	78
16.	Mimika Timur Jauh	0	0	0	17
17.	Tembagapura	1	0	0	14
18.	Wania	35	10	5	280
	Jumlah	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>1.002</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Sebaran sarana dan prasarana pendukung manajemen dan layanan kesiswaan di Kabupaten Mimika menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok antar wilayah. Dari total 1.002 bangunan sekolah, hanya tersedia 102 ruang tata usaha, 42 ruang konseling dan 26 ruang OSIS. Fasilitas tersebut sangat terkonsentrasi di distrik perkotaan, khususnya Mimika Baru dan Wania, yang memiliki jumlah bangunan sekolah terbesar sekaligus ketersediaan ruang TU, konseling dan OSIS yang relatif lebih lengkap. Distrik Kuala Kencana dan Mimika Timur juga menunjukkan ketersediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dibandingkan distrik lainnya, meskipun dalam jumlah terbatas. Sebaliknya, sebagian besar distrik pedalaman dan pesisir hampir seluruhnya tidak memiliki ruang TU, konseling, maupun OSIS, meskipun memiliki bangunan sekolah dalam jumlah tertentu.

Keterbatasan fasilitas pendukung tersebut berdampak langsung pada kualitas tata kelola sekolah, layanan administrasi, serta pembinaan peserta didik. Ketiadaan ruang tata usaha menghambat pengelolaan administrasi sekolah yang tertib dan profesional, sementara minimnya ruang konseling membatasi layanan bimbingan dan pendampingan psikososial bagi peserta didik. Tidak tersedianya ruang OSIS juga mempersempit ruang pembinaan kepemimpinan, partisipasi, dan pengembangan karakter siswa. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas layanan pendidikan, terutama di wilayah dengan tantangan sosial dan geografis yang lebih kompleks.

Selanjutnya rasio ruang kelas dengan peserta didik menggambarkan perbandingan antara jumlah ruang kelas yang tersedia dengan jumlah peserta didik yang dilayani dalam suatu wilayah atau satuan pendidikan, yang digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pemanfaatan sarana pembelajaran. Rasio ruang kelas dengan peserta didik di kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana data tabel berikut ini:

Tabel 2.18 Jumlah dan Rasio Ruang Kelas dengan Peserta Didik Tahun 2025

No.	Distrik	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Rasio R.Kelas dan Peserta Didik
		Sekolah	Ruang Kelas		
1.	Agimuga	7	29	487	1:17
2.	Alama	1	6	58	1:10
3.	Amar	7	30	785	1:26
4.	Hoya	1	6	165	1:28
5.	Iwaka	16	108	2.007	1:19
6.	Jila	3	19	402	1:21
7.	Jita	7	40	649	1:16
8.	Kuala Kencana	35	292	6.837	1:23
9.	Kwamki Narama	9	36	1.209	1:34
10.	Mimika Barat	8	43	1.254	1:29
11.	Mimika Barat Jauh	11	46	943	1:21
12.	Mimika Barat Tengah	11	60	1.264	1:21
13.	Mimika Baru	115	1069	27.668	1:26
14.	Mimika Tengah	11	55	1.375	1:25
15.	Mimika Timur	27	167	4.013	1:24
16.	Mimika Timur Jauh	11	56	1.345	1:24
17.	Tembagapura	14	80	996	1:12
18.	Wania	94	831	20.704	1:25
	Jumlah	<b>388</b>	<b>2.973</b>	<b>72.161</b>	<b>1:24</b>

Sumber: Dapodik Kemendikbud, November 2025

Rasio ruang kelas dengan peserta didik di Kabupaten Mimika tahun 2025 menunjukkan variasi yang cukup lebar antar wilayah. Secara agregat, terdapat 2.973 ruang kelas yang melayani 72.161 peserta didik dengan rasio rata-rata 1:24, secara umum masih berada dalam batas wajar standar layanan pendidikan. Namun pada tingkat distrik terlihat perbedaan signifikan, di mana beberapa wilayah memiliki rasio sangat tinggi seperti distrik Kwamki Narama (1:34), Mimika Barat (1:29), Hoya (1:28), serta Amar dan Mimika Baru (masing-masing 1:26). Sebaliknya terdapat distrik dengan rasio relatif rendah seperti distrik Tembagapura (1:12), Alama (1:10) dan Agimuga (1:17), menunjukkan kelas dengan tingkat keterisian lebih longgar.

Rasio ruang kelas yang tinggi mencerminkan kepadatan kelas yang berpotensi menurunkan kualitas proses pembelajaran, terutama dalam hal kenyamanan belajar, intensitas interaksi guru dan peserta didik, serta efektivitas pengelolaan kelas. Kondisi ini lebih berisiko terjadi di distrik dengan jumlah peserta didik besar dan pertumbuhan penduduk tinggi, khususnya di wilayah perkotaan dan penyangga utama. Sebaliknya rasio yang terlalu rendah dapat mengindikasikan pemanfaatan ruang kelas yang belum optimal, berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan sarana pendidikan. Ketimpangan rasio ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada jumlah ruang kelas secara total, tetapi pada ketidakseimbangan distribusi ruang kelas terhadap sebaran peserta didik antar wilayah.

Secara keseluruhan data Tabel 2.18, menunjukkan bahwa meskipun rasio rata-rata ruang kelas dengan peserta didik di Kabupaten Mimika tergolong cukup, ketimpangan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan. Diperlukan kebijakan penataan sarana pendidikan yang lebih berbasis kebutuhan riil, melalui penambahan ruang kelas di distrik dengan rasio tinggi serta optimalisasi pemanfaatan ruang kelas di wilayah dengan rasio rendah. Pendekatan ini penting untuk menjamin proses pembelajaran yang lebih merata, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Mimika.

#### 4. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan di Kabupaten Mimika bersumber dari berbagai sumber, antara lain APBD, APBN, Dana Otonomi Khusus (OTSUS), serta kontribusi dunia usaha melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Meskipun alokasi anggaran untuk sektor pendidikan cukup besar, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena perencanaan dan pengawasan masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga.

Dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan di kabupaten Mimika disalurkan melalui alokai dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah sehari-hari, seperti alat tulis, bahan belajar dan kegiatan rutin. BOP mendukung biaya operasional pendidikan tambahan di luar BOS, sedangkan TPG diberikan sebagai tunjangan bagi guru bersertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. TKG dialokasikan untuk guru dengan kondisi atau tugas khusus, sementara Tamsil diberikan kepada guru baru yang belum menerima TPG agar tetap memperoleh penghasilan tambahan.

Rekapitulasi sumber pendanaan sektor pendidikan di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 sebagaimana data tabel berikut:

Grafik 2.19 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sektor Pendidikan Tahun 2023

No.	Sumber Dana	Pagu (dalam Miliar)	Realisasi (dalam Miliar)	Tidak terealisasi
1.	BOS	84,2	83,8	0,4
2.	BOP	4,0	3,9	0,1
3.	TPG	30,3	30,3	0,0
4.	TKG	11,6	11,6	0,0
5.	Tamsil	2,5	1,3	1,2
6.	DAU	55,2	55,2	0,0
7.	DAK Fisik	13,4	12,3	1,1
	Jumlah	<b>201,2</b>	<b>198,4</b>	<b>2,8</b>

Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud, 2023

Analisis terhadap data tabel 2.19 terkait masing-masing sumber pendanaan sektor pendidikan tahun 2023 yang disajikan secara terpisah sebagai berikut:

a. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS memiliki pagu sebesar Rp.84,2 miliar dengan realisasi Rp.83,8 miliar, menyisakan dana tidak terealisasi sebesar Rp.0,4 miliar. Tingginya tingkat serapan menunjukkan bahwa BOS berperan sangat efektif dalam mendukung operasional rutin sekolah, seperti pembelajaran, pengadaan alat dan bahan ajar, serta kebutuhan administrasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada ketepatan perencanaan dan pelaporan di tingkat satuan pendidikan.

b. Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)

Dana BOP memiliki pagu Rp.4,0 miliar dan terealisasi sebesar Rp.3,9 miliar, dengan sisa Rp.0,1 miliar. Kondisi ini menandakan bahwa BOP telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini, meskipun terdapat keterbatasan pada kesiapan lembaga atau penyesuaian administratif yang memengaruhi realisasi penuh.

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Dana TPG memiliki pagu dan realisasi yang sama, yaitu Rp.30,3 miliar, tanpa sisa anggaran (100%). Hal ini menunjukkan sistem penyaluran yang sangat baik dan tepat sasaran, serta mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjamin kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan profesionalisme tenaga pendidik.

d. Tunjangan Khusus Guru (TKG)

Dana TKG juga menunjukkan realisasi 100% dari pagu Rp.11,6 miliar. Capaian ini mengindikasikan komitmen kuat dalam memberikan afirmasi kepada guru yang bertugas di daerah khusus atau terpencil, serta efektivitas mekanisme penetapan penerima dan penyaluran tunjangan.

e. Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil)

Dana Tamsil memiliki pagu Rp.2,5 miliar namun realisasi hanya Rp.1,3 miliar, sehingga terdapat sisa anggaran cukup besar sebesar Rp.1,2 miliar. Rendahnya tingkat serapan ini mengindikasikan adanya kendala administratif, ketidaksesuaian data penerima, atau keterbatasan pemenuhan persyaratan, yang perlu menjadi perhatian agar tujuan

peningkatan kesejahteraan guru non-sertifikasi dapat tercapai secara optimal.

f. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU untuk sektor pendidikan memiliki pagu dan realisasi yang sama sebesar Rp.55,2 miliar. Realisasi penuh ini menunjukkan bahwa DAU telah menjadi tulang punggung pembiayaan belanja pegawai dan operasional pendidikan daerah, serta mencerminkan stabilitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan secara umum.

g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik memiliki pagu Rp.13,4 miliar dengan realisasi Rp.12,3 miliar, menyisakan Rp.1,1 miliar yang tidak terealisasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan fisik pendidikan, seperti pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana yang umumnya dipengaruhi oleh kesiapan teknis, proses pengadaan, serta kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah.

Secara keseluruhan analisis per sumber dana pendidikan di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa pendanaan operasional dan belanja rutin relatif telah dikelola dengan baik, sementara pendanaan yang bersifat afirmatif dan pembangunan fisik masih memerlukan penguatan tata kelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

### C. Status Akreditasi Sekolah

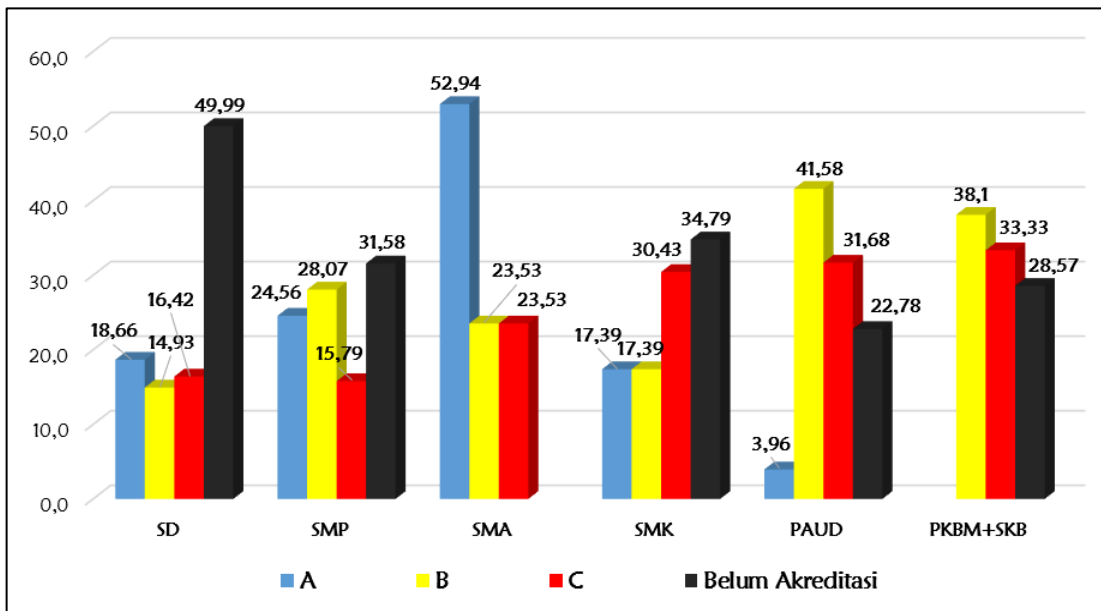
Status akreditasi sekolah formal dan nonformal merupakan pengakuan resmi terhadap kelayakan dan mutu satuan pendidikan berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SPN) yang mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, proses pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Secara konseptual, akreditasi berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal yang memberikan gambaran objektif tentang kualitas layanan pendidikan, baik pada jalur formal (SD, SMP, SMA/SMK) maupun nonformal (PKBM dan SKB).

Manfaat akreditasi tidak hanya sebagai dasar pembinaan dan peningkatan mutu berkelanjutan, tetapi juga sebagai rujukan bagi pemerintah

daerah dalam perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya, bagi masyarakat dalam menentukan pilihan layanan pendidikan, serta bagi satuan pendidikan sebagai tolok ukur kinerja dan legitimasi mutu penyelenggaraan pendidikan.

Status akreditasi sekolah formal dan nonformal di kabupaten Mimika tahun 2024, sebagaimana data tabel berikut ini:

Grafik 2.4 Status Akreditasi Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Tahun 2024



Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

Berdasarkan data grafik 2.4 tentang status akreditasi satuan pendidikan formal dan nonformal tahun 2024 dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada jenjang PAUD di Kabupaten Mimika, struktur akreditasi menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan berada pada kategori menengah, dengan dominasi akreditasi B (41,58%) dan C (31,68%) sedangkan capaian akreditasi A masih sangat terbatas (3,96%). Selain itu proporsi PAUD yang belum terakreditasi masih cukup signifikan, mencapai 22,78 persen. Komposisi ini mencerminkan bahwa mutu layanan PAUD secara umum masih berada pada tahap pemenuhan standar dasar dan belum menunjukkan keunggulan kualitas yang merata.

Rendahnya persentase PAUD berakreditasi A dan masih tingginya satuan pendidikan yang belum terakreditasi menggambarkan keterbatasan pemenuhan unsur-unsur utama akreditasi PAUD. Tantangan utama terletak pada standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, terutama terkait kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta pada aspek pengelolaan lembaga yang belum sepenuhnya berbasis perencanaan dan administrasi mutu. Di sisi lain pemenuhan standar layanan perkembangan anak, termasuk ketersediaan sarana bermain edukatif, lingkungan belajar yang aman dan stimulatif, serta pelibatan orangtua masih belum optimal. Banyak PAUD di Mimika beroperasi secara swadaya dengan dukungan pembiayaan, sarana dan kapasitas manajerial yang terbatas.

Secara keseluruhan mutu PAUD di Kabupaten Mimika masih berada pada tahap penguatan dasar dan memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pendidik dan pengelola, serta pemenuhan standar layanan perkembangan anak secara konsisten agar PAUD dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya.

## **2. Sekolah Dasar (SD)**

Pada jenjang SD di Kabupaten Mimika, capaian akreditasi masih menjadi tantangan mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar. Hampir setengah satuan pendidikan SD (49,99%) tercatat belum terakreditasi. Sementara itu satuan pendidikan yang telah terakreditasi menunjukkan komposisi yang relatif berimbang, dengan akreditasi A sebesar 18,66 persen, akreditasi B sebesar 14,93 persen, dan akreditasi C sebesar 16,42 persen. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa belum terbentuk dominasi mutu yang kuat pada jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan.

Tingginya proporsi SD yang belum terakreditasi mencerminkan keterbatasan pemenuhan berbagai unsur dalam akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Tantangan utama umumnya terletak pada aspek sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, keterbatasan kualifikasi dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan,

serta kapasitas pengelolaan sekolah yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Mimika yang kompleks, dengan sebaran sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman yang sulit dijangkau, turut memengaruhi keterbatasan akses pembinaan, supervisi, dan pendampingan mutu. Selain itu, kemampuan manajerial sekolah dalam menyiapkan dokumen mutu dan mengimplementasikan praktik pembelajaran sesuai instrumen akreditasi masih bervariasi antar wilayah.

Secara keseluruhan, mutu kelembagaan SD di Kabupaten Mimika masih menunjukkan variasi yang cukup lebar dan belum merata. Kondisi ini menegaskan perlunya pendampingan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, khususnya untuk mempercepat pemenuhan standar minimal layanan pendidikan dasar. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting dalam memastikan kualitas pendidikan SD yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

### **3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Pada jenjang SMP di Kabupaten Mimika, capaian akreditasi menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan SD. Mayoritas satuan pendidikan SMP telah memperoleh status akreditasi, dengan dominasi peringkat B sebesar 28,07 persen dan peringkat A sebesar 24,56 persen. Capaian tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam pemenuhan standar mutu pendidikan menengah pertama. Meskipun demikian masih terdapat 31,58 persen SMP yang belum terakreditasi, menunjukkan bahwa proses pemerataan mutu dan penjaminan kualitas layanan pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah kabupaten.

Dominasi akreditasi A dan B pada jenjang SMP mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi unsur utama dalam akreditasi, terutama pada standar proses pembelajaran, kompetensi pendidik, serta aspek pengelolaan sekolah. Praktik pembelajaran, perencanaan kurikulum dan sistem penilaian pada sekolah-sekolah tersebut relatif telah berjalan sesuai ketentuan. Namun keberadaan SMP yang belum terakreditasi menunjukkan masih adanya kendala pada aspek keberlanjutan

mutu, seperti keterbatasan sarana pendukung pembelajaran, belum optimalnya supervisi akademik, serta lemahnya internalisasi budaya mutu sekolah. Kondisi geografis dan disparitas dukungan antar wilayah turut memengaruhi variasi capaian mutu tersebut.

Secara keseluruhan jenjang SMP di Kabupaten Mimika menunjukkan kemajuan mutu yang cukup stabil dan menjanjikan. Namun demikian penguatan tata kelola sekolah dan percepatan akreditasi pada SMP yang belum terakreditasi tetap menjadi prioritas, khususnya untuk mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan antar wilayah. Upaya ini penting guna memastikan kesinambungan mutu pendidikan menengah pertama sebagai fondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya.

#### **4. Sekolah Menengah Atas (SMA)**

Pada jenjang SMA di Kabupaten Mimika, capaian akreditasi menunjukkan kondisi yang paling baik dan stabil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Seluruh satuan pendidikan SMA telah memperoleh status akreditasi, dengan lebih dari separuh sekolah berada pada peringkat A (52,94%). Sementara itu akreditasi B dan C masing-masing mencapai 23,53 persen. Komposisi ini mencerminkan tingkat kesiapan kelembagaan yang relatif tinggi serta pemenuhan standar nasional pendidikan yang lebih konsisten pada jenjang pendidikan menengah atas.

Dominasi akreditasi A pada jenjang SMA menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi hampir seluruh unsur penilaian akreditasi secara optimal. Capaian tersebut terlihat pada pemenuhan standar isi dan kurikulum, kualitas proses pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar, serta kompetensi lulusan yang relatif sesuai dengan tuntutan kelanjutan pendidikan dan dunia kerja. Selain itu ketersediaan dan kualifikasi pendidik, pengelolaan sekolah serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA umumnya lebih memadai dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, sehingga mendukung keberlanjutan mutu layanan pendidikan.

Secara keseluruhan jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Mimika berada pada kondisi mutu yang relatif mapan dan stabil. Dengan capaian akreditasi yang menyeluruh dan dominasi peringkat tinggi, jenjang ini memiliki modal yang kuat untuk diarahkan pada peningkatan kualitas berkelanjutan, pengembangan inovasi pembelajaran, serta penguatan daya saing lulusan sesuai dengan tuntutan pendidikan lanjutan dan perkembangan zaman.

## 5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pada jenjang SMK di Kabupaten Mimika, kondisi akreditasi menunjukkan tantangan yang cukup serius baik dari sisi mutu maupun kelembagaan. Proporsi SMK yang belum terakreditasi masih relatif tinggi, (34,79%), sementara 30,43 persen lainnya berada pada peringkat C. Adapun satuan pendidikan dengan akreditasi A dan B masing-masing baru mencapai 17,39 persen. Komposisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar SMK masih berada pada level pemenuhan standar minimal dan belum menunjukkan dominasi mutu yang kuat.

Tingginya persentase SMK yang belum terakreditasi dan berakreditasi C mencerminkan lemahnya pemenuhan unsur-unsur kunci dalam instrumen akreditasi pendidikan kejuruan. Kendala utama terlihat pada keterbatasan sarana dan prasarana praktik, ketersediaan dan kelayakan peralatan kejuruan, serta belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai prasyarat utama relevansi pendidikan vokasi. Selain itu kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan kompetensi pendidik kejuruan juga masih memerlukan penguatan agar proses pembelajaran lebih aplikatif dan berorientasi pada keterampilan kerja nyata.

Secara keseluruhan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan substantif. Kondisi ini menuntut adanya intervensi afirmatif yang terarah, khususnya melalui investasi sarana praktik kejuruan, penguatan manajemen sekolah, serta perluasan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri guna meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK.

## 6. Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB)

Pada jenjang pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Mimika, struktur akreditasi menunjukkan dominasi peringkat B (38,10%) dan C (33,33%). Sementara itu masih terdapat 28,57 persen satuan pendidikan yang belum terakreditasi. Komposisi ini mencerminkan bahwa layanan pendidikan nonformal telah berjalan dan diakui secara kelembagaan, namun capaian mutunya masih berada pada tingkat menengah dan belum merata di seluruh satuan penyelenggara.

Dominasi akreditasi B dan C serta masih tingginya lembaga yang belum terakreditasi mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan unsur-unsur akreditasi pendidikan nonformal. Tantangan utama terletak pada standar pengelolaan lembaga, termasuk perencanaan program, administrasi pembelajaran dan sistem penjaminan mutu internal. Selain itu keterbatasan pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar, lemahnya sistem penilaian hasil belajar, serta ketidakberlanjutan program layanan pendidikan kesetaraan menjadi faktor yang memengaruhi capaian akreditasi. Kondisi sosial ekonomi warga belajar dan keterbatasan dukungan sarana pembelajaran juga turut berpengaruh terhadap kualitas layanan PKBM dan SKB.

Secara keseluruhan pendidikan nonformal di Kabupaten Mimika masih memerlukan penguatan sistem mutu secara terencana dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pengelola dan pendidik, penataan tata kelola lembaga, serta penguatan pengakuan hasil belajar menjadi kunci agar PKBM dan SKB mampu menyediakan layanan pendidikan yang setara, bermutu dan diakui secara formal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan daerah.

### D. Rapor Mutu Pendidikan

Hasil Rapor Mutu Pendidikan Kabupaten Mimika menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator, khususnya dalam aspek manajemen sekolah dan partisipasi pendidikan dasar. Namun indikator mutu pembelajaran,

kompetensi literasi dan numerasi, serta kualitas pendidik masih berada di bawah rata-rata nasional.

Kesenjangan mutu antar satuan pendidikan cukup lebar, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedalaman. Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek sarana prasarana dan keterpenuhan jam belajar. Kondisi ini menuntut kebijakan afirmatif untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan melalui penguatan supervisi, pendampingan sekolah dan peningkatan kapasitas guru serta kepala sekolah.

Tabel 2.20 Capaian Rapor Pendidikan Komponen Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Literasi	Numerasi	Karakter
1.	SD	Sedang	Sedang	Baik
2.	SMP	Sedang	Sedang	Baik
3.	SMA	Sedang	Sedang	Baik
4.	SMK	Sedang	Kurang	Sedang

Sumber: Dinas Pendidikan Mimika, 2025

Berdasarkan fakta analisis terhadap capaian rapor pendidikan kabupaten Mimika tahun 2025, maka menurut jenjang pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Sekolah Dasar (SD)

- a. Literasi: Capaian literasi berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan memahami teks dasar telah terbentuk, namun masih memerlukan penguatan terutama pada pemahaman makna dan penggunaan informasi secara kritis.
- b. Numerasi: Kemampuan numerasi juga berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa penguasaan konsep berhitung dan pemecahan masalah sederhana telah berkembang, tetapi belum konsisten di seluruh peserta didik.
- c. Karakter: Capaian karakter berada pada kategori baik, mencerminkan keberhasilan sekolah dalam menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan sikap sosial sebagai fondasi pembelajaran lanjutan.

## 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Literasi: Literasi berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa kemampuan memahami teks yang lebih kompleks sudah berkembang, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan analisis dan refleksi yang mendalam.
- b. Numerasi: Capaian numerasi sedang menandakan bahwa peserta didik telah memiliki dasar penalaran matematis, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep pada konteks yang lebih abstrak.
- c. Karakter: Aspek karakter tetap berada pada kategori baik, yang menunjukkan kesinambungan pembinaan sikap, nilai, dan perilaku positif pada masa transisi remaja awal.

## 3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Literasi: Literasi pada jenjang SMA masih berada pada kategori sedang, mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis, sintesis informasi, dan evaluasi teks kompleks belum berkembang secara optimal.
- b. Numerasi: Numerasi juga berada pada kategori sedang, yang mencerminkan keterbatasan dalam penalaran kuantitatif dan pemecahan masalah kontekstual yang menuntut analisis tingkat tinggi.
- c. Karakter: Capaian karakter yang baik menunjukkan bahwa pendidikan nilai, etika, dan tanggung jawab sosial telah tertanam dengan cukup kuat pada peserta didik.

## 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Literasi: Literasi berada pada kategori **sedang**, yang menunjukkan bahwa kemampuan memahami teks fungsional dan teknis telah berkembang, namun masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Numerasi: Numerasi berada pada kategori **kurang**, menandakan adanya kelemahan dalam penerapan konsep matematika praktis yang dibutuhkan dalam pembelajaran vokasional dan kompetensi keahlian.
- c. Karakter: Capaian karakter pada kategori **sedang** menunjukkan bahwa pembinaan sikap kerja, kedisiplinan, dan etos profesional masih perlu diperkuat agar selaras dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Fakta capaian raport pendidikan ini memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan pendidikan Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1. Diperlukan pergeseran fokus kebijakan dari sekadar peningkatan akses dan partisipasi menuju peningkatan mutu pembelajaran, khususnya pada literasi dan numerasi. Intervensi harus diarahkan pada penguatan kapasitas guru dalam pembelajaran berbasis pemahaman konsep, asesmen diagnostik, serta pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan masyarakat Mimika.
2. Capaian karakter yang relatif baik perlu dimanfaatkan sebagai titik masuk untuk memperkuat literasi dan numerasi melalui pendekatan pembelajaran holistik. Integrasi pendidikan karakter dengan penguatan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah menjadi kunci agar proses belajar lebih bermakna dan berdampak.
3. Jenjang SMK memerlukan kebijakan afirmatif yang lebih spesifik. Penguatan numerasi terapan, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), serta kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi keharusan agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang relevan dan siap kerja. Tanpa intervensi serius, SMK berisiko menghasilkan lulusan yang secara karakter cukup baik, tetapi belum kompeten secara teknis.
4. Hasil rapor pendidikan menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan peningkatan mutu pendidikan yang terukur dan berkelanjutan. Peta jalan tersebut perlu mengaitkan capaian Rapor Pendidikan dengan indikator makro seperti IPM, RLS, dan HLS, sehingga kemajuan pendidikan Kabupaten Mimika tidak hanya terlihat pada angka partisipasi, tetapi juga tercermin pada kualitas hasil belajar peserta didik di semua jenjang.

## BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN ARAH PENGEMBANGAN

### A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

#### 1. Landasan filosofis

Penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 berlandaskan pada pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, melekat pada setiap individu sejak lahir, serta menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Sen (2009) melalui *capability approach* yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk memperluas kebebasan dan kemampuan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

Dalam konteks ini pendidikan dipahami bukan semata sebagai layanan publik, melainkan sebagai proses pemanusiaan manusia yang memungkinkan setiap warga, tanpa membedakan latar belakang sosial, geografis, ekonomi maupun budaya, untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pandangan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara.

Secara lebih mendalam, landasan filosofis GDPP menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis pembangunan manusia (*human capital investment*) di Kabupaten Mimika. Teori modal manusia yang dikembangkan oleh Schultz (1961) dan Becker (1993) menegaskan bahwa pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun GDPP Mimika melampaui pendekatan ekonomistik semata dengan menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan karakter, nilai, etos kerja dan kesadaran sosial.

Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas, berdaya tahan dan mampu hidup

bermakna dalam komunitasnya. Dalam konteks Mimika sebagai wilayah dengan keragaman budaya, tantangan geografis yang kompleks, serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang cepat akibat sektor ekstraktif, pendidikan dipandang sebagai instrumen transformasi sosial untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menikmati hasilnya secara berkeadilan (UNESCO, 2021).

Pandangan filosofis GDPP juga menegaskan pendidikan sebagai proses pemberdayaan (*empowerment*), terutama bagi masyarakat lokal dan Orang Asli Papua (OAP). Merujuk pada pemikiran Freire (1970) bahwa pendidikan yang membebaskan harus mendorong peserta didik dan komunitas untuk menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam kerangka ini pendidikan di kabupaten Mimika diarahkan untuk mengurangi kerentanan sosial, memperkuat kemandirian individu dan komunitas, serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial, ekonomi dan budaya. Pendidikan juga berfungsi sebagai medium pelestarian dan penguatan identitas budaya lokal, sehingga proses modernisasi dan pembangunan tidak menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat. Untuk itu GDPP dirancang untuk mendorong hadirnya sistem pendidikan yang kontekstual, inklusif dan sensitif terhadap realitas sosial-budaya di kabupaten Mimika.

Selain berorientasi pada pemberdayaan lokal, landasan filosofis GDPP Kabupaten Mimika berpijak pada gagasan bahwa pendidikan harus membangun kemampuan adaptif dan daya saing global. Perkembangan teknologi, disrupsi dunia kerja dan transformasi ekonomi global menuntut sistem pendidikan yang mampu menyiapkan generasi dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif, serta literasi digital dan numerasi yang kuat. Kerangka *Education 2030* UNESCO dan laporan World Bank (2023) menegaskan bahwa pendidikan abad ke-21 harus berfokus pada penguatan kompetensi transversal dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Dalam konteks kabupaten Mimika pendidikan tidak hanya menjaga kesinambungan budaya dan sosial, tetapi juga membuka

ruang mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi generasi muda untuk berperan dalam ekonomi daerah maupun nasional.

Pada tataran nilai, GDPP memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan integritas, kepedulian sosial, toleransi dan semangat gotong royong. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun masyarakat kabupaten Mimika yang inklusif, harmonis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, menjadi rujukan normatif penting dalam perumusan arah pendidikan daerah. Dengan demikian landasan filosofis GDPP tidak hanya memberikan arah moral dan etis, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan, program dan intervensi pendidikan jangka panjang yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan landasan filosofis GDPP Kabupaten Mimika 2025-2045 menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus mengedepankan keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan dan relevansi kontekstual. Pendidikan diposisikan sebagai motor utama transformasi sosial, penguatan kapasitas manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan landasan ini, GDPP diarahkan untuk mewujudkan Mimika Emas 2045 yang maju, berdaya saing, berkarakter serta mampu memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi bagi masa depan daerah.

## **2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 dibangun di atas kerangka hukum nasional yang mengatur sistem pendidikan, tata kelola pemerintahan daerah, serta perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kekhususan kewilayahan Papua. Kerangka hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap penyusunan GDPP, tetapi juga membuka ruang kebijakan dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk merumuskan arah pembangunan pendidikan jangka panjang yang kontekstual, inklusif dan

berkeadilan. Dalam perspektif tata kelola publik modern, landasan yuridis menjadi instrumen penting untuk menjamin kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan, memperkuat akuntabilitas serta memastikan keselarasan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal (Osborne, 2010; Dwiyanto, 2018).

Pertama, GDPP Kabupaten Mimika berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-undang ini mengamanatkan prinsip pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif dalam merancang strategi pembangunan pendidikan kabupaten Mimika yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan manusia jangka panjang. Dalam literatur kebijakan pendidikan, kerangka Sisdiknas dipahami sebagai instrumen negara untuk menjamin hak pendidikan sekaligus mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan antar wilayah (Tilaar, 2015; UNESCO, 2021).

Kedua, penyusunan GDPP merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan. Ketentuan ini memberikan dasar legal bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, termasuk pengelolaan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitasi partisipasi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, kewenangan ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan lebih responsif terhadap kondisi geografis, sosial dan budaya lokal (Rondinelli & Cheema, 2007; Dwiyanto, 2018).

Ketiga, landasan yuridis GDPP Mimika secara khusus memperhatikan kekhususan Papua sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini

memberikan mandat afirmatif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan, termasuk penguatan kewenangan daerah dalam merancang model pendidikan yang kontekstual berbasis identitas budaya dan kearifan lokal. Selain itu pengaturan Dana Otonomi Khusus memberikan ruang fiskal untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Smith (2012) dan World Bank (2023) menyatakan bahwa dalam kerangka pembangunan inklusif, kebijakan afirmatif sejalan dengan pendekatan *place-based education* dan *indigenous education* yang menekankan relevansi pendidikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat lokal.

Keempat, aspek pembiayaan dan tata kelola pendidikan dalam GDPP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa prioritas program pendidikan dalam GDPP dapat direncanakan, dibiayai, dan dievaluasi secara terukur serta berkelanjutan. World Bank (2018) menyatakan bahwa dalam perspektif *public financial management*, penguatan tata kelola keuangan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan reformasi sektor pendidikan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kelima, landasan mutu pendidikan dalam GDPP Kabupaten Mimika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan delapan standar nasional sebagai rujukan penyelenggaraan pendidikan. Integrasi standar nasional ini menjadi kerangka normatif dalam penyusunan program peningkatan mutu, penguatan tata kelola satuan pendidikan, serta pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Mimika, termasuk wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan pegunungan. Standar nasional diposisikan bukan sebagai instrumen penyeragaman semata, melainkan sebagai batas mutu minimal yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal (Suryadi, 2014; OECD, 2020).

Keenam, dalam konteks percepatan pembangunan Papua, GDPP diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) Tahun 2022-2041. Perpres ini memberikan arah strategis pembangunan Papua berbasis kewilayahan, penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas SDM OAP, serta transformasi tata kelola. Keselarasan GDPP dengan RIP3 memastikan bahwa pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Ketujuh, dari sisi perencanaan pembangunan daerah, GDPP Kabupaten Mimika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri ini memastikan bahwa GDPP terintegrasi secara konsisten dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta dokumen sektoral pendidikan. Prinsip konsistensi, sinkronisasi, berbasis data dan berorientasi hasil (*result-based planning*) menjadi kerangka metodologis dalam seluruh tahapan penyusunan dan implementasi GDPP.

Secara keseluruhan, landasan yuridis GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 merupakan integrasi utuh antara regulasi nasional, kerangka otonomi khusus Papua, standar mutu pendidikan, serta sistem perencanaan pembangunan daerah. Struktur hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menerjemahkan visi pendidikan kabupaten Mimika 2045 ke dalam kebijakan yang sah secara hukum, adaptif terhadap dinamika lokal, serta relevan dengan tantangan pembangunan manusia Papua. Dengan landasan yuridis yang kokoh, GDPP diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

### 3. Landasan sosiologis

Secara sosiologis, Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 memosisikan pendidikan sebagai

proses sosial yang tidak dapat dilepaskan dari struktur, relasi dan dinamika masyarakat setempat. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan tingkat heterogenitas sosial-budaya yang tinggi, ditandai oleh keberadaan komunitas adat utama seperti suku Amungme dan Kamoro, serta berbagai kelompok kekerabatan lokal dan komunitas migran dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki sistem nilai, norma dan cara pandang yang berbeda terhadap pendidikan, baik dalam memaknai fungsi sekolah, pilihan jenjang pendidikan, maupun bentuk dukungan keluarga terhadap proses belajar anak. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks budaya dan struktur sosial masyarakat (Bourdieu, 1986; Tilaar, 2015). Untuk itu GDPP dirancang dengan pendekatan sosiologis agar kebijakan pendidikan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif dan mampu mengakomodasi keragaman kebutuhan sosial-budaya masyarakat kabupaten Mimika.

Selain keragaman budaya, kondisi sosiogeografis Kabupaten Mimika menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang signifikan antara wilayah perkotaan, khususnya Timika dengan wilayah pesisir dan pegunungan yang termasuk kategori daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T). Hambatan transportasi, jarak tempuh yang jauh, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kondisi alam yang menantang berdampak langsung pada tingkat kehadiran peserta didik, ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik, serta keberlangsungan proses pembelajaran.

Dalam literatur pembangunan pendidikan, kesenjangan spasial semacam ini dipahami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial antargenerasi apabila tidak ditangani melalui kebijakan afirmatif (UNESCO, 2021; World Bank, 2023). Untuk itu landasan sosiologis GDPP menegaskan bahwa perencanaan pendidikan Mimika harus memperhitungkan realitas geografis dan sosial secara simultan, sehingga strategi yang dirumuskan benar-benar responsif terhadap konteks lapangan dan tidak hanya berbasis asumsi teknokratis.

Dinamika ekonomi sektoral juga menjadi elemen penting dalam kerangka sosiologis pembangunan pendidikan kabupaten Mimika. Kehadiran industri pertambangan berskala internasional, pertumbuhan sektor jasa, serta tingginya mobilitas penduduk dari dalam dan luar Papua telah membentuk struktur sosial baru yang memengaruhi orientasi pendidikan masyarakat. Di satu sisi, aktivitas ekonomi tersebut membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan keterampilan karena keterbatasan akses pendidikan menengah dan vokasi yang relevan bagi masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam perspektif *human capital development*, pendidikan berperan sebagai mekanisme utama untuk menyelaraskan kapasitas manusia dengan kebutuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan identitas budaya dan kohesi sosial (Becker, 1993; OECD, 2020). Atas dasar itu GDPP menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani dinamika ekonomi Mimika dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat lokal secara berkeadilan.

Integrasi perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis dalam GDPP menjadi prasyarat agar arah kebijakan pendidikan tidak hanya sah secara hukum dan kuat secara teknokratis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Pendekatan sosiologis memastikan bahwa setiap strategi dan program pendidikan disusun dengan mempertimbangkan penerimaan sosial, relevansi kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan tata nilai lokal. Dalam praktiknya, GDPP Mimika dirancang sebagai dokumen kebijakan yang bersifat normatif (berbasis regulasi dan prinsip pendidikan nasional), empiris (berlandaskan data dan kondisi riil), serta partisipatif dengan melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, perempuan, pemuda dan komunitas lokal. Pendekatan ini menurut Bray (2013) dan Dwiyanto (2018) sejalan dengan paradigma *community-based education governance* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pendidikan.

Lebih jauh landasan sosiologis GDPP juga menghubungkan tujuan pendidikan daerah dengan komitmen nasional dan global. Penyusunan

GDPP diselaraskan dengan *Sustainable Development Goal 4 (SDG-4)* tentang Pendidikan Berkualitas dan Agenda Pendidikan 2030, yang menekankan prinsip inklusivitas, pemerataan dan pembelajaran sepanjang hayat. Penyelarasan ini dilakukan tanpa menghilangkan keunikan sosial-budaya Mimika, sehingga kemajuan pendidikan tetap berakar pada identitas lokal dan memperkuat jati diri masyarakat. Dengan demikian pendidikan di kabupaten Mimika tidak hanya menjadi sarana mobilitas sosial dan peningkatan daya saing, tetapi juga instrumen pelestarian nilai budaya dan penguatan kohesi sosial (UNESCO, 2020).

Secara keseluruhan integrasi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis menjadi kompas normatif dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, strategi serta indikator kinerja GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045. Dokumen GDPP ini dirancang agar implementasinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif melalui kerangka hukum yang jelas, serta secara sosial melalui penerimaan dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, GDPP Kabupaten Mimika hadir sebagai dokumen pembangunan pendidikan yang sah, kontekstual, inklusif dan berorientasi jangka panjang dalam membangun kualitas manusia Mimika menuju era 2045.

## **B. Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan Pendidikan**

### **1. Prinsip pembangunan pendidikan**

#### **a. Keterpaduan**

Kebijakan pendidikan kabupaten Mimika harus terintegrasi dengan sektor lain (kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat) untuk menghasilkan dampak pembangunan manusia yang komprehensif. Keterpaduan ini mengharuskan mekanisme koordinasi lembaga dan alur penganggaran lintas sektor.

#### **b. Keadilan dan pemerataan**

Semua anak dan warga kabupaten Mimika berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi geografis, ekonomi atau budaya. Pemerataan menjadi tolok ukur prioritas alokasi sumber daya dan

intervensi afirmatif yang inklusif untuk wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil).

c. Kontekstualitas

Kurikulum, metode pembelajaran dan program vokasi harus relevan dengan kondisi lokal kabupaten Mimika yang menghargai kearifan budaya, potensi ekonomi wilayah (perikanan, pertanian pesisir, pertambangan terintegrasi), serta karakter komunitas adat. Prinsip ini menjamin relevansi dan keberlanjutan pembelajaran.

d. Akuntabilitas dan transparansi

Tata kelola penganggaran, manajemen sekolah dan pelaporan kinerja layanan pendidikan kabupaten Mimika harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mendorong penggunaan data sebagai dasar perencanaan dan mekanisme evaluasi berkala.

e. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Pembangunan pendidikan kabupaten Mimika dikembangkan bersama komunitas lokal, organisasi agama, LSM, dunia usaha dan pihak adat sehingga kepemilikan program meningkat dan intervensi lebih efektif.

f. Inovasi dan keberlanjutan

GDPP kabupaten Mimika mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna, model pembelajaran inovatif, serta strategi pembiayaan yang ramah lingkungan dan tahan uji terhadap perubahan demografi dan ekonomi jangka panjang.

## 2. Nilai-nilai dasar pembangunan pendidikan

Nilai-nilai dasar pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika merupakan fondasi moral, sosial dan kultural yang menjiwai seluruh kebijakan, program serta praktik penyelenggaraan pendidikan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan sistem pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berkarakter, berintegritas dan berdaya guna bagi masyarakat.

a. Kepedulian sosial

Nilai kepedulian sosial menjadi landasan utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks

kabupaten Mimika, kepedulian sosial diwujudkan melalui perhatian terhadap kelompok rentan seperti anak-anak di pedalaman dan daerah terpencil pada wilayah pesisir dan daerah terpencil. Nilai ini mendorong semua pihak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat untuk bekerjasama dalam memperluas akses dan kesempatan belajar tanpa diskriminasi.

b. Penghormatan terhadap budaya lokal

Nilai penghormatan terhadap budaya lokal menjadi roh pendidikan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat kabupaten Mimika. Nilai ini memastikan bahwa sistem pendidikan tidak tercerabut dari akar budaya dan identitas komunitas. Melalui pengintegrasian bahasa, tradisi dan pengetahuan lokal dalam kurikulum maupun kegiatan sekolah, pendidikan di kabupaten Mimika diharapkan menjadi wahana pelestarian sekaligus transformasi budaya menuju kemajuan yang berkeadilan.

c. Integritas publik

Nilai integritas publik menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Nilai ini mengarahkan penyelenggaraan kebijakan agar bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Dengan integritas yang kuat, pendidikan dapat menjadi pilar utama pembangunan sosial yang berkelanjutan.

d. Semangat gotong royong

Nilai semangat gotong royong menjadi kekuatan sosial khas bangsa Indonesia yang sangat relevan dalam konteks kabupaten Mimika. Prinsip ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas adat, organisasi keagamaan dan dunia usaha dalam membangun pendidikan yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman. Gotong royong juga memperkuat solidaritas sosial serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Keempat nilai tersebut (kepedulian sosial, penghormatan terhadap budaya lokal, integritas publik dan gotong royong) tidak hanya menjadi pedoman etik, tetapi juga diinternalisasikan dalam setiap tataran kebijakan pendidikan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik, serta tata kelola kelembagaan yang transparan dan partisipatif.

Dengan demikian pendidikan di Kabupaten Mimika diarahkan tidak hanya untuk mencetak insan cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter kuat, menghargai keberagaman dan berkomitmen terhadap kemajuan sosial masyarakatnya. Nilai-nilai dasar ini menjadi jangkar moral dan spiritual bagi terwujudnya Generasi Emas Mimika 2045 yang unggul, berdaya saing, serta berakar kuat pada jati diri dan berbasis kearifan lokal.

### **C. Kerangka Konseptual GDPP dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kerangka konseptual Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika memadukan empat (4) dimensi utama: akses, mutu, relevansi dan tata kelola. Keempat dimensi ini dijadikan pilar operasional yang saling terkait dan dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, indikator serta program intervensi jangka pendek, menengah dan panjang.

Secara hirarkis GDPP merupakan dokumen sektoral yang mengoperasionalkan visi jangka panjang daerah. Dokumen ini harus selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) serta menjadi basis teknis bagi perumusan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada setiap periode pemerintahan. Kesesuaian ini menjaga kesinambungan kebijakan hingga tahun target strategis daerah.

Kerangka konseptual GDPP Kabupaten Mimika disusun sebagai landasan berpikir yang sistematis dan terintegrasi untuk merumuskan kebijakan, program, serta strategi intervensi pendidikan jangka panjang. Kerangka ini memastikan bahwa keseluruhan perencanaan didasarkan pada analisis yang obyektif, diarahkan oleh visi pembangunan nasional dan

daerah, serta dilengkapi mekanisme implementasi dan pengawasan yang terukur.

Secara menyeluruh kerangka konseptual mencakup empat (4) komponen utama sebagai berikut:

1. Analisis situasi berbasis data demografis dan pendidikan menjadi titik awal dalam memahami kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mimika. Analisis ini meliputi dinamika kependudukan, distribusi usia sekolah, karakteristik wilayah, tingkat partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran serta kapasitas kelembagaan pendidikan.

Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan layanan, kelompok rentan dan tantangan struktural yang memerlukan penanganan khusus. Dengan pemahaman yang berbasis bukti perumusan kebijakan dapat diarahkan secara lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan wilayah.

2. Arah kebijakan strategis dirumuskan agar selaras dengan sasaran pembangunan pendidikan nasional, khususnya RPJPN 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah Papua Tengah, serta konsisten dengan prioritas RPJPD dan RPJMD Kabupaten Mimika.

Arah kebijakan ini menekankan transformasi layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan, serta menguatkan integrasi aspek budaya lokal, inovasi pembelajaran dan tata kelola partisipatif. Dengan keselarasan tersebut, GDPP Mimika berfungsi sebagai dokumen operasional yang mendukung pencapaian target jangka panjang pembangunan manusia daerah.

3. *Roadmap* program dan intervensi berskala wilayah disusun untuk memberikan panduan implementatif yang konkret dan terukur. *Roadmap* ini memetakan tahapan pembangunan pendidikan berdasarkan segmentasi wilayah pesisir, dataran rendah dan pegunungan, serta perkotaan dan pedalaman sehingga setiap strategi dapat disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial dan budaya setempat.

Intervensi yang dirancang mencakup pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, penataan sarana

prasarana, serta inovasi model layanan berbasis komunitas. Pendekatan tersegmentasi ini memastikan efektivitas program dan pemerataan hasil pembangunan pendidikan secara berkelanjutan.

4. Sistem pemantauan dan evaluasi dikembangkan untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan GDPP. Sistem ini memuat indikator kinerja yang terukur, mekanisme pelaporan berbasis data, serta prosedur evaluasi berkala yang memungkinkan penyesuaian kebijakan secara dinamis.

Indikator kinerja mencakup aspek akses, mutu, relevansi, tata kelola dan kontribusi terhadap pembangunan manusia. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa implementasi GDPP berjalan sesuai target, efektif dalam penggunaan sumber daya, serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan landasan empat komponen tersebut, kerangka konseptual GDPP Mimika tidak hanya memberikan arah kebijakan jangka panjang, tetapi juga membangun sistem perencanaan pendidikan yang adaptif, terukur dan berbasis bukti. Struktur ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan bonus demografi, memperkuat ketahanan sosial serta mewujudkan pembangunan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Mimika.

GDPP juga dirancang untuk berintegrasi dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan agenda strategis daerah seperti GERBANG EMAS, sehingga kebijakan pendidikan turut berkontribusi pada pengelolaan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi program pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen GDPK dan RPJMD menjadi rujukan penting untuk memastikan sinkronisasi program.

Pada tataran implementasi, hubungan antar dokumen diwujudkan melalui mekanisme penganggaran terarah (APBD) dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pendidikan yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini memastikan program GDPP memiliki alokasi anggaran dan penanggung jawab operasional yang jelas. Kerangka konseptual menekankan bahwa efektivitas pencapaian tujuan bergantung pada proses harmonisasi dokumen

perencanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan adaptasi kebijakan berdasarkan evaluasi berkala dan perubahan konstelasi sosial-ekonomi daerah.

#### D. Pendekatan Berbasis Data, Konteks Wilayah dan Kolaborasi

GDPP Kabupaten Mimika menerapkan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) sebagai prinsip utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan pendidikan. Setiap keputusan didasarkan pada data baseline yang valid, mencakup kondisi demografi, peta sebaran satuan pendidikan, capaian belajar, sarana prasarana serta ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Pendekatan ini memastikan alokasi sumber daya berlangsung secara tepat sasaran, selaras dengan rekomendasi berbagai studi internasional tentang efisiensi kebijakan pendidikan.

Gambar 3.1 Pendekatan Berbasis Data, Konteks Wilayah dan Kolaborasi



Sumber: Desain Tim PSK, 2025

Selanjutnya, konteks kewilayahan menjadi faktor penentu dalam desain intervensi. Kabupaten Mimika memiliki Kawasan perkotaan, pinggiran dan pedalaman, dengan keragaman geografis wilayah pesisir, dataran dan pegunungan yang masing-masing memerlukan solusi berbeda. Karena itu GDPP

mengembangkan paket kebijakan spesifik wilayah, seperti penyediaan transportasi pendidikan dan layanan asrama bagi daerah yang sulit dijangkau, penguatan vokasi kelautan di kawasan pesisir, serta program pengembangan keterampilan bagi kawasan pinggiran perkotaan yang sedang tumbuh.

Dalam mendukung kualitas perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi ditempatkan sebagai instrumen kunci untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Sistem data pendidikan yang terintegrasi digunakan untuk menguatkan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, memfasilitasi pemantauan secara *real-time*, serta mendukung model pembelajaran *hybrid* atau daring. Meskipun demikian, GDPP tetap menekankan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan listrik dan peningkatan kapasitas pengguna di tingkat sekolah dan komunitas.

Untuk menjamin efektivitas implementasi, GDPP mengusung pendekatan kolaboratif melalui model *multi-stakeholder partnership*. Pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, lembaga adat, gereja, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan mitra pembangunan berperan sebagai bagian dari aliansi tata kelola pendidikan. Kolaborasi ini tidak hanya berwujud koordinasi administratif, tetapi juga penyatuan perencanaan, pendanaan, dan evaluasi lintas pihak.

Mekanisme operasional kolaborasi dikembangkan melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penyusunan perjanjian kerja sama untuk program vokasi dan magang, pelaksanaan program CSR dunia usaha secara terarah, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan kurikulum kontekstual. Melalui kerja bersama yang terstruktur ini, GDPP memastikan bahwa inovasi dan program yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lokal dan memiliki dukungan terpadu dari pemangku kepentingan yang luas.

Pendekatan yang menyatukan data yang kuat, pemahaman konteks wilayah dan kolaborasi strategis tersebut membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai. Untuk itu GDPP memasukkan agenda penguatan institusi pendidikan daerah, khususnya dalam kemampuan analisis data, fasilitasi

kemitraan dan pengelolaan program berbasis hasil. Dengan demikian, pelaksanaan GDPP tidak hanya bergerak efektif di lapangan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### **E. Peran Serta Masyarakat (PSM)**

Peran serta masyarakat (PSM) merupakan fondasi yang memastikan keberlanjutan, relevansi dan keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Mimika. Dalam konteks sosial yang majemuk dan wilayah yang tersebar antara kawasan perkotaan, pinggiran dan pedalaman serta daerah 3T, pada wilayah pesisir, dataran dan pegunungan, keterlibatan masyarakat menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya direncanakan dari atas, tetapi juga tumbuh dari kebutuhan, pengalaman dan aspirasi komunitas lokal. Untuk itu PSM dalam GDPP kabupaten Mimika dipahami sebagai proses kolaboratif yang mencakup keluarga, komunitas adat, organisasi keagamaan, kelompok perempuan dan pemuda, LSM, serta dunia usaha yang bersama-sama berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pendidikan.

Dalam pelaksanaannya bentuk partisipasi yang diharapkan bersifat beragam, mulai dari dukungan berbasis sumber daya komunitas hingga kontribusi pada penguatan tata kelola. Penyediaan fasilitas lokal seperti ruang belajar komunitas, balai adat atau rumah ibadah sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan literasi dan pendidikan informal merupakan bentuk dukungan nyata dari masyarakat. Selain itu keterlibatan mentor lokal, tokoh adat, agama, perempuan dan relawan pemuda dalam kegiatan ekstrakurikuler budaya dan literasi turut memperkuat pendidikan berbasis identitas dan kearifan lokal. Partisipasi masyarakat juga diwujudkan melalui pengawasan partisipatif terhadap manajemen sekolah, serta masukan mereka dalam penyusunan kurikulum kontekstual yang mencerminkan nilai, sejarah dan praktik budaya setempat.

GDPP kabupaten Mimika menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diposisikan sekadar sebagai penerima manfaat program pendidikan, melainkan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu mekanisme

partisipasi formal seperti Musrenbang tingkat kampung, kelurahan dan distrik, forum konsultasi publik dan pertemuan komunitas harus diperkuat agar aspirasi lokal benar-benar menjadi dasar penetapan prioritas anggaran dan program pendidikan. Penguatan forum ini juga memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terlibat untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara setara.

Dunia usaha terutama sektor pertambangan dan jasa yang berkembang pesat di kabupaten Mimika, memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan SDM lokal. Untuk itu kontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perlu diformalkan dan diselaraskan dengan prioritas pendidikan daerah. Dukungan tersebut dapat berupa beasiswa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan pelatihan vokasi, hingga pembukaan peluang magang dan penempatan kerja bagi siswa SMK dan lulusan muda. Kolaborasi yang terarah dengan sektor usaha akan memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan meningkatkan peluang mobilitas sosial masyarakat.

Penguatan kapasitas masyarakat menjadi prasyarat penting efektivitas PSM. Hal ini mencakup pelatihan bagi komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah, peningkatan literasi data bagi kelompok pengawas masyarakat, serta fasilitasi komunikasi antara komunitas dan pemerintah daerah untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan kapasitas yang lebih kuat, masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna, kritis dan berkelanjutan dalam seluruh proses pembangunan pendidikan.

GDPP kabupaten Mimika juga menekankan bahwa PSM harus bersifat inklusif. Kelompok rentan seperti perempuan di daerah terpencil, penyandang disabilitas, keluarga migran dan anak-anak dari komunitas minoritas budaya harus difasilitasi agar mereka memiliki ruang yang setara dalam proses partisipasi. Untuk itu mekanisme kelembagaan yang menampung dan mengarusutamakan suara kelompok rentan perlu dirancang secara jelas dalam pedoman pelaksanaan GDPP.

Dengan demikian PSM dipandang sebagai pilar strategis yang tidak hanya mendukung implementasi program, tetapi juga menjadi elemen yang memastikan pendidikan di kabupaten Mimika tetap relevan, responsif terhadap

konteks lokal dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat secara aktif, terstruktur dan berkelanjutan menjadikan GDPP sebuah dokumen yang hidup, diterima oleh komunitas dan mampu mewujudkan transformasi pendidikan yang menyeluruh hingga tahun 2045.

## BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. Visi dan Misi

Visi pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika disusun untuk memberikan arah jangka panjang yang menyeluruh, berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal. Visi tersebut menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia Mimika, dengan penekanan pada kualitas, pemerataan layanan, relevansi sosial-budaya serta kesiapan generasi muda menghadapi transformasi ekonomi daerah yang dipengaruhi aktivitas pertambangan, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Visi Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika 2025-2045 dirumuskan sebagai:

**“TERWUJUDNYA EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG INKLUSIF, BERMUTU, BERKEADILAN DAN BERAKAR BUDAYA LOKAL UNTUK MENGHASILKAN SDM BERKARAKTER, KOMPETEN, PRODUKTIF, TANGGUH DAN BERDAYA SAING MENUJU MIMIKA EMAS 2045”**

Visi dimaknai sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Mimika untuk:

1. Membangun pendidikan sebagai sistem yang menyeluruh, terbuka dan adaptif terhadap keragaman sosial, budaya serta kondisi obyektif geografis wilayah
2. Inklusif berarti seluruh warga tanpa terkecuali termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas
3. Bermutu dan berkeadilan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran, tenaga pendidik, dan sarana prasarana harus berjalan seiring dengan pemerataan layanan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antar kelompok maupun antar wilayah
4. Berakar pada budaya lokal menempatkan nilai, pengetahuan dan praktik hidup masyarakat Mimika sebagai fondasi pembelajaran, agar pendidikan tidak terlepas dari identitas dan konteks sosial setempat.

Integrasi visi ini dalam pembangunan SDM Mimika diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, kompeten, produktif dan berdaya saing sebagai prasyarat utama menuju Mimika Emas 2045. Pendidikan tidak hanya difungsikan sebagai sarana peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, etos kerja, dan jati diri lokal yang kuat.

Melalui keterpaduan antara pendidikan formal, nonformal, peran serta masyarakat, serta dukungan dunia usaha dan industri, pembangunan SDM Mimika diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, memanfaatkan bonus demografi, dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat secara berkelanjutan. Visi ini menjadi pengarah strategis karena menyatukan kebijakan, program dan kolaborasi lintas sektor dalam satu tujuan besar transformasi pendidikan sebagai penggerak utama kemajuan Mimika.

Visi tersebut sejalan dengan RPJPN 2025-2045, *SDG-4, Education 2030 Framework for Action*, serta arahan pembangunan Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus. Keselarasan ini memastikan bahwa agenda lokal Kabupaten Mimika terhubung dengan arah nasional dan global tanpa kehilangan keunikan identitas dan kebutuhan wilayah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan lima (5) misi utama GDPP kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan pada semua jenjang melalui pembangunan infrastruktur, layanan transportasi, sekolah kecil dan layanan pendidikan berbasis komunitas bagi wilayah pesisir dan pegunungan, serta kampung pedalaman dan daerah terpencil (3T).
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan bahan ajar yang relevan, perbaikan proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang adaptif terhadap kondisi wilayah.
3. Memperkuat tata kelola dan manajemen pendidikan daerah agar efektif, transparan dan berbasis data, termasuk peningkatan kapasitas OPD pendidikan, sekolah dan jejaring mitra.

4. Menjamin inklusivitas dan sensitivitas sosial-budaya dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat, bahasa lokal, identitas kultural dan praktik-praktik komunitas Papua ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.
5. Membangun kemitraan multi-pihak dengan keluarga, gereja, organisasi perempuan, pemuda, dunia usaha serta lembaga adat untuk memperkuat peran bersama dalam mendukung layanan pendidikan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika diarahkan untuk menghasilkan kualitas manusia yang tangguh, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi, serta memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan daerah yang terus berkembang. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan wilayah, memperkuat kohesi sosial dan mempersiapkan generasi muda menghadapi peluang Bonus Demografi menuju perwujudan Generasi Emas Mimika Tahun 2045.

Tujuan strategis GDPP Kedudukan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 mencakup:

1. Meningkatkan akses pemerataan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak usia sekolah, termasuk kelompok rentan seperti anak perempuan di wilayah pedalaman, anak penyandang disabilitas, komunitas migran dan anak dari keluarga miskin.
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran sesuai standar nasional dan rekomendasi literasi-numerasi internasional
3. Mewujudkan pemerataan distribusi tenaga pendidik melalui kebijakan afirmasi, insentif wilayah khusus dan peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan sekolah.
4. Meningkatkan relevansi pendidikan vokasi agar sesuai kebutuhan pasar kerja lokal seperti industri tambang, konstruksi, logistik, perikanan, pertanian modern, pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan melalui manajemen berbasis data, tata kelola kolaboratif dan peningkatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 yang lebih operasional yaitu:

1. Peningkatan APS PAUD/TK, SD, SMP dan SMA/SMK, khususnya pada distrik dengan capaian rendah
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada seluruh satuan pendidikan
3. Penurunan disparitas capaian belajar antar kawasan perkotaan, pinggiran-pedalaman pada wilayah ekologi pesisir, dataran dan pegunungan
4. Peningkatan angka partisipasi SMA dan SMK berbasis kompetensi industri
5. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah dan tenaga pendidik dalam pembelajaran diferensiasi serta asesmen formatif.
6. Tercapainya integrasi penuh Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang valid dengan sistem perencanaan daerah.

### **C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan**

Arah kebijakan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 menjadi rujukan untuk menetapkan prioritas pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Perumusan kebijakan ini memperhatikan karakteristik geografi, demografi, dinamika ekonomi, struktur sosial, serta kebutuhan masa depan penduduk Mimika.

#### **1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. Pemerataan akses dengan prioritas pada distrik pesisir dan pegunungan melalui pembangunan sekolah kecil, perluasan layanan PAUD/TK, penambahan tenaga pendidik dan dukungan transportasi pendidikan
- b. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pelatihan tenaga pendidik, kurikulum kontekstual kabupaten Mimika, digitalisasi pembelajaran dan penyediaan sarana pembelajaran modern
- c. Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal sebagai bagian integral dari kurikulum dan aktivitas sekolah

- d. Pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan struktur ekonomi lokal serta orientasi masa depan
- e. Penguatan tata kelola berbasis data dan perencanaan yang terukur serta akuntabel.

## 2. Strategi pembangunan pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan melalui GDPP Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 mengintegrasikan pendekatan struktural, teknis dan kultural sebagai berikut:

- a. Transformasi layanan pendidikan melalui penyediaan model sekolah satelit, sekolah berasrama sesuai ekologi lokal dan *mobile teacher program* bagi wilayah sulit.
- b. Penguatan tenaga pendidik melalui program peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan dan skema redistribusi berbasis kebutuhan sekolah.
- c. Digitalisasi pendidikan dengan membangun infrastruktur teknologi informasi, platform belajar daring dan pemanfaatan sistem informasi untuk manajemen pendidikan.
- d. Kemitraan multi-stakeholder dengan gereja, lembaga adat, lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha (CSR) dan organisasi masyarakat.
- e. Reformasi anggaran pendidikan agar lebih efektif, transparan dan berbasis kebutuhan riil sekolah.

## D. Fokus Prioritas dan Program Unggulan

Berdasarkan analisis situasi Kabupaten Mimika, empat fokus prioritas dikembangkan sebagai fondasi implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 sebagai berikut:

### 1. Pemerataan Akses dan Layanan Dasar Pendidikan

Program unggulannya meliputi:

- a. Pembangunan dan revitalisasi sekolah kecil di kampung terpencil
- b. Program “Transportasi Pendidikan Terpadu” (perahu sekolah, motor sekolah dan transportasi darat)

- c. Pendirian sekolah berbasis komunitas dengan dukungan tenaga pendidik kontrak daerah
- d. Pengembangan PAUD holistik integrative dengan sekolah kampung

## 2. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Program unggulan:

- a. Gerakan Literasi Mimika (GLM) yang terintegrasi dengan budaya baca kampung melalui pendekatan sekolah kampung berbasis kontekstual
- b. Penyediaan laboratorium mini IPA, bahasa dan komputer untuk sekolah dasar dan menengah
- c. Pelatihan tenaga pendidik berbasis *microcredential* dan *coaching clinic*
- d. Program Sekolah Kontekstual Mimika berbasis budaya dan ekologi lingkungan lokal.

## 3. Penguatan Vokasi dan Kesiapan Kerja

Program unggulan:

- a. Vokasi tambang dan industri lokal bekerjasama dengan perusahaan industri besar
- b. Pusat pelatihan (*training center*) untuk keterampilan logistik, perbengkelan, listrik, mekanik dan perikanan
- c. Kemitraan magang industri dengan dunia usaha.
- d. Inkubasi kewirausahaan muda berbasis potensi sumber daya pesisir, hutan dan ekonomi kreatif.

## 4. Tata Kelola, Data dan Kolaborasi

Program unggulan:

- a. Sistem Informasi Pendidikan Mimika Terintegrasi
- b. Forum koordinasi lintas OPD pendidikan daerah
- c. Penguatan kapasitas manajemen sekolah dan supervisi pembelajaran
- d. Pengelolaan CSR pendidikan yang responsive secara terarah, terukur dan berkelanjutan

## E. Integrasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Integrasi nilai budaya dan kearifan lokal adalah identitas utama pendidikan Mimika dan menjadi pembeda dari desain pembangunan daerah

lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO tentang *culturally responsive education* dan prinsip pendidikan kontekstual Indonesia.

1. Pertama, kearifan lokal dimasukkan ke dalam kurikulum melalui tema budaya, bahasa daerah, sejarah lokal, keunggulan ekologis kabupaten Mimika dan praktik-praktik adat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan narasi lokal, tokoh masyarakat, serta tradisi lisan yang menjadi warisan budaya kabupaten Mimika.
2. Kedua, kegiatan sekolah menekankan pembentukan karakter melalui nilai-nilai dasar seperti gotong-royong, solidaritas komunitas, tata krama adat dan penghormatan terhadap alam. Nilai-nilai ini dipraktikkan melalui kegiatan sekolah, pembelajaran proyek, upacara adat dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis seni budaya
3. Ketiga, kearifan lokal digunakan sebagai landasan pedagogi, misalnya pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan pesisir, pegunungan, sungai, hutan, serta tradisi ekonomi masyarakat seperti perikanan atau kerajinan. Penggunaan konteks lokal terbukti meningkatkan relevansi pembelajaran, motivasi belajar dan keterlibatan peserta didik
4. Keempat, integrasi nilai budaya menjadi alat untuk memperkuat identitas, membangun kohesi sosial, serta mengurangi risiko marginalisasi budaya lokal di tengah perubahan ekonomi yang cepat.

Dengan demikian Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 tidak hanya menjadi wahana pembentukan pengetahuan, tetapi juga ruang reproduksi nilai, jatidiri, serta kekuatan sosial masyarakat kabupaten Mimika. Dalam konteks tantangan bonus demografi menuju 2045, pendidikan harus mampu melahirkan generasi usia produktif yang memiliki kompetensi, etos kerja, serta karakter budaya lokal yang kuat untuk menjawab dinamika pasar kerja. Hal ini menjadi krusial mengingat Mimika menghadapi persaingan ketat tenaga kerja pada sektor pertambangan, industri penunjang tambang, serta berbagai sektor ekonomi berbasis jasa dan kreativitas yang terus berkembang.

Untuk itu melalui GDPP kabupaten Mimika tahun 2025-2045 mengharuskan terbangunnya ekosistem kolaboratif antar pemangku

kepentingan pemerintah daerah, lembaga pendidikan formal dan nonformal, industri pertambangan dan dunia usaha, lembaga keagamaan, tokoh adat, komunitas, serta keluarga sebagai pusat pendidikan pertama untuk memastikan bahwa investasi pendidikan tidak hanya mencetak angkatan kerja yang kompetitif secara teknis, tetapi juga bermartabat, beridentitas budaya lokal, dan mampu berperan sebagai penggerak transformasi ekonomi dari kampung ke kota. Dengan kolaborasi ini pendidikan menjadi sarana strategis untuk memastikan masyarakat kabupaten Mimika tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi pertambangan dan sektor ekonomi masa depan.

**BAB V**  
**RENCANA AKSI DAN PETA JALAN (ROADMAP) GDPP 2025-2045**

**A. Prioritas dan Target Pembangunan**

**1. Prioritas Pertama: Akses dan Pemerataan Layanan Dasar Pendidikan**

Pemenuhan layanan dasar pendidikan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Mimika. Kondisi geografis Mimika yang luas, terutama pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan pada kawasan pinggiran dan pedalaman yang terisolasi, menghadirkan tantangan serius terhadap ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang layak. Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar, memiliki bangunan rusak, atau beroperasi dalam kondisi tidak aman dan tidak ramah belajar.

Di sisi lain peserta didik dari kampung-kampung terpencil memerlukan dukungan tempat tinggal serta akses transportasi yang memadai untuk dapat bersekolah secara berkelanjutan. Situasi ini menegaskan pentingnya menetapkan prioritas pemenuhan layanan dasar pendidikan sebagai langkah strategis untuk membangun ruang-ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermutu, sekaligus memastikan bahwa setiap anak di seluruh wilayah Mimika memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa terhalang oleh jarak maupun keterbatasan infrastruktur.

**Tabel 5.1 Target Akses dan Pemerataan Layanan Dasar Pendidikan**

No	Sasaran	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Target 2030
1.	Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana	Pembangunan ruang kelas, asrama, toilet, laboratorium, dan perpustakaan	Jumlah ruang kelas baru; persentase sekolah layak fungsi	Dinas Pendidikan, PUPR, Pemerintah Distrik	≥ 85% sekolah layak fungsi
2.	Akses pendidikan bagi wilayah ekologi pesisir dan pegunungan pada kampung pinggiran dan pedalaman	Penyediaan transportasi pendidikan	Penyediaan perahu sekolah, bus sekolah, dan subsidi transport	Jumlah moda transportasi operasional	Dinas Pendidikan, Perhubungan, Distrik	20-30 unit moda transportasi pendidikan
3.	Penuntasan anak tidak sekolah (ATS)	Layanan pendidikan nonformal dan informal	Program Paket A/B/C, penyuluhan keluarga	Penurunan jumlah ATS	Dinas Pendidikan, PKBM	ATS turun ≥ 50%
4.	Perluasan layanan PAUD terintegrasi sekolah kampung	Penguatan PAUD berbasis komunitas	Pembentukan PAUD terintegrasi sekolah kampung, pelatihan tenaga pendidik PAUD	APK PAUD	Dinas Pendidikan, Lembaga Keagamaan	APK PAUD ≥ 85%

Sumber: Hasil FGD, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perluasan akses pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Mimika menjadi prioritas utama untuk menjawab ketimpangan layanan di kawasan pinggiran, pedalaman dan terisolasi pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan. Upaya ini dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi pembangunan ruang kelas baru, asrama bagi peserta didik dari kampung jauh, fasilitas sanitasi seperti toilet sekolah, laboratorium pembelajaran, serta perpustakaan yang memadai. Indikator kinerjanya diukur melalui peningkatan jumlah ruang kelas yang berhasil dibangun dan persentase sekolah yang mencapai standar kelayakan fungsi, sehingga seluruh anak usia sekolah dan atau peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman dan layak.

Untuk menjangkau kampung-kampung di wilayah ekologi pesisir dan pegunungan yang memiliki hambatan geografis berat, pemerintah daerah menetapkan penyediaan transportasi pendidikan sebagai program prioritas. Kegiatan utama mencakup pengadaan perahu sekolah bagi komunitas sungai dan pesisir, bus sekolah untuk wilayah dataran dan jalan darat, serta skema subsidi transport bagi siswa dan tenaga pendidik yang harus menempuh perjalanan jauh. Efektivitas program ini dinilai melalui jumlah moda transportasi operasional yang mampu berfungsi secara reguler guna memastikan keberlangsungan kehadiran peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah.

Penuntasan anak tidak sekolah (ATS) merupakan agenda strategis lainnya mengingat masih terdapat anak usia sekolah di kabupaten Mimika yang belum terjangkau layanan pendidikan formal. Upaya ini dijalankan melalui layanan pendidikan nonformal antara lain penyelenggaraan Program Paket A, B dan Paket C, serta pendidikan informal melalui kegiatan penyuluhan keluarga untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Keberhasilan program ini diukur melalui penurunan signifikan jumlah ATS setiap tahunnya, sehingga semakin banyak anak usia sekolah di kabupaten Mimika yang memperoleh akses pendidikan sesuai hak dasar mereka.

Perluasan layanan PAUD berbasis komunitas juga menjadi prioritas untuk memastikan tumbuh kembang anak usia dini berlangsung optimal dan berkelanjutan, terutama pada kampung-kampung yang jauh dari pusat layanan. Program ini dijalankan melalui penguatan PAUD terintegrasi dengan pendekatan sekolah kampung, termasuk pembentukan unit PAUD baru, penyediaan sarana sederhana berbasis lokal, serta pelatihan tenaga pendidik PAUD. Indikator capaian yang digunakan adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini di Kabupaten Mimika memperoleh layanan pendidikan awal yang berkualitas.

## **2. Prioritas Kedua: Kualitas dan Relevansi Pembelajaran**

Peningkatan mutu pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Mimika dalam upaya memperkecil kesenjangan kualitas layanan pendidikan dan proses pembelajaran antara kawasan perkotaan, pinggiran dan pedalaman pada wilayah ekologi pesisir, dataran dan pegunungan. Meskipun saat ini akses pendidikan terus diperluas, namun kualitas proses belajar mengajar masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang dipengaruhi oleh pemerataan distribusi dan keterbatasan kompetensi tenaga pendidik (terutama tenaga pendidik eksata dan matematika), keberadaan tenaga pendidik pada daerah pinggiran dan pedalaman, minimnya pemanfaatan teknologi pendidikan, serta belum optimalnya kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran berbasis konteks lokal.

Kondisi ini berdampak pada ketimpangan hasil belajar antar-wilayah dan kurangnya relevansi pembelajaran dengan realitas sosial-budaya masyarakat Mimika. Untuk itu prioritas kedua difokuskan pada penguatan kapasitas tenaga pendidik, integrasi teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, dan pengembangan kurikulum kontekstual berbasis kearifan lokal. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik dimanapun mereka tinggal, memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, relevan dan mampu menyiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 5.2 Target Kualitas dan Relevansi Pembelajaran

No	Sasaran	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Target 2035
1.	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	Pengembangan profesionalisme tenaga pendidik	Pelatihan kompetensi, MGMP, supervisi akademik	Persentase tenaga pendidik tersertifikasi; nilai UKG	Dinas Pendidikan	≥ 80% tenaga pendidik tersertifikasi
2.	Penguatan literasi dan numerasi	Gerakan literasi daerah	Penyediaan bahan bacaan, pelatihan tenaga pendidik literasi, festival literasi	Capaian literasi dan numerasi	Dinas Pendidikan, Sekolah	Mencapai standar nasional
3.	Integrasi TIK dalam pembelajaran	Digitalisasi sekolah	Penyediaan internet sekolah, LMS, pengadaan perangkat TIK	Persentase sekolah terhubung internet	Kominfo, Dinas Pendidikan	≥ 90% sekolah
4.	Pembelajaran kontekstual	Kurikulum berbasis budaya dan ekologi lokal kabupaten Mimika	Modul pembelajaran lokal, muatan lokal Mimika	Jumlah sekolah menerapkan kurikulum lokal	Dinas Pendidikan, LMA, Gereja	≥ 70% sekolah

Sumber: Hasil FGD, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Mimika diarahkan melalui program pengembangan profesionalisme yang menekankan pelatihan kompetensi, penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta supervisi akademik yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas pedagogik dan profesional tenaga pendidik, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran di sekolah yang lebih kolaboratif, reflektif dan adaptif terhadap perkembangan kurikulum nasional. Keberhasilan program ini diukur melalui persentase tenaga pendidik tersertifikasi serta capaian nilai Uji Kompetensi Tenaga pendidik, yang mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi inti tenaga pendidik sesuai standar pendidikan nasional.

Penguatan literasi dan numerasi menjadi fondasi kualitas pembelajaran, sehingga pemerintah Kabupaten Mimika perlu menginisiasi Gerakan Literasi Daerah sebagai program prioritas. Kegiatan utama mencakup penyediaan bahan bacaan bermutu, pelatihan kompetensi tenaga pendidik dalam strategi literasi-numerasi, serta penyelenggaraan festival literasi yang menumbuhkan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa literasi dan numerasi merupakan variabel penentu keberhasilan siswa dalam semua mata pelajaran, sehingga intervensi ini harus dilakukan secara sistematis dari satuan pendidikan dasar

hingga menengah. Indikator pencapaian berfokus pada peningkatan skor literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional maupun asesmen daerah.

Transformasi digital pendidikan diwujudkan melalui program digitalisasi sekolah yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses belajar-mengajar. Penyediaan akses internet di sekolah, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), serta pengadaan perangkat TIK menjadi prioritas utama untuk memastikan lingkungan belajar yang modern, interaktif dan mendukung pembelajaran abad ke-21. Integrasi TIK tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi juga sebagai strategi pedagogis yang memperluas sumber belajar dan meningkatkan partisipasi siswa. Kinerja program ini diukur melalui persentase sekolah yang terhubung internet dan aktif memanfaatkan platform digital dalam pembelajaran.

Sebagai daerah dengan keunikan sosial-budaya dan ekologi, Kabupaten Mimika memprioritaskan pembelajaran kontekstual melalui pengembangan kurikulum berbasis budaya dan lingkungan lokal. Program ini mencakup penyusunan modul pembelajaran lokal, integrasi muatan lokal Mimika, serta pendampingan sekolah dalam implementasi kurikulum berbasis kearifan komunitas. Langkah ini penting untuk memastikan peserta didik memahami konteks hidupnya, mencintai budaya daerah, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata di lingkungan mereka. Keberhasilan program diukur dari jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum lokal secara konsisten dan terdokumentasi dalam perencanaan pembelajaran.

### **3. Prioritas Ketiga: Transformasi Tata Kelola Pendidikan**

Transformasi tata kelola pendidikan menjadi kebutuhan strategis bagi Kabupaten Mimika dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Kompleksitas tantangan pendidikan mulai dari keberagaman wilayah adat, kesenjangan kualitas layanan, hingga dinamika kebutuhan masyarakat menuntut hadirnya model pengelolaan yang tidak hanya efektif, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bermakna.

Untuk itu prioritas ini diarahkan pada pembaruan tata kelola pendidikan yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta memperkuat peran komunitas, baik adat, agama, perempuan, pemuda, maupun organisasi lokal. Pendekatan berbasis komunitas ini dipandang penting untuk menciptakan rasa memiliki, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa kebijakan serta layanan pendidikan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Mimika. Dengan demikian, transformasi tata kelola menjadi fondasi untuk keberlanjutan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Tabel 5.3 Target Transformasi Tata Kelola Pendidikan

No	Sasaran	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Target 2040
1.	Tata kelola kolaboratif	Revitalisasi komite sekolah	Pelatihan komite, SOP partisipasi masyarakat	Persentase sekolah dengan komite aktif	Dinas Pendidikan	≥ 85% sekolah
2.	Penguatan data pendidikan	Sistem Data Pendidikan Daerah (DAPODIK Daerah)	Integrasi data sekolah, dashboard monitoring	Akurasi dan kelengkapan data	Dinas Pendidikan	≥ 95% data akurat
3.	Partisipasi masyarakat	Kemitraan sekolah-komunitas	Program sekolah adat, kemitraan gereja, CSR pendidikan	Jumlah kemitraan aktif	Dinas Pendidikan, Lembaga Adat, Gereja, Swasta	50+ kemitraan aktif
4.	Peningkatan manajemen sekolah	Pelatihan kepemimpinan kepala sekolah	Diklat manajemen berbasis sekolah	Indeks Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Meningkat ≥ 20%

Sumber: Hasil FGD, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penguatan tata kelola pendidikan di Kabupaten Mimika dimulai dengan membangun mekanisme kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui revitalisasi komite sekolah. Program prioritas ini diarahkan pada pelatihan peningkatan kapasitas komite serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah. Analisis situasi menunjukkan bahwa banyak komite sekolah masih belum berfungsi optimal, sehingga pelatihan dan SOP diperlukan untuk memperjelas peran, fungsi dan alur kerja partisipatif. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur melalui persentase sekolah yang memiliki komite aktif dan terlibat dalam perencanaan, implementasi, serta pengawasan program sekolah.

Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Kabupaten Mimika mengembangkan Sistem Data Pendidikan Daerah (DAPODIK Daerah) yang mengintegrasikan seluruh data sekolah ke dalam satu platform digital yang dilengkapi *dashboard* monitoring. Sistem ini memungkinkan pemetaan kondisi riil sekolah secara spasial, termasuk jumlah peserta didik, tenaga pendidik, kebutuhan infrastruktur, dan capaian mutu pendidikan. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa masalah utama selama ini adalah ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data sehingga berpengaruh pada alokasi anggaran dan intervensi program. Indikator kinerja difokuskan pada tingkat akurasi dan kelengkapan data yang dihasilkan oleh satuan pendidikan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang responsif dan inklusif. Program kemitraan sekolah komunitas melibatkan berbagai unsur lokal, seperti lembaga adat, gereja, organisasi masyarakat, dan dunia usaha melalui CSR pendidikan. Kegiatan seperti program sekolah kampung berbasis kearifan lokal sesuai wilayah ekologi, pendampingan komunitas, serta kegiatan pemberdayaan berbasis budaya berperan dalam memperluas dukungan sumber daya non-anggaran yang memperkaya proses pembelajaran siswa. Analisis konteks menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kabupaten Mimika memiliki potensi besar karena struktur sosial-komunitas yang kuat. Indikator kinerja dari program ini tercermin pada jumlah kemitraan aktif yang berfungsi secara konsisten dan berkelanjutan.

Manajemen sekolah yang efektif menjadi pilar utama peningkatan mutu layanan pendidikan, sehingga Kabupaten Mimika menempatkan pelatihan kepemimpinan kepala sekolah sebagai program prioritas. Melalui diklat manajemen berbasis sekolah yang berpelayanan publik, para kepala sekolah dibekali kompetensi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya dan supervisi akademik. Analisis menunjukkan bahwa variasi kualitas kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung

terhadap mutu pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Untuk itu penguatan kapasitas manajerial ini diharapkan menghasilkan kepala sekolah yang visioner, adaptif dan mampu memimpin inovasi pendidikan. Keberhasilan program diukur dengan peningkatan nilai Indeks Manajemen Sekolah sebagai cerminan efektivitas tata kelola pada level satuan pendidikan.

#### 4. Prioritas Keempat: Sistem Pendidikan Inovatif dan Berdaya Saing

Pengembangan sistem pendidikan yang inovatif dan berdaya saing menjadi keharusan bagi Kabupaten Mimika untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan masa depan. Perubahan sosial, percepatan teknologi, serta peluang dan risiko yang muncul dari dinamika bonus demografi menuntut hadirnya sistem pendidikan yang tidak hanya inklusif dan adaptif, tetapi juga mampu mempersiapkan generasi muda agar produktif, kreatif dan kompetitif.

Dalam konteks tersebut, prioritas keempat difokuskan pada penguatan inovasi pendidikan, perluasan akses terhadap pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, serta pembangunan ekosistem pembelajaran yang mendorong literasi digital, keterampilan vokasional, kewirausahaan dan keberlanjutan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Mimika dapat berperan sebagai motor penggerak transformasi sosial ekonomi daerah sekaligus memaksimalkan potensi bonus demografi secara optimal.

Tabel 5.4 Target Sistem Pendidikan Inovatif dan Berdaya Saing

No	Sasaran	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Target 2040
1.	Peningkatan daya saing generasi muda	Pembentukan <i>Center of Excellence</i>	Pusat unggulan STEM, seni-budaya, vokasi	Jumlah CoE beroperasi	Dinas Pendidikan	3-5 CoE
2.	Pendidikan berbasis teknologi cerdas (dimulai dari perkotaan)	<i>Smart Education</i> Mimika	<i>AI learning tools, smart classrooms</i>	Persentase sekolah cerdas	Dinas Pendidikan, Kominfo	≥ 60% sekolah
3.	Pengembangan vokasi berbasis industri lokal	Kemitraan vokasi-industri	PKL industri, kurikulum industri	Penyerapan lulusan vokasi	Disnaker, Industri, SMK	≥ 70% lulusan terserap
4.	Sistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan	Layanan untuk kelompok rentan	SLB terintegrasi, tenaga pendidik pendamping khusus	APS anak berkebutuhan khusus	Dinas Pendidikan	≥ 80% APS ABK

Sumber: Hasil FGD, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan daya saing generasi muda diwujudkan melalui pembentukan *Center of Excellence* (CoE) sebagai pusat unggulan pengembangan kapasitas peserta didik dalam bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM), seni-budaya, dan vokasi. CoE ini dirancang sebagai ruang inovasi dan kreativitas yang menyediakan fasilitas modern, pelatihan intensif dan program pengembangan bakat sesuai minat siswa. Melalui keberadaan pusat unggulan tersebut, generasi muda kabupaten Mimika diharapkan mampu meningkatkan literasi sains, teknologi, seni serta keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Keberhasilan program ini diukur melalui jumlah CoE yang beroperasi dan benar-benar menjalankan fungsi pengembangan kompetensi secara efektif.

Transformasi pendidikan berbasis teknologi cerdas dimulai dari wilayah perkotaan melalui program *Smart Education Mimika*. Program ini mengintegrasikan pemanfaatan *AI learning tools* dan *smart classrooms* untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat sistem manajemen pendidikan. Implementasinya mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk penilaian otomatis, personalisasi belajar, serta analitik perkembangan siswa, diiringi penyediaan ruang kelas cerdas dengan perangkat interaktif, jaringan digital dan *platform Learning Management System* (LMS). Tingkat keberhasilan program direpresentasikan oleh persentase sekolah yang telah memenuhi indikator sebagai sekolah cerdas, baik dari aspek infrastruktur teknologi maupun kapasitas tenaga pendidik dalam pembelajaran digital.

Pengembangan vokasi berbasis industri lokal diarahkan pada penguatan kemitraan strategis antara lembaga pendidikan dan sektor industri yang beroperasi di kabupaten Mimika. Melalui kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), penyesuaian kurikulum berbasis standar industri, serta sertifikasi kompetensi, peserta didik memperoleh pengalaman kerja nyata dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha. Pendekatan ini memastikan bahwa lulusan vokasi memiliki profil keterampilan yang relevan, adaptif dan siap berkontribusi pada sektor-sektor unggulan daerah seperti pertambangan,

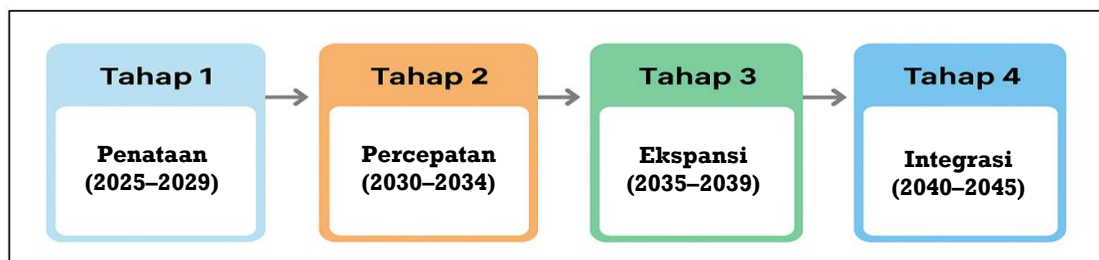
konstruksi, pariwisata dan perikanan. Indikator utama keberhasilan program diukur melalui tingkat penyerapan lulusan vokasi oleh industri dan dunia kerja lainnya.

Penguatan sistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui penyediaan layanan bagi kelompok rentan, terutama anak berkebutuhan khusus. Upaya ini mencakup pengembangan SLB terintegrasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik pendamping khusus, serta penyediaan asesmen dan adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Melalui kebijakan inklusi, sekolah diharapkan mampu menjadi ruang belajar yang ramah, aman dan nondiskriminatif sehingga semua anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Indikator keberhasilan program ini tercermin pada meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berkebutuhan khusus sebagai wujud nyata perluasan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## B. Peta Jalan Pembangunan Pendidikan 2025-2045

Peta jalan pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 disusun untuk memastikan arah transformasi pendidikan daerah berlangsung secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menata kembali pondasi sistem pendidikan sekaligus menuntun seluruh pemangku kepentingan agar bergerak dalam satu kerangka perubahan jangka panjang. Peta jalan tersebut memuat tahapan pencapaian strategis sesuai dinamika sosial, ekonomi dan geografis Kabupaten Mimika, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan adaptif dan kontekstual.

Gambar 5.1 Tahapan Rencana Aksi dan Roadmap GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045



Sumber: Analisis Tim PSK, 2025

Tahapan pembangunan pendidikan di kabupaten Mimika dibagi ke dalam empat fase utama, yaitu Tahap penataan (2025-2029), Tahap Percepatan (2030-2034), Tahap ekspansi (2035-2039), dan Tahap Integrasi (2040-2045). Pembagian fase ini dirancang untuk memastikan setiap langkah mendapatkan landasan yang kokoh sebelum memasuki tahapan berikutnya. Setiap fase memuat tujuan spesifik, fokus intervensi, serta pencapaian yang diharapkan, sehingga proses transformasi pembangunan pendidikan berlangsung bertahap namun konsisten.

Pada **fase penataan** (2025-2029), pembangunan difokuskan pada penyediaan layanan dasar pendidikan sebagai fondasi sistem yang inklusif dan merata. Upaya yang ditempuh mencakup peningkatan akses melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, penataan data pendidikan daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan seperti revitalisasi komite sekolah dan satuan pendidikan. Fase ini menjadi titik awal pembenahan aspek dasar yang selama ini menjadi hambatan utama kualitas layanan pendidikan di kawasan pinggiran dan pedalaman terutama pada ekologi pesisir dan pegunungan.

Selanjutnya, **fase percepatan** (2030-2034) diarahkan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi pendidik. Penguatan kurikulum kontekstual, perluasan program pelatihan tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang adaptif menjadi fokus utama. Selain itu, sistem tata kelola pendidikan diperkuat melalui mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat agar pelayanan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Memasuki **fase ekspansi** (2035-2039), pembangunan diarahkan pada perluasan inovasi dan diversifikasi program pendidikan. Pemerintah daerah mendorong pengembangan pusat inovasi pembelajaran, pendidikan vokasi berbasis potensi wilayah, dan perluasan layanan pendidikan menengah yang relevan dengan dinamika bonus demografi. Upaya ini ditujukan untuk memastikan setiap anak dan remaja di kabupaten Mimika memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada **fase integrasi** (2040-2045), seluruh hasil pembangunan pada fase sebelumnya dipadukan ke dalam sistem pendidikan yang semakin matang, adaptif dan berorientasi masa depan. Fokus utama fase ini adalah integrasi tata kelola pendidikan berbasis data, konsolidasi kemitraan multipihak dan penguatan ekosistem inovasi pendidikan yang berkelanjutan. Tahap ini juga menekankan penyelarasan antara pendidikan formal, nonformal dan informal agar dapat membentuk generasi kabupaten Mimika yang tangguh dan berdaya saing menghadapi perubahan global.

Peta jalan pembangunan pendidikan ini menggambarkan perjalanan transformasi kabupaten Mimika dari kondisi awal yang beragam menuju sistem pendidikan yang responsive, berkualitas, inklusif dan tangguh. Roadmap ini memprioritaskan peningkatan akses, mutu pembelajaran, tata kelola dan inovasi secara berurutan sehingga setiap pencapaian pada satu fase menjadi dasar yang memperkuat fase berikutnya. Dengan pendekatan bertahap ini, pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika dirancang untuk menjawab tantangan geografis, mobilitas penduduk dan kebutuhan pendidikan di wilayah ekologi pesisir, dataran dan pegunungan secara berkelanjutan.

Melalui perencanaan jangka panjang yang komprehensif ini, GDP Kabupaten Mimika 2025-2045 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk membangun generasi kabupaten Mimika yang cerdas, berkarakter, kompetitif, serta mampu menjadi penggerak utama pembangunan daerah dalam dua dekade mendatang, secara khusus pada tahun 2025-2029 sebagaimana target pencapaian sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Ukuran Keberhasilan per 5 tahunan**  
**Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika**  
**Tahun 2025-2029**

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	
Jenjang pendidikan formal yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas	Rata-rata lama sekolah (RLS) tahun	10,73	10,79	10,85	10,91	10,97	
	RLS Laki-laki	10,81	10,87	10,92	10,98	11,04	
	RLS Perempuan	10,44	10,51	10,59	10,66	10,74	
	Harapan Lama sekolah (HLS) tahun	13,17	13,30	13,44	13,57	13,71	
	HLS Laki-laki	13,12	13,26	13,39	13,53	13,67	
	HLS Perempuan	13,35	13,48	13,60	13,73	13,85	
Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan semua jalur, jenjang dan jenis per kampung secara	Rasio PAUD/TK per kampung						
	Rasio SD per kampung						
	Rasio layanan SMP per distrik						
	Rasio layanan SMA per distrik						
	Rasio layanan SMK per distrik						

proporsional berdasarkan SPM Papua Selatan dan atau nasional	Tingkat kesesuaian (%) bidang keahlian SMK dengan hasil survei pasar kerja dan potensi daerah					
Menurunnya angka ketidakhadiran guru SD	Angka ketidakhadiran guru SD (%)					
Meningkatnya angka partisipasi sekolah/APS (%)	APS penduduk usia 3-6 tahun					
	APS penduduk usia 7-12 tahun					
	APS penduduk usia 13-15 tahun					
	APS penduduk usia 16-18 tahun					
Meningkatnya angka partisipasi kasar/APK (%)	APS penduduk usia 19-23 tahun					
	APK penduduk usia 3-6 tahun	76,52	75,97	75,42	74,87	74,33
	APK penduduk usia 7-12 tahun	77,06	78,15	79,24	80,34	81,43
	APK penduduk usia 13-15 tahun	97,83	97,93	98,14	98,24	98,35
Meningkatnya angka partisipasi murni/APM (%)	APK penduduk usia 16-18 tahun	41,63	44,41	47,19	49,97	52,75
	APK penduduk usia 19-23 tahun					
	APM penduduk usia 3-6 tahun					
	APM penduduk usia 7-12 tahun	61,66	63,49	65,31	67,14	68,96
Meningkatnya angka partisipasi melanjutkan	APM penduduk usia 13-15 tahun	56,58	58,65	60,72	62,78	64,85
	APM penduduk usia 16-18 tahun	18,50	22,38	26,26	30,14	34,02
	APM penduduk usia 19-23 tahun					
Meningkatnya kompetensi lulusan Dikdas dan Dikmen	SD ke SMP					
	SMP ke SMA/K					
Meningkatnya kemampuan Calistung peserta didik kelas 3 SD (%)	Kemampuan Calistung peserta didik kelas 3 SD (%)					
	Lulusan SMA pendaftar dan diterima di PT ternama					
Nilai Capaian rapor pendidikan komponen literasi	SD	51,14	51,80	52,46	53,12	53,78
	SMP	57,40	57,76	58,12	58,49	58,85
	SMA	62,93	78,42	78,42	78,42	78,42
	SMK	41,03	41,93	42,84	43,74	44,64
Nilai Capaian rapor pendidikan komponen numerasi	SD	47,60	48,19	48,78	49,37	49,96
	SMP	55,39	55,61	55,83	56,05	56,27
	SMA	61,53	61,93	62,34	62,74	63,14
	SMK	38,78	39,31	39,85	40,38	40,92
Nilai Capaian rapor pendidikan komponen karakter	SD	53,42	54,21	55,00	55,79	56,58
	SMP	52,25	53,10	53,94	54,79	55,63
	SMA	54,25	55,00	55,75	56,50	57,25
	SMK	50,47	51,40	52,33	53,26	54,19
Meningkatnya proporsi sekolah terakreditasi A	Proporsi PAUD terakreditasi A					
	Proporsi SD terakreditasi A					
	Proporsi SMP terakreditasi A					
	Proporsi SMA terakreditasi A					
	Proporsi SMK terakreditasi A					
Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional	Rasio ketersediaan program kesetaraan Paket A, B, dan C / distrik					
	Angka Melek Huruf dewasa (%)	98,96	98,06	97,15	96,25	5,35
Angka keberkerjaan lulusan SMK dengan masa tunggu/tahun	Angka keberkerjaan ( <i>employability</i> ) %					
	Waktu tunggu memperoleh pekerjaan (tahun)					
Angka keberkerjaan lulusan SMA kursus ketrampilan dengan masa tunggu/tahun	Angka keberkerjaan ( <i>employability</i> ) %					
	Waktu tunggu memperoleh pekerjaan (tahun)					
Meningkatnya mutu pelaksanaan pembiasaan perilaku positif di lingkungan pendidikan, keluarga dan masyarakat sesuai kurikulum pendidikan karakter khas Papua Selatan	Tingkat keterlaksanaan (%) pembiasaan perilaku positif sebagai pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah					
	Tingkat keterlaksanaan (%) pembiasaan perilaku positif sebagai pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat					
	Tingkat keterlaksanaan (%) pembiasaan perilaku positif sebagai pelaksanaan pendidikan karakter di dalam keluarga					

Sumber: Data diolah, 2025

## C. Indikator Kinerja

### 1. Indikator Kinerja Pendidikan Formal

Dalam kerangka Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika 2025-2045, indikator kinerja pendidikan formal diposisikan sebagai instrumen utama untuk memantau ketercapaian visi pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu dan berkeadilan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk memastikan bahwa perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan layanan antar kawasan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal berjalan secara terukur dan berbasis data. Melalui pemantauan tingkat partisipasi dan keberlanjutan peserta didik, capaian hasil belajar, kualitas dan distribusi tenaga pendidik, kecukupan sarana prasarana, serta efektivitas tata kelola satuan pendidikan, GDPP dapat mengarahkan kebijakan dan intervensi secara tepat sasaran.

Dengan demikian indikator kinerja pendidikan formal menjadi landasan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam GDPP untuk memastikan pendidikan berkontribusi nyata dalam menghasilkan sumber daya manusia Mimika yang kompeten, berkarakter, dan mampu mendukung pembangunan daerah menuju Mimika Emas 2045.

Tabel 5.6 Sasaran, Kebijakan, Program Strategis dan Indikator Kinerja Pendidikan Formal GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045

Tahap Penataan (Tahun 2025-2029)	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	1) Penataan kelembagaan pendidikan 2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan 3) Penguatan tata kelola sekolah 4) Penyiapan fondasi SDM pendidik.
Kebijakan	1) Harmonisasi regulasi dan kelembagaan 2) Penataan data dan sistem informasi pendidikan 3) Pemetaan mutu satuan pendidikan berbasis asesmen dan EMIS/Dapodik 4) Peningkatan kapasitas dan sertifikasi pendidik
Program Strategis	1) Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Daerah (SIPD-Pendidikan) 2) Pemetaan dan akreditasi ulang sekolah 3) Program pelatihan guru berbasis kompetensi inti 4) Penataan sarana-prasarana dasar (ruang kelas, sanitasi, TIK)

Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat pemenuhan SPM <math>\geq</math> 80%</li> <li>2) Minimal 70% sekolah terakreditasi B ke atas</li> <li>3) 60% guru bersertifikat pendidik</li> <li>4) 100% data sekolah terintegrasi SIPD/Dapodik</li> </ol>
Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuk struktur tata kelola pendidikan yang konsisten</li> <li>2) Seluruh sekolah memiliki profil mutu</li> <li>3) Terpenuhinya sarpras dasar pendidikan</li> <li>4) Terbangunnya basis data pendidikan terintegrasi</li> </ol>

<b>Tahap Percepatan (Tahun 2030-2034)</b>	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan mutu layanan pendidikan</li> <li>2) Percepatan pemerataan guru dan sarpras</li> <li>3) Transformasi digital pendidikan.</li> </ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Redistribusi guru berbasis kebutuhan</li> <li>2) Percepatan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah</li> <li>3) Penguatan sekolah berbasis digital</li> <li>4) Penuntasan sarpras standar minimal</li> </ol>
Program Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Guru Penggerak Daerah Mimika</li> <li>2) Pembangunan laboratorium digital dan pusat sumber belajar</li> <li>3) Beasiswa peningkatan kualifikasi guru (S1-S2)</li> <li>4) Pengembangan Learning Management System (LMS) daerah</li> </ol>
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rasio guru–murid sesuai standar nasional</li> <li>2) Indeks Mutu Pendidikan meningkat minimal 20% dari baseline</li> <li>3) 80% sekolah menerapkan pembelajaran digital</li> <li>4) Kelulusan sertifikasi guru <math>\geq</math> 80%</li> </ol>
Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerataan distribusi guru</li> <li>2) Penguatan kultur mutu sekolah</li> <li>3) Penerapan kurikulum berbasis projek dan digital learning</li> <li>4) Terwujudnya sekolah model digital</li> </ol>

<b>Tahap Ekspansi (Tahun 2035-2039)</b>	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perluasan akses pendidikan berkualitas</li> <li>2) Pengembangan pendidikan vokasi dan kewirausahaan</li> <li>3) Kemitraan industri–pendidikan.</li> </ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perluasan sekolah baru di wilayah pertumbuhan penduduk</li> <li>2) Penguatan SMK berbasis industri</li> <li>3) Integrasi program kewirausahaan dan life skills</li> <li>4) Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha/industri</li> </ol>
Program Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan sekolah baru (SD/SMP/SMA/SMK)</li> <li>2) Revitalisasi SMK dan teaching factory</li> <li>3) Program magang guru dan siswa</li> <li>4) Inkubator wirausaha siswa dan guru</li> </ol>

Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) APK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK meningkat hingga 95–100%</li> <li>2) 70% SMK memiliki kerja sama industri aktif</li> <li>3) 50% siswa mengikuti program kewirausahaan</li> <li>4) 30% lulusan SMK terserap industri lokal</li> </ol>
Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akses merata hingga daerah terpencil</li> <li>2) Terwujudnya klaster pendidikan vokasi</li> <li>3) Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja</li> <li>4) Peningkatan jumlah sekolah unggulan di Mimika</li> </ol>

<b>Tahap Integrasi (Tahun 2040-2045)</b>	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi sistem pendidikan berkelanjutan</li> <li>2) Pendidikan berbasis inovasi dan penelitian</li> <li>3) Mewujudkan Mimika sebagai pusat keunggulan pendidikan di Papua Tengah</li> </ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi PAUD-SD-SMP-SMA dalam sistem transisi mulus (interconnected pathway)</li> <li>2) Riset pendidikan daerah</li> <li>3) Ekosistem inovasi pembelajaran dan teknologi</li> <li>4) Kolaborasi pendidikan tinggi-sekolah-industri</li> </ol>
Program Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pusat riset pendidikan daerah Mimika</li> <li>2) Sekolah unggulan berbasis digital dan inovasi</li> <li>3) Program inovasi guru dan publikasi ilmiah</li> <li>4) Integrasi data pendidikan dengan big data daerah</li> </ol>
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks Mutu Layanan Pendidikan <math>\geq</math> sangat baik</li> <li>2) 90% sekolah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan riset</li> <li>3) Publikasi ilmiah guru meningkat 50%</li> <li>4) Data pendidikan terintegrasi penuh dalam Big Data Mimika</li> </ol>
Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya ekosistem pendidikan inovatif</li> <li>2) Sekolah menjadi pusat riset dan pengembangan</li> <li>3) Semua jenjang pendidikan terhubung dalam sistem integratif</li> <li>4) Mimika menjadi daerah rujukan pendidikan di kawasan Papua Tengah</li> </ol>

## 2. Indikator Kinerja Pendidikan Non-Formal

Indikator kinerja pendidikan nonformal dalam kerangka Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa layanan pendidikan di luar jalur sekolah selaras dengan visi pembangunan SDM daerah. Dalam GDPP indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi pendidikan nonformal terhadap peningkatan literasi, keterampilan vokasi,

dan kecakapan hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok usia produktif, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Melalui indikator yang terukur seperti tingkat partisipasi, relevansi program dengan kebutuhan lokal, serta dampak terhadap kemandirian ekonomi maka GDPP memastikan pendidikan nonformal menjadi bagian integral dari sistem pendidikan daerah yang inklusif, adaptif dan berorientasi pada pencapaian Mimika Emas 2045.

Tabel 5.7 Sasaran, Kebijakan, Program Strategis dan Indikator Kinerja Pendidikan nonFormal GDPP Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045

Tahap Penataan (Tahun 2025-2029)	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standarisasi layanan PNF</li> <li>2) Pemenuhan SPM PNF</li> <li>3) Penguatan tata kelola PKBM/LKP</li> <li>4) Penyiapan SDM pendidik/tutor</li> </ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harmonisasi regulasi dan kelembagaan PNF</li> <li>2) Penataan data dan sistem informasi PNF daerah</li> <li>3) Pemetaan mutu PKBM/LKP berbasis asesmen dan EMIS/Dapodik PNF</li> <li>4) Peningkatan kapasitas dan sertifikasi tutor/instruktur</li> </ol>
Program Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Sistem Informasi PNF Daerah</li> <li>2) Akreditasi dan re-akreditasi PKBM/LKP</li> <li>3) Program pelatihan tutor berbasis kompetensi inti (andragogi, asesmen, modul ajar)</li> <li>4) Penataan sarana dan prasarana dasar PKBM (ruang belajar, modul, TIK)</li> </ol>
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 75% lembaga PNF terdata dalam sistem informasi daerah</li> <li>2) <math>\geq 60\%</math> PKBM/LKP terakreditasi minimal B</li> <li>3) 50% tutor bersertifikat kompetensi</li> <li>4) Seluruh lembaga memiliki profil mutu</li> </ol>
Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Struktur tata kelola PNF terbentuk</li> <li>2) Profil mutu tersedia untuk seluruh PKBM/LKP</li> <li>3) Sarpras dasar minimal terpenuhi</li> <li>4) Database PNF terintegrasi daerah</li> </ol>
Tahap Percepatan (Tahun 2030-2034)	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan mutu layanan kesetaraan dan kecakapan hidup</li> <li>2) Pemerataan tutor</li> <li>3) Transformasi digital PNF</li> </ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Redistribusi tutor sesuai kebutuhan wilayah</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Peningkatan kompetensi tutor dan pengelola PKBM/LKP</li> <li>3) Penguatan PNF berbasis digital</li> <li>4) Penuntasan sarpras standar minimal</li> </ul>
Program Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Program Tutor Penggerak Daerah</li> <li>2) Pembangunan Learning Studio PNF (lab digital dan pusat sumber belajar)</li> <li>3) Beasiswa peningkatan kualifikasi tutor (S1-S2)</li> <li>4) Pengembangan LMS PNF daerah</li> </ul>
Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rasio tutor-peserta didik sesuai standar</li> <li>2) Indeks Mutu PNF meningkat <math>\geq 20\%</math> dari baseline</li> <li>3) 70% PKBM/LKP menerapkan pembelajaran digital</li> <li>4) Kelulusan asesmen kompetensi tutor <math>\geq 80\%</math></li> </ul>
Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerataan distribusi tutor</li> <li>2) Kultur mutu PKBM/LKP meningkat</li> <li>3) Implementasi pembelajaran digital meningkat signifikan</li> <li>4) Terwujudnya lembaga model digital</li> </ul>

<b>Tahap Ekspansi (Tahun 2035-2039)</b>	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perluasan akses PNF berkualitas</li> <li>2) Pengembangan vokasi dan wirausaha komunitas</li> <li>3) Kemitraan industri-PNF.</li> </ul>
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembukaan PKBM/LKP baru di wilayah pertumbuhan penduduk</li> <li>2) Penguatan program vokasi dan life skills</li> <li>3) Integrasi kurikulum kewirausahaan komunitas</li> <li>4) Kolaborasi dengan industri/UMKM</li> </ul>
Program Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan PKBM baru</li> <li>2) Revitalisasi LKP dan teaching factory komunitas</li> <li>3) Magang instruktur dan peserta di industri</li> <li>4) Inkubator wirausaha komunitas</li> </ul>
Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) APK Kesetaraan meningkat hingga 95%</li> <li>2) 60% LKP memiliki kerja sama industri aktif</li> <li>3) 50% peserta mengikuti program kewirausahaan</li> <li>4) 25% lulusan kecakapan kerja terserap industri lokal</li> </ul>
Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Akses PNF merata hingga daerah terpencil</li> <li>2) Klaster vokasi komunitas berkembang</li> <li>3) Relevansi PNF dengan kebutuhan kerja meningkat</li> <li>4) Bertambahnya lembaga unggulan PNF daerah</li> </ul>

<b>Tahap Integrasi (Tahun 2040-2045)</b>	
Komponen	Uraian
Sasaran Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi sistem pendidikan sepanjang hayat</li> <li>2) PNF berbasis inovasi dan riset</li> <li>3) Daerah sebagai pusat unggulan PNF Papua.</li> </ul>
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi jalur PAUD-Kesetaraan-Vokasi-Karier</li> <li>2) Riset daerah untuk pengembangan model PNF</li> <li>3) Ekosistem inovasi pembelajaran dan teknologi</li> <li>4) Kolaborasi perguruan tinggi-PNF-industri</li> </ul>

Program Strategis	1) Pusat Riset dan Inovasi PNF Daerah 2) PKBM unggulan berbasis digital dan inovasi 3) Hibah inovasi tutor dan publikasi ilmiah 4) Integrasi Big Data PNF
Indikator Kinerja	1) Indeks Mutu PNF kategori “sangat baik” 2) 85% lembaga menerapkan teknologi dan riset 3) Publikasi tutor meningkat $\geq 50\%$ 4) Data PNF terintegrasi penuh
Pencapaian	1) Ekosistem inovatif PNF terbentuk 2) PKBM/LKP menjadi pusat riset lokal 3) Jalur pembelajaran terhubung utuh 4) Daerah menjadi rujukan PNF regional Papua

#### D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai tolok ukur utama keberhasilan GDPP 2025–2045. IKU mencakup peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang, penurunan disparitas akses antarwilayah, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, pertumbuhan capaian literasi dan numerasi, serta peningkatan kualitas manajemen sekolah. Selain itu, IKU mencakup terfungsinya mekanisme kelembagaan berbasis komunitas, berkembangnya inovasi pembelajaran kontekstual, serta peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah sulit dijangkau.

Tabel 5.8 Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP)  
Kabupaten Mimika

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2045
1.	<b>Akses dan pemerataan</b>	
a.	Angka Partisipasi Sekolah semua jenjang	$\geq 95\%$
b.	Jumlah SATAP PAUD–SD Kecil dan SATAP SD–SMP aktif dengan tenaga pendidik tetap	$\geq 95\%$
c.	Jumlah PKBM aktif di seluruh distrik	100%
d.	Rasio ruang kelas layak meningkat	100%
e.	Penurunan disparitas akses antar wilayah	Turun $\geq 70\%$
f.	Indeks mutu sarana dan prasarana sekolah semua jenjang pendidikan	Meningkat $\geq 30\%$
2.	<b>Kualitas dan relevansi pendidikan</b>	
a.	Kompetensi tenaga pendidik (sertifikasi dan kinerja)	$\geq 90\%$
b.	Penyetaraan pendidikan tenaga pendidik S-1	$\geq 90\%$
c.	Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S-2	$\geq 50\%$
d.	Nilai akreditasi sekolah minimal B	100%
e.	Nilai akreditasi sekolah minimal A	$\geq 80\%$

f.	Skor literasi dan numerasi meningkat	Setara standar nasional
g.	Sekolah unggul Otsus mandiri minimal 1/distrik	100%
<b>3. Tatakelola layanan pendidikan</b>		
a.	Pemanfaatan TIK untuk layanan pendidikan	≥ 90%
b.	Sekolah terhubung internet	100%
c.	Sekolah menerapkan kurikulum lokal	≥ 85%
d.	Komite sekolah aktif	100%
e.	Layanan pendidikan inklusif	≥ 80%
f.	Penyerapan lulusan vokasi	≥ 70%
g.	Sekolah menerapkan MBS berbasis layanan publik	100%

Sumber: Data diolah, 2025

## E. Strategi dan Sumber Pendanaan

Untuk mendukung implementasi skenario pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika sebagaimana ditetapkan dalam GDPP 2025-2045 serta memastikan keterhubungan *result chain* mulai dari input, aktivitas, output, outcome, hingga impact diperlukan strategi pendanaan yang terarah, terukur dan berkelanjutan.

Adapun strategi pendanaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Optimalisasi Dana Otonomi Khusus menjadi instrumen penting bagi percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika. Saat ini, 80% Dana OTSUS dialokasikan kepada kabupaten setelah dikurangi urusan bersama dan sedikitnya 30% dari porsi tersebut wajib digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa Dana OTSUS diarahkan secara strategis pada penyediaan layanan pendidikan dasar, terutama di kawasan pinggiran dan pedalaman akses sulit. Efektivitas pemanfaatan dana perlu diperkuat melalui pengendalian perencanaan, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi hasil secara ketat dan transparan. Mekanisme ini perlu ditetapkan melalui regulasi kepala daerah sebagai dasar tata kelola penggunaan Dana OTSUS yang akuntabel dan berdampak.

## **2. Penetapan Layanan Pendidikan sebagai Urusan Bersama OTSUS**

Penetapan layanan pendidikan sebagai bagian dari urusan bersama dalam skema OTSUS memiliki arti penting untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan dan memastikan keberlanjutan pendanaan pelayanan pendidikan bagi wilayah yang sulit dijangkau. Melalui pendekatan ini, penyelenggaraan pendidikan dipandang sebagai tanggungjawab kolektif pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk Kabupaten Mimika, pendekatan urusan bersama ini sangat relevan apabila kinerja pembangunan pendidikan di daerah terpencil belum optimal. Karena itu diperlukan kajian menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan Dana OTSUS pada sektor pendidikan. Apabila ditemukan kesenjangan kinerja, Bupati dapat mengusulkan sebagian penyelenggaraan layanan pendidikan di kawasan terisolasi sebagai urusan bersama untuk menjamin kesinambungan layanan dan kualitas pendidikan.

## **3. Sinergi DAU Kabupaten untuk Memenuhi Urusan Wajib Pendidikan**

Optimalisasi sinergi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi urusan wajib pendidikan merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembiayaan pendidikan dasar di Kabupaten Mimika. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan dasar merupakan tanggung jawab kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara alokasi 30% Dana OTSUS bagian kabupaten untuk pendidikan dengan porsi minimal 20% DAU yang wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sinergi kedua sumber pendanaan ini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, terutama penyediaan tenaga guru, sarana prasarana belajar, dan operasional sekolah pada wilayah pinggiran dan pedalaman terpencil.

## **4. Penguatan Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Pusat**

Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah, menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Mimika. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun proposal komprehensif guna memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi intervensi di wilayah dengan

karakteristik layanan khusus, seperti sekolah kecil, sekolah satu atap, dan wilayah 3T. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas daerah dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas GDPP kabupaten Mimika.

## 5. Pelibatan Mitra Pembangunan dan Sektor Swasta

Pemerintah Kabupaten Mimika perlu terus memperkuat kemitraan dengan lembaga pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, termasuk perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia (melalui YPMAK) dan pelaku UMKM. Berbagai mitra pembangunan telah mengembangkan model layanan pendidikan untuk wilayah pinggiran dan pedalaman terpencil yang dapat direplikasi melalui APBD maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pelibatan mitra secara terstruktur akan memperluas jangkauan layanan, memperkuat inovasi pendidikan, dan mendukung keberlanjutan program melalui pembiayaan multipihak.

Melalui strategi pendanaan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kolaborasi, Kabupaten Mimika dapat mempercepat penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah sekaligus mendorong terwujudnya generasi kabupaten Mimika yang unggul dan siap menghadapi dinamika pembangunan hingga tahun 2045.

## F. Mekanisme Koordinasi dan Implementasi

### 1. Mekanisme Koordinasi dan Implementasi

Untuk memastikan implementasi GDPP Mimika 2025-2045 berjalan efektif, diperlukan struktur kelembagaan yang jelas melalui pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Implementasi yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah.

**Tim Koordinasi**, yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah, bertugas menetapkan arah kebijakan, memastikan keselarasan program pembangunan pendidikan dengan prioritas daerah, serta mengoordinasikan sinkronisasi lintas perangkat daerah dan mitra strategis. Melalui peran ini, Tim Koordinasi

menjadi pengendali utama yang menjamin integrasi, konsistensi dan keberlanjutan implementasi GDPP di Kabupaten Mimika.

**Tim Teknis** dipimpin oleh Dinas Pendidikan dan melibatkan perangkat daerah yang relevan. Tim ini bertanggung jawab menyusun rencana kerja operasional, mengoordinasikan pelaksanaan program di lapangan, memastikan ketersediaan dan keakuratan data, serta menyampaikan laporan capaian secara berkala kepada Tim Koordinasi. Melalui peran ini, Tim Teknis menjadi penggerak utama implementasi program sekaligus penghubung antara kebijakan strategis dan tindak lanjut operasional di tingkat pelaksana.

**Sekretariat Implementasi** berfungsi sebagai pusat administrasi dan dokumentasi sekaligus penyedia dukungan operasional bagi seluruh tahapan pelaksanaan GDPP. Sekretariat juga bertanggung jawab mengelola sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time, sehingga mampu menyajikan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada tingkat teknis maupun strategis.

Dengan struktur ini, koordinasi lintas sektor dilakukan dengan perangkat daerah terkait, lembaga adat dan keagamaan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat menjadi lebih terarah, kolaboratif dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga implementasi GDPP dapat berlangsung konsisten dan menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mimika.

## 2. Rekomendasi Implementasi

Untuk memastikan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika selaras dengan visi jangka panjang 2025-2045, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis yang komprehensif, terukur dan adaptif terhadap dinamika sosial, demografis, serta tantangan layanan pendidikan di kawasan pinggiran dan pedalaman akses sulit pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan, serta kawasan pertumbuhan baru.

Rekomendasi ini ditempatkan dalam lima bidang utama yang saling terhubung dan menjadi landasan implementasi GDPP untuk memperkuat regulasi, memastikan keberlanjutan pendanaan, meningkatkan kualitas dan

ketersediaan SDM pendidikan, mendorong kolaborasi multipihak yang efektif, serta membangun sistem monitoring yang berbasis data real-time.

Tabel 5.9 Rekomendasi Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika

No.	Bidang	Rekomendasi
1.	Regulasi	PERDA GDPP, PERBUP SATAP, PERBUP Komite Sekolah, PERBUP Dapodik Daerah
2.	Anggaran	Skema OTSUS, DAU nonfisik, Dana BOS, CSR industri (PT. Freeport, UMKM)
3.	SDM	Beasiswa calon tenaga pendidik OAP, KPDT (Kawasan Perdesaan, Terpencil dan Tertinggal), tenaga pendidik 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)
4.	Kolaborasi	Pemerintah Kabupaten, Gereja, Adat, Dunia Usaha dan Pertenaga pendidikan Tinggi
5.	Monitoring	Evaluasi tahunan berbasis data real-time

Rekomendasi strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Mimika dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Regulasi

Penguatan kerangka regulasi menjadi fondasi utama penyelenggaraan pembangunan pendidikan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) sebagai pedoman resmi lintas sektor hingga tahun 2045. Penguatan regulasi dilanjutkan melalui penyusunan Peraturan Bupati (PERBUP) sekolah SATAP yang mengatur penyelenggaraan sekolah satu atap berbasis distrik terutama pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan. Selain itu diperlukan PERBUP Komite Sekolah sebagai instrumen formal revitalisasi partisipasi masyarakat (adat, agama, perempuan dan pemuda) dalam tata kelola pendidikan. Untuk memperkuat kebijakan data, PERBUP Dapodik Daerah diterbitkan sebagai dasar integrasi dan sinkronisasi sistem data pendidikan di tingkat kabupaten.

b. Bidang Anggaran

Pembiayaan pembangunan pendidikan kabupaten Mimika memerlukan model pendanaan yang beragam, fleksibel dan

berkelanjutan. Optimalisasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) menjadi prioritas untuk mendanai akses pendidikan di kampung-kampung, terutama pada wilayah 3T dan daerah yang sulit dijangkau. Dana Alokasi Umum (DAU) nonfisik digunakan untuk mendukung penyediaan layanan operasional pendidikan, tunjangan tenaga pendidik, serta program prioritas peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, Dana BOS dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan dasar bagi satuan pendidikan. Dalam konteks Mimika yang merupakan kawasan industri strategis, pemanfaatan CSR industri terutama kerjasama dengan Freeport Indonesia (melalui YPMK) dan UMKM lokal diperluas untuk mendukung infrastruktur pendidikan, beasiswa, kewirausahaan muda, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Penguatan SDM menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan Mimika. Pemerintah perlu menyediakan skema Beasiswa Calon tenaga pendidik OAP sebagai afirmasi bagi putra-putri Orang Asli Papua (terutama suku Kamoro dan Amungme) agar menjadi tenaga pendidik profesional di semua jenjang pendidikan. Untuk memperkuat pemenuhan tenaga pendidik di wilayah ekologi pesisir dan pegunungan, pemerintah juga perlu memanfaatkan skema KPTT (Kawasan Perdesaan, Terpencil dan Tertinggal) serta menyiapkan program rekrutmen dan insentif bagi tenaga pendidik 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Pendekatan ini sekaligus menjamin pemerataan distribusi tenaga pendidik dan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

d. Bidang Kolaborasi

Keberhasilan GDPP sangat ditentukan oleh tingkat kolaborasi antar-stakeholder di Kabupaten Mimika. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem kerja sama yang terstruktur antara Pemerintah Kabupaten, lembaga keagamaan (gereja), Yayasan pelopor pendidikan di tanah Papua (YPPK, YPK, YPPGI, Yayasan Pendidikan Advent dan YAPIS), lembaga adat, dunia usaha dan pertenaga pendidikan tinggi. Kolaborasi ini mencakup penyediaan infrastruktur, riset kebijakan, pemberdayaan

masyarakat, pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sinergi lintas aktor ini menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten Mimika yang multikultural.

e. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Implementasi GDPP memerlukan sistem pemantauan yang transparan dan berbasis bukti. Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengembangkan mekanisme evaluasi tahunan berbasis data real-time, yang terintegrasi dengan Dapodik Daerah dan sistem pelaporan satuan pendidikan. Model monitoring ini memastikan setiap program, indikator dan capaian pembangunan pendidikan dapat diukur secara akurat. Evaluasi berbasis data juga memastikan adaptasi kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga pembangunan pendidikan berjalan efektif, efisien dan akuntabel hingga tahun 2045.

## BAB VI TATA KELOLA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI GDPP

### A. Kelembagaan dan Peran Pemangku Kepentingan

Implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 menuntut perumusan kelembagaan pendidikan yang adaptif, inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial-budaya, kondisi geografis, serta kebutuhan peserta didik. Penguatan kelembagaan tidak hanya berfokus pada struktur organisasi Dinas Pendidikan, tetapi juga pada kejelasan fungsi koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan antar-aktor publik, dan mekanisme pengambilan keputusan yang mampu mengintegrasikan aspirasi lokal. Dengan karakter kabupaten Mimika yang multietnik dan multikontekstual, institusi pendidikan harus berperan sebagai simpul integrasi sosial menghubungkan nilai budaya, kebutuhan pembangunan SDM dan proses modernisasi layanan pendidikan dalam kerangka pembangunan dari kampung ke kota.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menjadi pengendali utama arah kebijakan, penyediaan layanan, serta pengembangan standar mutu. Namun, keberhasilan implementasi GDPP bergantung pada dukungan perangkat daerah lain seperti Bappeda, Dinas Sosial, Kesehatan, PUPR, Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DP3AP2KB, dan perangkat lainnya yang berkontribusi terhadap layanan sosial dasar pendidikan mulai dari kesehatan peserta didik, aksesibilitas wilayah, pembangunan infrastruktur sekolah, hingga layanan perlindungan anak. Sinergi antar-OPD ini memastikan pendidikan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat kabupaten Mimika, termasuk di Kawasan pedalaman dan daerah 3T pada wilayah ekologi pesisir dan pegunungan.

Institusi vertikal seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan lembaga teknis kementerian memiliki peran strategis dalam standardisasi mutu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyelarasan indikator nasional dengan karakteristik lokal kabupaten Mimika. Penguatan ini semakin signifikan karena kabupaten Mimika menghadapi ketimpangan kompetensi tenaga

pendidik, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta mobilitas penduduk yang menyebabkan fluktuasi jumlah peserta didik. Regulasi, pendampingan dan penjaminan mutu berbasis konteks lokal menjadi syarat untuk mewujudkan layanan pendidikan berkualitas.

Dalam masyarakat Mimika, keberhasilan pendidikan juga sangat dipengaruhi lembaga adat, tokoh agama dan komunitas kampung. Legitimasi sosial terhadap kebijakan pendidikan kerap ditentukan oleh persetujuan pemimpin adat, terutama pada kampung-kampung yang masih memegang teguh hukum adat. Sementara itu lembaga keagamaan di wilayah urban tidak hanya memengaruhi nilai pendidikan, tetapi juga menjadi penyedia layanan pendidikan alternatif seperti sekolah swasta dan pusat pengembangan anak. Pelibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga memperpanjang keberlanjutan program pendidikan.

Sektor swasta, terutama perusahaan industri pertambangan seperti PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM) memiliki peran yang semakin strategis dalam menghadapi bonus demografi. Persaingan tenaga kerja terampil dalam sektor pertambangan, industri penunjang tambang, dan ekonomi berbasis jasa menuntut adanya kemitraan *link and match* antara sekolah, lembaga pelatihan vokasi, dan dunia usaha. Dukungan swasta dalam bentuk beasiswa, pelatihan vokasi, magang industri, hingga pembangunan SDM lokal tidak hanya menyiapkan tenaga kerja kompetitif, tetapi juga memastikan masyarakat Mimika menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam rantai ekonomi pertambangan dan ekonomi daerah masa depan.

Perguruan tinggi lokal juga memegang peran penting dalam inovasi pembelajaran, penelitian terapan berbasis lokal, dan pengembangan calon tenaga pendidik yang memahami konteks sosial-budaya Mimika. Kolaborasi dengan dunia akademik memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan memperkaya strategi pengembangan pendidikan yang relevan dengan karakter lokal dan tantangan masa depan. Di sisi lain, lembaga legislatif (DPRK) memastikan keberlanjutan program strategis melalui fungsi anggaran, legislasi

dan pengawasan, sehingga kebijakan pendidikan berjalan konsisten hingga 2045 sesuai arah GDPP.

Seluruh aktor ini harus bekerja bersama dalam kerangka tata kelola kolaboratif pendidikan untuk menghadapi bonus demografi dan persaingan tenaga kerja. Dengan kelembagaan pendidikan yang kuat, kemitraan multipihak yang solid, serta orientasi pada karakter budaya lokal dan kebutuhan ekonomi masa depan, Kabupaten Mimika dapat mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, berdaya saing dan mampu melahirkan generasi terdidik, kompetitif dan tetap berakar pada jati diri Mimika.

## **B. Tata Kelola Pendidikan Berbasis Data dan Konteks Wilayah**

Tata kelola pendidikan berbasis data menjadi kebutuhan mutlak bagi Kabupaten Mimika, mengingat kompleksitas wilayah dan ketimpangan akses pendidikan antar distrik. Data pendidikan tidak boleh terfragmentasi, baik antara sekolah, organisasi perangkat daerah, kementerian, maupun lembaga eksternal. Untuk itu kabupaten Mimika membutuhkan sistem data pendidikan yang terintegrasi, akurat dan mudah diakses sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat sasaran.

Analisis konteks wilayah menjadi komponen penting dalam tata kelola data. Kondisi obyektif geografis kabupaten Mimika yang terdiri dari daerah perkotaan, pinggiran dan pedalaman yang tersebar pada wilayah pesisir, dataran dan pegunungan mempengaruhi akses siswa dan tenaga pendidik ke sekolah. Data spasial harus digunakan untuk mengidentifikasi titik layanan pendidikan, kondisi infrastruktur sekolah, ketidakterjangkauan wilayah tertentu serta kebutuhan transportasi pendidikan. Dengan pendekatan spasial, intervensi seperti pembangunan sekolah kecil, tenaga pendidik kunjung atau sekolah berbasis komunitas dapat dirancang lebih presisi.

Kualitas data harus diperkuat melalui mekanisme validasi, pemutakhiran berkala dan integrasi antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), data DUKCAPIL, dan data sosial lainnya. Hal ini penting karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data peserta didik dan kondisi riil di lapangan, terutama akibat mobilitas penduduk, anak belum tercatat atau anak putus sekolah.

Penguatan tata kelola data juga perlu memperhatikan kelompok rentan. Data harus mampu menangkap kondisi anak dengan hambatan geografis, sosial ekonomi, disabilitas atau latar belakang budaya tertentu yang mempengaruhi akses mereka terhadap layanan pendidikan. Dengan data inklusif, kebijakan dapat diformulasikan lebih adil dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi pendidikan berbasis *dashboard* akan membantu pemerintah daerah dalam memantau capaian mutu pembelajaran, distribusi tenaga pendidik, angka partisipasi sekolah, serta efektivitas intervensi pendidikan. Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Tata kelola data juga perlu mengintegrasikan analisis kebutuhan tenaga pendidik, kebutuhan ruang kelas, distribusi buku pelajaran, dan sarana pembelajaran digital. Dengan integrasi tersebut, perencanaan pendidikan dapat mendukung pemanfaatan bonus demografi, memperkuat kualitas SDM lokal, dan merespons perkembangan ekonomi daerah.

Pada akhirnya tata kelola pendidikan berbasis data dan konteks wilayah harus didukung oleh komitmen politik, kapasitas SDM dan regulasi daerah. Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat, data berisiko tidak digunakan secara optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan sistem tata kelola data yang baik, kabupaten Mimika dapat merancang pembangunan pendidikan yang akuntabel, tepat sasaran dan berkelanjutan.

### **C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MEP)**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan menjadi instrumen strategis untuk memastikan implementasi pembangunan pendidikan di kabupaten Mimika berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak nyata bagi peserta didik. Sistem MEP yang baik harus mampu memantau kinerja program, menilai kualitas pembelajaran, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat peningkatan mutu pendidikan.

Monitoring dilakukan secara berkala oleh dinas pendidikan dan unit pelaksana teknis sekolah. Pelaksanaan monitoring tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga proses pembelajaran, kehadiran tenaga pendidik dan siswa, kualitas asesmen, serta tingkat pemanfaatan fasilitas sekolah. Monitoring yang komprehensif memungkinkan pemerintah memahami kondisi pendidikan secara nyata dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi cepat.

Evaluasi pendidikan perlu dilakukan dengan pendekatan berlapis: evaluasi internal sekolah, evaluasi dinas pendidikan, serta evaluasi eksternal oleh lembaga independen atau akademisi. Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan infrastruktur sekolah atau implementasi kurikulum berbasis konteks lokal. Proses evaluasi harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang jelas, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Pelibatan masyarakat, komite sekolah serta tokoh adat dan agama dalam evaluasi merupakan elemen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Di wilayah kabupaten Mimika yang masyarakatnya beragam, perspektif komunitas lokal akan memperkaya identifikasi masalah dan meningkatkan kualitas solusi yang ditawarkan.

Pelaporan pembangunan pendidikan harus mengikuti standar nasional namun disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Laporan harus disampaikan secara berkala kepada kepala daerah, DPRK dan masyarakat melalui kanal resmi seperti website atau dashboard pendidikan. Transparansi pelaporan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat budaya akuntabilitas.

Integrasi MEP pendidikan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk mempercepat arus informasi dan memperkuat pengambilan keputusan. Dashboard monitoring pendidikan dapat menampilkan capaian indikator seperti APS, APK, APM, literasi-numerasi, distribusi tenaga pendidik, kondisi bangunan sekolah dan tingkat partisipasi komunitas.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam tata kelola pendidikan daerah. Setiap rekomendasi monitoring dan evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata sehingga

pembangunan pendidikan di kabupaten Mimika terus bergerak menuju arah yang lebih baik, efisien dan berorientasi pada keberhasilan belajar siswa.

#### **D. Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan Pembangunan Pendidikan**

Penguatan kapasitas menjadi pilar utama keberhasilan pembangunan pendidikan di kabupaten Mimika, terutama pada wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan sosial. Penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan kepada tenaga pendidik, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, staf dinas, serta komite sekolah dan masyarakat pendukung pendidikan. Dengan kapasitas yang memadai, seluruh aktor dapat menjalankan perannya secara profesional, efektif dan berorientasi pada mutu.

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi prioritas mengingat masih adanya kesenjangan kompetensi antar wilayah. Pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan tenaga pendidik, komunitas belajar, serta program tenaga pendidik penggerak dapat diperkuat untuk mendukung implementasi kurikulum yang relevan dan kontekstual. Tenaga pendidik di wilayah terpencil perlu mendapat insentif dan dukungan khusus agar tetap termotivasi dan mampu bertahan dalam kondisi geografis yang menantang.

Penguatan kapasitas juga mencakup peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam tata kelola, manajemen sekolah dan kepemimpinan pembelajaran. Kepala sekolah yang kompeten menjadi kunci terciptanya budaya belajar yang positif, penguatan mutu pembelajaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Peran masyarakat dalam keberlanjutan pendidikan sangat penting. Penguatan kapasitas komite sekolah, orang tua, tokoh adat dan organisasi keagamaan dapat memperkuat dukungan sosial bagi sekolah. Pendidikan akan lebih berhasil apabila masyarakat memahami pentingnya kehadiran anak, peran orang tua dalam belajar dan kontribusi komunitas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Keberlanjutan pembangunan pendidikan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan konsisten. Pemerintah daerah perlu memastikan

pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan sekolah, penyediaan sumber daya pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kemitraan dengan swasta, lembaga internasional dan organisasi nonpemerintah dapat memperluas sumber daya yang tersedia.

Transformasi digital juga menjadi elemen keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, literasi digital tenaga pendidik dan siswa, sistem informasi sekolah, serta manajemen data pendidikan harus terus dikembangkan. Inovasi ini sangat relevan bagi Mimika yang memiliki wilayah sulit dijangkau, sehingga teknologi dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas.

Keberlanjutan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada komitmen politik, regulasi yang kuat, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Dengan memadukan kapasitas SDM, inovasi pembelajaran dan dukungan sosial masyarakat, Mimika dapat membangun sistem pendidikan yang berketahanan, inklusif dan mampu menjawab tantangan masa depan mewujudkan Generasi Emas Mimika Tahun 2045.

## BAB VI P E N U T U P

Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 membutuhkan dukungan multipihak, komitmen kelembagaan, serta konsistensi program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Mimika yang beragam. Masyarakat Mimika terdiri atas Orang Asli Papua (OAP) beserta struktur adatnya sebagai pemegang mandat otonomi khusus, serta penduduk non-OAP yang hidup dan berkontribusi dalam dinamika sosial dan ekonomi daerah. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan GDPP sangat bergantung pada peran pemerintah pusat, dunia usaha dan industri termasuk sektor pertambangan dan UMKM, serta mitra pembangunan yang telah lama berkiprah dalam penyediaan layanan pendidikan di wilayah ekologi pesisir dan pedalaman, pada kawasan pinggiran dan pedalaman.

Dalam kerangka tersebut, terdapat lima faktor utama yang akan menentukan efektivitas implementasi GDPP Kabupaten Mimika.

### 1. Kemauan dan Komitmen Politik

Kemauan politik dan komitmen politik kepala daerah menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan pendidikan. Kemauan politik mencerminkan kesediaan pemerintah daerah untuk mendorong perubahan, sedangkan komitmen politik menunjukkan konsistensi dalam mengawal kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan program pendidikan. Kedua aspek ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan reformasi pendidikan, terutama dalam konteks kebutuhan kabupaten Mimika yang kompleks dan wilayah layanan yang tersebar hingga wilayah ekologi pesisir dan pegunungan.

### 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan Antar Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi GDPP memerlukan kesamaan pemahaman, visi, dan cara pandang di antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan yaitu pemerintah daerah, lembaga adat dan agama, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Keselarasan persepsi ini menjadi dasar bagi koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Roadmap pendidikan berfungsi memastikan semua pihak berorientasi pada tujuan yang

sama, yaitu penyelenggaraan pendidikan kabupaten Mimika yang berkualitas, inklusif, dan bebas dari intervensi kepentingan jangka pendek.

### 3. Konsistensi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pembangunan pendidikan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan keteguhan dan kontinuitas kebijakan. Konsistensi dalam menjalankan program prioritas GDPP, termasuk penyediaan layanan dasar, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola, dan inovasi yang harus tetap terjaga meskipun terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik. Tanpa keberlanjutan, capaian pembangunan pendidikan tidak akan menghasilkan dampak yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi kabupaten Mimika.

### 4. Ketersediaan dan Keberpihakan Anggaran Daerah

Ketersediaan anggaran merupakan instrumen politik anggaran kepala daerah untuk mendorong akselerasi pembangunan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dan berpihak pada sektor pendidikan, termasuk sinergi Dana OTSUS, DAU, Dana BOS, dan sumber pembiayaan lainnya. Penggunaan anggaran harus diarahkan pada perbaikan layanan pendidikan di kawasan sulit akses, peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana prasarana yang layak, serta penguatan sistem tata kelola data pendidikan daerah.

### 5. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat keberhasilan GDPP melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan, partisipasi dan pemanfaatan program-program pendidikan. Dukungan masyarakat, baik melalui lembaga adat, gereja, komunitas perempuan dan pemuda, maupun organisasi lokal mampu memperkuat implementasi program, mendorong akuntabilitas, serta memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan nyata di kampung, distrik dan kawasan terpencil.

Sebagai dokumen yang dinamis, GDPP Kabupaten Mimika tetap terbuka terhadap penyempurnaan melalui integrasi gagasan baru, inovasi kebijakan dan penyesuaian berbasis evaluasi. Dengan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan, Kabupaten Mimika

dapat mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, tangguh dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi modal penting dalam memerangi kebodohan dan kemiskinan serta memaksimalkan peluang Bonus Demografi 2030-2035 menuju terwujudnya Generasi Emas Mimika Tahun 2045.-

## DAFTAR PUTAKA

- BAPPEDA Mimika. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2024-2025*, Timika.
- BAPPENAS. (2020) *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*, Jakarta.
- BAPPENAS. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2025*, Jakarta.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.
- BKKBN Pusat. (2024). *Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia Tahun 2045*, Jakarta.
- BPS Papua. (2024). *Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2023*, Jayapura.
- BSNP (2020). *Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045*. Badan Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kemendikbudristek. (2024). *Profil Pendidikan Indonesia dan Transformasi Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2024). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045*. Jakarta.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance?* Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Mimika, (2025). *Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025-2045*, Mimika.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang *Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*.
- Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2023 Tentang *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) Tahun 2022-2041*.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (2007). *Decentralizing Governance*. Brookings Institution Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Suryadi, A. (2014). *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan*. Penerbit: Rosda Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang *Pembentukan Provinsi Papua Tengah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 (sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 2000) Tentang *Otonomi Khusus Papua*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2025*.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris.
- World Bank. (2018). *World Development Report: Learning to Realize Education's Promise*.
- World Bank. (2023). *Papua Human Capital Development Review*.